



# **LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2025**

**DINAS KESEHATAN  
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

---

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur kami panjatkan Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat nikmat kesehatan dan kekuatan sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj) Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah dapat disusun dan diselesaikan. Penyusunan laporan kinerja Instansi Pemerintah ini dimaksudkan sebagai bahan pertanggungjawaban atas kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah dalam pelaksanaan pembangunan kesehatan dan pemberian pelayanan umum kepada masyarakat selama tahun 2025. Disamping itu LKIP ini juga dimaksudkan sebagai bahan evaluasi pencapaian kinerja terhadap Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dalam mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan.

Kami menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan LKj ini belum memenuhi semua kriteria penyusunan yang sempurna. Oleh sebab itu, sehubungan dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tanggal 20 November 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan kinerja Instansi dan tata cara Reviw atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah akan senantiasa melakukan penyempurnaan di masa-masa yang akan datang. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini juga merupakan hasil dari laporan kinerja seluruh program yang ada di lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah. Secara garis besar laporan ini memuat data/informasi mengenai perencanaan kinerja sebagai target rencana kerja dan realisasi/ capaian kinerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025.

Dalam rangka memenuhi fungsi LKj sebagai sumber informasi untuk perbaikan kinerja secara berkelanjutan. Informasi yang disajikan dalam LKj ini dapat dijadikan bahan analisis untuk mengidentifikasi peluang dan mengatasi tantangan sebagai masukan guna perbaikan kinerja pada masa yang akan datang. Akhir kata semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini dapat bermanfaat khususnya sebagai sarana pertanggungjawaban kinerja atas pelaksanaan tugas Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah khususnya bidang kesehatan.

Palu, 20 Februari 2026

Mengetahui,  
Kepala Dinas Kesehatan  
Provinsi Sulawesi Tengah

  
**dr. Syahriar, M.Kes**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19700405 200212 1 006

**KATA PENGANTAR**

**DAFTAR ISI**

**BAB I**

**PENDAHULUAN**

- 1.1. Gambaran Umum
- 1.2. Tugas Fungsi dan struktur Organisasi
- 1.3. Isu Strategis
- 1.4. Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi AKIP

**BAB II**

**PERENCANAAN KINERJA**

- 2.1. Renstra Perangkat Daerah
- 2.2. Struktur Program dan Kegiatan Tahun 2025
- 2.3. Indikator Kinerja Utama
- 2.4. Perjanjian Kinerja

**BAB III**

**AKUNTABILITAS KINERJA**

- 3.1 Capaian Kinerja
  - a. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini
  - b. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir
  - c. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka panjang menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi
  - d. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional/daerah lain
  - e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan
  - f. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya
  - g. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja
- 3.2 Realisasi Anggaran
- 3.3 Inovasi
- 3.4 Penghargaan

**AB IV      PENUTUP**

**LAMPIRAN**

- PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN 2025



## ***Ikhtisar Eksekutif***

Dalam rangka mendukung penyelenggaraan mewujudkan Visi Gubernur Sulawesi Tengah **“BERANI WUJUDKAN SULAWESI TENGAH MAJU DAN BERKELANJUTAN”**, dengan Misi ke - 1 yaitu “Mewujudkan Masyarakat Sehat, Cerdas Dan Sejahtera Melalui Pemenuhan Kebutuhan Dasar Dan Penyediaan Lapangan Kerja.” Peranan Dinas Kesehatan sebagai pembuat dan Pembina kebijakan esensinya adalah memberikan dukungan terhadap pelaksanaan pembangunan kesehatan secara keseluruhan dalam upaya pencapaian visi yang tertuang dalam dokumen Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2025 s.d 2030.

Program Upaya Penyediaan Sumber Daya manusia Kesehatan adalah Program bertujuan menjamin ketersediaan dan pemerataan, sumber daya manusia kesehatan dengan sasaran adalah meningkatnya dan meratanya sumber daya manusia kesehatan difasilitas pelayanan kesehatan baik secara jumlah maupun kualitas. Tahun 2025 jumlah tenaga kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya melalui Pendidikan, pelatihan, magang, bimbingan teknis dan sosialisasi sebanyak 6.558 orang dimana target sebanyak 3.898 orang dengan realisasi 168.24 % sedangkan untuk jumlah tenaga kesehatan yang teregistrasi terealisasi sebanyak 10.000 orang dari 18.777 orang yang ditargetkan tahun 2025. Peningkatan kemampuan tenaga kesehatan dilakukan untuk menjawab tantangan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dibidang kesehatan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Upaya ini di dukung melalui pembiayaan bersumber dana APBD maupun APBN melalui kegiatan Pendidikan berkelanjutan maupun pelatihan atau peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan.

Program Upaya Pelayanan Kesehatan Primer yakni penguatan pelayanan kesehatan dimana masyarakat dapat menjangkau fasilitas pelayanan kesehatan yang bermutu khususnya di fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama (FKTP) yakni puskesmas dan jaringannya. Salah satu kebijakan untuk mendukung masyarakat agar mendapat pelayanan kesehatan yang berkualitas

adalah dengan mengakreditasi proses pelaksanaan kegiatan di puskesmas. Akreditasi dimaksudkan untuk memberikan pengakuan bahwa puskesmas dalam melaksanakan kegiatan telah mengacu pada system dan proses yang telah ditetapkan sesuai standar. Tahun 2025 puskesmas yang telah terakreditasi di Provinsi Sulawesi Tengah sebesar 96,8% atau 216 Puskesmas dari 220 puskesmas. Peningkatan mutu pelayanan kesehatan di puskesmas selain dengan pengakuan melalui akreditasi juga diikuti dengan pemenuhan sarana, prasarana dan peralatan melalui pendanaan bersumber dari APBD kab/Kota juga dengan dana Pemerintah Pusat (Kementrian Kesehatan) melalui dana alokasi Khusus (DAK).

Umur Harapan Hidup saat lahir (UHH) yang merepresentasikan dimensi umur panjang dan hidup sehat terus meningkat dari tahun ke tahun. Jika dibandingkan target usia harapan hidup/angka harapan hidup pada tahun 2025 sudah mencapai target yaitu 70.01. Interpretasi dari angka kelahiran hidup ini adalah seorang bayi yang di lahirkan di provinsi Sulawesi Tengah pada Tahun 2025 mempunyai harapan untuk hidup selama 71.10 tahun kedepan. Angka kematian ibu Realisasi Angka Kematian Ibu di Provinsi Sulawesi Tengah pada tahun 2025 sebesar 131,95 per 100000 KH dengan jumlah kasus kematian ibu sebanyak 72 kasus dengan 3 kabupaten terbanyak jumlah kasusnya yaitu di kabupaten Banggai dan Parigi Moutong masing-masing sebanyak 11 kasus, kabupaten Donggala dan Kabupaten Sigi masing-masing sebanyak 7 kasus. Angka Kematian Ibu tahun 2023 sampai tahun 2025 ini mengalami kenaikan yaitu pada tahun 2023 sebesar 109,12 per 100000 KH, mengalami kenaikan pada tahun 2024 sebesar 119,9 per 100000 KH, dan mengalami kenaikan pada tahun 2025 sebesar 131,95 per 100000 KH .

Hambatan-hambatan utama dalam pencapaian usia harapan hidup adalah Pergeseran Pola Penyakit (Transisi Epidemiologi), Akses dan Kualitas Layanan Kesehatan. Faktor Lingkungan dan Sanitasi, Polusi Udara, stunting, Perilaku dan Gaya Hidup Risiko Tinggi, Tingginya Angka Perokok, Kesehatan Mental, Tingkat Ekonomi dan Pendidikan, Kemiskinan dan Rendahnya Literasi Kesehatan.

Untuk meningkatkan Usia Harapan Hidup (UHH), upaya yang dilakukan harus mencakup seluruh siklus hidup manusia, mulai dari dalam kandungan hingga lanjut usia. Strateginya melibatkan kolaborasi antara pemerintah, sektor

swasta, dan kesadaran individu. Langkah-langkah strategis dalam meningkatkan UHH adalah Penguatan Layanan Kesehatan Dasar (Preventif & Promotif), Mencegah jauh lebih efektif (dan murah) daripada mengobati, Penanganan Gizi dan Stunting, Perbaikan Infrastruktur Lingkungan, Transformasi Ekonomi dan Pendidikan dan Program Kesehatan Lanjut Usia (Lansia). Karena UHH meningkat, jumlah lansia juga bertambah, sehingga kualitas hidup mereka harus dijaga.

Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah mendapat Prestasi dan Penghargaan yang diperoleh Dinas Kesehatan Provinsi di tahun 2025 Dinas Kesehatan Provinsi d a p a t Predikat A dalam SAKIP Aword 2025 Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.

Anggaran Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025 sebesar Rp.**263.541.121.342,-** terealisasi tahun 2025 adalah sebesar Rp.**251.719.859.512** atau 95.51% dan realisasi fisik 99.41%.



# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Gambaran Umum

Seiring dengan pelaksanaan rencana pembangunan daerah, maka Gubernur Sulawesi Tengah telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 57 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah, Renstra sebelumnya perlu dilakukan penyesuaian guna sinkronisasi terhadap program kegiatan bagi BLUD. Selanjutnya untuk mendukung optimalisasi pelayanan maka dibentuk Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah sebagai unit kerja yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK - BLUD) dengan status bertahap yaitu: a) Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Kesehatan; b) Unit Pelaksana Teknis Balai Pendidikan Pelatihan Kesehatan; c) Unit Pelaksana Teknis Pusat Pelayanan Keselamatan Terpadu; d) Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Undata; dan e) Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Madani.

#### SDM Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah

Sumber daya tenaga kesehatan yang bekerja pada Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah dan UPT berasal dari berbagai disiplin ilmu dan tingkat pendidikan serta ditempatkan sesuai dengan keahlian yang dimiliki.

*Tabel 2. 1 SDM Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025*

No.	BAGIAN BIDANG/UPT	JUMLAH (Org)			KETERANGAN
		L	P	L + P	
1	2	3	4	5	6
1	KEPALA DINAS				
2	SEKRETARIS		1	1	Epidemiologi ,S2
3	SUBBAGIAN				
	a. Kepala Subbagian Keuangan		1	1	Kesmas S1
	b. Kepala Subbagian Kepegawaian dan Umum				
	c. Kelompok Jabatan Fungsional	1		1	S1
	d. Staf	30	35	65	- S2 = 10 org - S1/D4 = 25 org - D3 = 5 org - D1 = 1 org - SLTA = 24 org - SLTP = 0 org - SD = 0 org
4.	BIDANG				

No.	BAGIAN BIDANG/UPT	JUMLAH (Org)			KETERANGAN
		L	P	L + P	
a.	Kepala Bidang Bina Pelayanan Kesehatan		1	1	Kesmas, S2
	1. Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Primer		1	1	....., S2
	2. Kepala Seksi Kesehatan Rujukan		1	1	...., S2
	3. Kelompok Jabatan Fungsional		1	1	Kesmas, S2
	4. Staf	10	29	39	- S2 = 5 org - S1 = 22 org - D3 = 3 org - D1 = 3 org - SLTA = 6 org
b.	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat				
	1. Kepala Seksi Promkes dan Pemberdayaan Masyarakat	1		1	Kesehatan, S1
	2. Kepala Seksi Kesling, Kesker dan Olahraga	1		1	Teknik, S1
	3. Kelompok Jabatan Fungsional				
	4. Staf	19	35	54	- S2 = 16 org - S1/D4 = 32 org - D3 = 3 org - SLTA = 3 org
c.	Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan		1	1	.....,S2
	1. Kepala Seksi Farmasi, Kosalkes dan Mamin		1	1	Apoteker, S1
	2. Kepala Seksi Alkes, dan perbekalan		1	1	.....,S2
	3. Kelompok Jabatan Fungsional		1	1	Kesehatan, S2
	4. Staf	12	29	41	- S2 = 9 org - S1/D4 = 25 org - D3 = 6 org - SLTA = 1 org
d.	Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit		1	1	Dokter, S2
	1. Kepala Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	1		1	Dokter, S1
	2. Kepala Seksi Pengamatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa		1	1	Kesmas, S1
	3. Kelompok Jabatan Fungsional	1		1	Dokter, S2
	4. Staf	19	39	58	- S2 = 12 org - S1/D4 = 40 org - D3 = 4 org - SLTA = 2 org
<b>Total</b>		<b>95</b>	<b>179</b>	<b>274</b>	

Sumber: Data Kepegawaian Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah, 2025

a. SDM UPTD Laboratorium Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah

*Tabel 2 . 2 SDM UPTD Laboratorium Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025*

No.	BAGIAN BIDANG/UPT	JUMLAH (Org)			KETERANGAN
		Laki-Laki	Perempuan	L + P	
1	2	3	4	5	6
1	KEPALA			1	Dokter S1
2	SUBBAGIAN				
	a. Kepala Subbagian Tata Usaha	1		1	S2 Epidemiologi
	b. Kepala Seksi Pelayanan Dan Mutu		1	1	D4 Analis
	c. Kepala Seksi Pengujian		1	1	S2 Manajemen
	d. Staf	11	27	38	- S2 = 4 Org - S1/D4 = 19 org - D3 = 13 org - D1 = 1 org - SLTA = 1 org
<b>Total</b>		<b>11</b>	<b>27</b>	<b>38</b>	

Sumber : UPTD Laboratorium Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah, 2025

b. SDM UPTD Balai Pendidikan Pelatihan Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025

*Tabel 2 . 3 SDM UPTD Bapelkes Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025*

No.	BAGIAN BIDANG/UPT	JUMLAH (Org)			KETERANGAN
		L	P	L + P	
1	2	3	4	5	6
1	KEPALA	0	1	1	S2 Administrasi Publik
2	SUBBAGIAN				
	a. Kepala Subbagian Tata Usaha	0	1	1	Sarjana Pertanian
	b. Kepala Seksi Pengendalian Mutu	0	1	1	S2 Administrasi Publik
	c. Kepala Seksi Penyelenggaraan	0	1	1	S2 Administrasi Publik
	d. Staf	2	12	14	- S2 = 14 org
		2	22	24	- S1/D4 = 17 org
		3	7	10	- D3 = 6 org
		17	9	26	- SLTA = 9 org
		0	0	0	- SLTP = 0 org
<b>Total</b>		<b>24</b>	<b>54</b>	<b>78</b>	

Sumber: UPTD Bapelkes Provinsi Sulawesi Tengah, 2025

c. SDM UPTD Pusat Pelayanan Keselamatan Terpadu Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025

Tabel 2. 4 SDM UPTD P2KT Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025

No.	BAGIAN BIDANG/UPT	JUMLAH (Org)			KETERANGAN
		L	P	L + P	
1	2	3	4	5	6
1	KEPALA		1	1	S2 Kesehatan
2	SUBBAGIAN				
	a. Kepala Subbagian Tata Usaha		1	1	S2 Kesehatan
	b. Kepala Seksi Kewaspadaan		1	1	S1 Kesehatan
	c. Kepala Seksi Penanganan Krisis Kesehatan	1		1	S2 Kesehatan
	d. Staf	18	20	38	- S2 = 1 orang - S1/D4 = 18 orang - D3 = 14 orang - SLTA = 5 orang
<b>Total</b>		<b>19</b>	<b>23</b>	<b>42</b>	

Sumber: UPTD P2KT Provinsi Sulawesi Tengah,, 2025

## 1.2. Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur

### Organisasi Tugas Dinas

#### Kesehatan

Dinas mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Provinsi

#### Fungsi Dinas Kesehatan

Dalam menyelenggarakan tugas Dinas Kesehatan mempunyai fungsi:

- penyiapan bahan perumusan kebijakan di Bidang Kesehatan Masyarakat, Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Peladangan Kesehatan, dan Kefarmasian, Alat Kesehatan dan Sumber Daya Manusia;
- pelaksanaan kebijakan di Bidang Kesehatan Masyarakat, Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Pelayanan Kesehatan, dan Kefarmasian, Alat Kesehatan dan Sumber Daya Manusia;
- pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di Bidang Kesehatan Masyarakat, Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Pelayanan Kesehatan, dan Kefarmasian, Alat Kesehatan dan Sumber Daya Manusia;

- d. pelaksanaan administrasi Dinas di Bidang Kesehatan Masyarakat, Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Pelayanan Kesehatan, dan Kefarmasian, Alat Kesehatan dan Sumber Daya Manusia;

### **Uraian Tugas Organisasi Kesehatan**

#### **1. Kepala Dinas**

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Provinsi. Dalam menyelenggarakan tugasnya, Kepala Dinas mempunyai fungsi:

- 1) penyiapan bahan perumusan kebijakan di Bidang Kesehatan Masyarakat, Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Pelayanan Kesehatan, dan Kefarmasian, Alat Kesehatan dan Sumber Daya Manusia;
- 2) pelaksanaan kebijakan di Bidang Kesehatan Masyarakat, Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Pelayanan Kesehatan, dan Kefarmasian, Alat Kesehatan dan Sumber Daya Manusia;
- 3) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di Bidang Kesehatan Masyarakat, Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Pelayanan Kesehatan, dan Kefarmasian, Alat Kesehatan dan Sumber Daya Manusia;
- 4) pelaksanaan administrasi Dinas di Bidang Kesehatan Masyarakat, Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Pelayanan Kesehatan, dan Kefarmasian, Alat Kesehatan dan Sumber Daya Manusia;
- 5) pelaksanaan administrasi Dinas; dan
- 6) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

#### **2. Sekretaris**

Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan urusan pengelolaan administrasi, program, keuangan, aset, kepegawaian, umum dan Korpri di lingkungan Dinas. Dalam menyelenggarakan tugasnya, Sekretaris mempunyai fungsi :

- 1) penyiapan bahan perumusan kebijakan rencana kerja, pengelolaan administrasi keuangan, aset, kepegawaian dan umum;

- 2) penyiapan bahan pengkoordinasian perumusan rencana kerja, pengelolaan keuangan, aset, kepegawaian dan umum;
- 3) penyiapan bahan pembinaan teknis operasional pelayanan administrasi keuangan, aset, kepegawaian, rumah tangga dan umum;
- 4) pelaksanaan urusan penyusunan rencana pengelolaan keuangan, aset, kepegawaian, rumah tangga dan umum;
- 5) pelaksanaan pengendalian dan pemantauan penyelenggaraan urusan pengelolaan keuangan, aset, kepegawaian, rumah tangga dan umum;
- 6) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas administrasi di lingkungan Dinas; dan
- 7) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya.

a. **Sub Bagian Keuangan dan Aset**

Sub Bagian Keuangan dan Aset mempunyai tugas melaksanakan pembinaan teknis administrasi, pengelolaan keuangan dan aset. Uraian tugas Sub Bagian Keuangan dan Aset meliputi :

- 1) melaksanakan pengelolaan administrasi dan penyusunan program kerja Sub Bagian Keuangan dan Aset;
- 2) menghimpun peraturan perundang-undangan, pedoman, petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan pengelolaan keuangan dan aset;
- 3) melaksanakan penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan kegiatan keuangan dan aset dengan pihak lain dan unit kerja terkait;
- 4) melaksanakan pembinaan teknis pelaksanaan kegiatan pengelolaan keuangan dan aset;
- 5) melakukan urusan perbendaharaan, verifikasi dan administrasi pengelolaan keuangan dan aset;
- 6) melaksanakan pengelolaan tata usaha keuangan, aset dan penyiapan pembayaran gaji pegawai;
- 7) melaksanakan administrasi dan penyeteroran penerimaan bukan pajak Daerah;
- 8) melaksanakan pemeliharaan barang milik Daerah;
- 9) melakukan evaluasi terhadap kegiatan pengelolaan keuangan dan aset;

- 10) melaksanakan peyiapan bahan monitoring, evaluasi dan menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Sub Bagian Keuangan dan Aset serta Dinas; dan
- 11) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Pimpinan.

b. **Sub Bagian Kepegawaian dan Umum**

Sub Bagian Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas melaksanakan pembinaan teknis pengelolaan urusan kepegawaian, rumah tangga, umum, kehumasan, hukum, organisasi, pengaduaan masyarakat dan surat menyurat. Uraian tugas Sub Bagian Kepegawaian dan Umum meliputi :

- 1) melaksanakan pengelolaan administrasi dan menyusun rencana kerja Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
- 2) menghimpun peraturan perundang-undangan, pedoman, petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan pengelolaan urusan kepegawaian, rumah tangga, umum, kehumasan, hukum, organisasi, pengaduaan masyarakat dan Korpri;
- 3) melakukan koordinasi dan pembinaan urusan Korpri di lingkungan Dinas;
- 4) melaksanakan penyiapan bahan koordinasi pengelolaan urusan kepegawaian dan umum;
- 5) melaksanakan/menyiapkan bahan usulan kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, pensiun, penetapan status kepegawaian, pembuatan Kartu Pegawai, Kartu BPJS, TASPEN, Kartu Suami/Isteri, dan SKP;
- 6) melaksanakan pengelolaan persuratan, kehumasan, dokumentasi, arsip, perpustakaan, dan hukum;
- 7) melaksanakan pengoordinasian penyusunan Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, Evaluasi Jabatan, Peta Jabatan, dan Standar Kompetensi Jabatan;
- 8) melaksanakan pengoordinasian penyusunan Standar Operasional Prosedur dan Standar Pelayanan Minimum;
- 9) melaksanakan/mengelola Angka Kredit Jabatan Fungsional;
- 10) melaksanakan penyusunan Nominatif dan Daftar Urut Kepangkatan serta mengelola Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian;

- 11) melaksanakan urusan rumah tangga, penyiapan pelaksanaan upacara, rapat, penerimaan tamu, kebersihan dan keamanan di lingkungan kantor;
- 12) melaksanakan monitoring dan evaluasi hasil penyelenggaraan kegiatan Sub Bidang Kepegawaian dan Umum;
- 13) melaksanakan peyiapan bahan monitoring, evaluasi dan menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Sub Bagian Kepegawaian dan Umum serta Dinas; dan
- 14) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan Pimpinan.

### **3. Bidang Kesehatan Masyarakat**

Bidang Kesehatan Masyarakat mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan, pembinaan, koordinasi, fasilitasi, evaluasi serta pelaporan terhadap penyelenggaraan fungsi kesehatan masyarakat. Dalam menyelenggarakan tugasnya, Bidang Kesehatan Masyarakat mempunyai fungsi :

- 1) perumusan kebijakan teknis Bidang Kesehatan Masyarakat;
- 2) pelaksanaan kebijakan di Bidang Kesehatan Masyarakat;
- 3) pembinaan/bimbingan teknis di Bidang Kesehatan Masyarakat;
- 4) pelaksanaan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan tugas di Bidang Kesehatan Masyarakat;
- 5) pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
- 6) penyiapan bahan dan data serta menyusun dan menyampaikan bahan laporan pelaksanaan tugas Bidang Kesehatan Masyarakat.

#### **a. Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat**

Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, koordinasi, pembinaan, fasilitasi, serta monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan kegiatan promosi dan pemberdayaan masyarakat. Uraian tugas Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat meliputi :

- 1) mengelola administrasi dan menyusun program kerja Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat;
- 2) menyiapkan bahan dan melakukan pembinaan pelaksanaan kegiatan promosi dan pemberdayaan masyarakat;

- 3) menyiapkan bahan dan melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan promosi dan pemberdayaan masyarakat;
- 4) melaksanakan kegiatan teknis seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat;
- 5) melaksanakan kegiatan promosi dan pemberdayaan masyarakat;
- 6) melakukan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat; dan
- 7) melaksanakan penyiapan bahan dan data serta menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat.

**b. Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Kesehatan Olahraga**

Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Kesehatan Olahraga mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, koordinasi, pembinaan, fasilitasi, serta monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan kegiatan kesehatan lingkungan, kesehatan kerja, kesehatan olahraga dan kesehatan haji. Uraian tugas Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Kesehatan Olahraga meliputi :

- 1) mengelola administrasi dan menyusun program kerja Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Kesehatan Olahraga;
- 2) menghimpun peraturan perundang-undangan dan menyiapkan pedoman, petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan kesehatan lingkungan, kesehatan kerja, kesehatan olahraga dan kesehatan haji;
- 3) menyiapkan bahan dan melakukan pembinaan kegiatan kesehatan lingkungan, kesehatan kerja, kesehatan olahraga dan kesehatan haji;
- 4) melaksanakan kebijakan pada kegiatan kesehatan lingkungan, kesehatan kerja, kesehatan olahraga dan kesehatan haji;
- 5) melakukan bimbingan teknis kesehatan lingkungan, kesehatan kerja, kesehatan olahraga dan kesehatan haji;
- 6) melaksanakan kegiatan teknis Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Kesehatan Olahraga;
- 7) melakukan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Kesehatan Olahraga;

- 8) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Pimpinan; dan
- 9) melaksanakan penyiapan bahan dan data serta menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Kesehatan Olahraga.

#### **4. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit**

Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan, pembinaan, koordinasi, fasilitasi, evaluasi serta pelaporan terhadap penyelenggaraan pencegahan dan pengendalian penyakit. Dalam menyelenggarakan tugasnya, Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit mempunyai fungsi :

- 1) perumusan kebijakan teknis Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit;
- 2) pelaksanaan kebijakan di Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit;
- 3) pembinaan/bimbingan teknis di Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit;
- 4) pelaksanaan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan tugas di Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit;
- 5) pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
- 6) penyiapan bahan dan data serta menyusun dan menyampaikan bahan laporan pelaksanaan tugas Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit.

##### **a. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular**

Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, koordinasi, pembinaan, fasilitasi, serta monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan kegiatan pencegahan dan pengendalian penyakit menular. Uraian tugas Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular meliputi :

- 1) mengelola administrasi dan menyusun program kerja Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular;
- 2) menyiapkan bahan dan melakukan pembinaan pelaksanaan kegiatan pencegahan dan pengendalian penyakit menular;

- 3) melaksanakan kebijakan pada kegiatan Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular;
- 4) pembinaan dan bimbingan teknis Pencegahan Pengendalian Penyakit Menular;
- 5) melakukan pemantauan, pencegahan dan pengendalian penyakit menular;
- 6) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Pimpinan; dan
- 7) melaksanakan penyiapan bahan dan data serta menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular.

**b. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit tidak Menular, Kesehatan Jiwa dan Napza**

Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit tidak Menular, Kesehatan Jiwa dan Napza mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan peyusunan kebijakan, koordinasi, pembinaan, fasilitasi, serta monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan kegiatan pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular, kesehatan jiwa dan napza. Uraian tugas Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit tidak Menular, Kesehatan Jiwa dan Napza meliputi :

- 1) mengelola administrasi dan menyusun program kerja Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit tidak Menular, Kesehatan Jiwa dan Napza;
- 2) melakukan dan menyiapkan bahan dan melakukan pembinaan pelaksanaan kegiatan Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit tidak Menular, Kesehatan Jiwa dan Napza;
- 3) melaksanakan kebijakan pada kegiatan Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit tidak Menular, Kesehatan Jiwa dan Napza;
- 4) melaksanakan kebijakan pada kegiatan Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit tidak Menular, Kesehatan Jiwa dan Napza;
- 5) melakukan pemantauan, evaluasi, dan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan pembinaan dan bimbingan teknis Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit tidak Menular, Kesehatan Jiwa dan Napza;
- 6) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Pimpinan; dan

- 7) melaksanakan penyiapan bahan dan data serta menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit tidak Menular, Kesehatan Jiwa dan Napza.

## **5. Bidang Pelayanan Kesehatan**

Bidang Pelayanan Kesehatan mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan, pembinaan, koordinasi, fasilitasi, evaluasi serta pelaporan terhadap penyelenggaraan fungsi pelayanan kesehatan primer, pelayanan kesehatan rujukan dan jaminan kesehatan serta kesehatan tradisional dan pelayanan transfusi darah. Dalam menyelenggarakan tugasnya, Bidang Pelayanan Kesehatan mempunyai fungsi:

- 1) perumusan kebijakan teknis bidang pelayanan kesehatan primer, pelayanan kesehatan rujukan, dan kesehatan tradisional dan pelayanan transfusi darah;
- 2) pelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan kesehatan primer, pelayanan kesehatan rujukan, dan kesehatan tradisional dan pelayanan transfusi darah;
- 3) pembinaan/bimbingan teknis di bidang pelayanan kesehatan primer, pelayanan kesehatan rujukan, dan kesehatan tradisional dan pelayanan transfusi darah;
- 4) pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan tugas di bidang pelayanan kesehatan primer, pelayanan kesehatan rujukan, dan kesehatan tradisional dan pelayanan transfusi darah;
- 5) pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
- 6) penyiapan bahan dan data serta menyusun dan menyampaikan bahan laporan pelaksanaan tugas Bidang Pelayanan Kesehatan.

### **a. Seksi Pelayanan Kesehatan Primer**

Seksi Pelayanan Kesehatan Primer mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, koordinasi, pembinaan, fasilitasi, serta monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan kegiatan pelayanan kesehatan primer. Uraian tugas Seksi Pelayanan Kesehatan Primer meliputi :

- 1) mengelola administrasi dan menyusun program kerja Seksi Pelayanan Kesehatan Primer;
- 2) melakukan dan menyiapkan bahan dan melakukan pembinaan pelaksanaan kegiatan Seksi Pelayanan Kesehatan Primer dengan unit kerja terkait;
- 3) melakukan pembinaan kegiatan pelayanan kesehatan primer;
- 4) melakukan pemantauan dan pembinaan mutu fasilitas pelayanan kesehatan primer;
- 5) melaksanakan kebijakan pada kegiatan Seksi Pelayanan Kesehatan Primer;
- 6) melaksanakan bimbingan dan pengendalian upaya kesehatan pada Daerah perbatasan, terpencil, rawan dan kepulauan skala Provinsi;
- 7) melakukan pemantauan, evaluasi, dan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan pembinaan dan bimbingan teknis di lingkungan Seksi Pelayanan Kesehatan Primer;
- 8) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Pimpinan; dan
- 9) melaksanakan penyiapan bahan dan data serta menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Seksi Pelayanan Kesehatan Primer.

**b. Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan**

Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, koordinasi, pembinaan, fasilitasi, serta monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan kegiatan pelayanan kesehatan rujukan, pelayanan kesehatan pada situasi tertentu serta penyelenggaraan jaminan kesehatan masyarakat dan pembiayaan kesehatan. Uraian tugas Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan meliputi :

- 1) mengelola administrasi dan menyusun program kerja Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan dan Jaminan Kesehatan;
- 2) melakukan koordinasi dan menyiapkan bahan pembinaan pelayanan kesehatan rujukan, pelayanan kesehatan pada situasi tertentu, jaminan kesehatan dan pembiayaan kesehatan dengan unit kerja terkait;
- 3) melaksanakan pembinaan mutu pelayanan kesehatan rujukan;
- 4) memfasilitasi mutu layanan kesehatan rujukan;

- 5) melaksanakan sistem informasi kesehatan rujukan;
- 6) mengelola/menyelenggarakan bimbingan, pengendalian jaminan pemeliharaan kesehatan skala Provinsi;
- 7) melaksanakan pembimbingan dan pengendalian jaminan pemeliharaan kesehatan Nasional (tugas pembantuan);
- 8) melakukan pembinaan teknis pelaksanaan jaminan pemeliharaan kesehatan dan pengembangan sistem pembiayaan kesehatan di Kabupaten/Kota;
- 9) mengevaluasi kegiatan pelayanan kesehatan rujukan;
- 10) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Pimpinan; dan
- 11) melaksanakan penyiapan bahan dan data serta menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan.

#### **6. Bidang Kefarmasian, Alat Kesehatan dan Sumber Daya Manusia Kesehatan**

Bidang Kefarmasian, Alat Kesehatan dan Sumber Daya Manusia Kesehatan mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan, pembinaan, koordinasi, fasilitasi, evaluasi serta pelaporan terhadap penyelenggaraan fungsi kefarmasian, alat kesehatan, perbekalan kesehatan rumah tangga, dan sumber daya manusia kesehatan. Dalam menyelenggarakan tugasnya, Bidang Pelayanan Kesehatan mempunyai fungsi:

- 1) perumusan kebijakan teknis bidang kefarmasian, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga, dan sumber daya manusia kesehatan;
- 2) pelaksanaan kebijakan di bidang kefarmasian, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga, dan sumber daya manusia kesehatan;
- 3) pembinaan/bimbingan teknis di bidang kefarmasian, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga, dan sumber daya manusia kesehatan;
- 4) pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan tugas di bidang kefarmasian, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga, dan sumber daya manusia kesehatan;

- 5) pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
- 6) penyiapan bahan dan data serta menyusun dan menyampaikan bahan laporan pelaksanaan tugas Bidang Kefarmasian, Alat Kesehatan dan Sumber Daya Manusia Kesehatan.

**a. Seksi Kefarmasian**

Seksi Kefarmasian mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan peyusunan kebijakan, koordinasi, pembinaan, fasilitasi, serta monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan kegiatan kefarmasian. Uraian tugas Seksi Kefarmasian meliputi :

- 1) mengelola administrasi dan menyusun program kerja Seksi Kefarmasian;
- 2) melakukan analisis koordinasi penyusunan perencanaan kebutuhan obat publik, reagensia dan vaksin lainnya serta analisis kebutuhan buffer stock obat Provinsi, reagensia dan vaksin lainnya skala Provinsi;
- 3) melakukan monitoring, evaluasi, bimbingan teknis, dan pelaporan kebutuhan obat publik, reagenisa dan vaksin skala Provinsi;
- 4) melakukan sertifikasi sarana produksi dan distribusi alat kesehatan;
- 5) memfasilitasi pemberian rekomendasi izin industri komoditi kesehatan, Pedagang Besar Farmasi, Pedagang Besar Farmasi Cabang, Industri Obat Tradisional, Industri Ekstrak Bahan Alam, Usaha Kecil Obat Tradisional, Penyalur Alat Kesehatan dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan;
- 6) melaksanakan sistem informasi kefarmasian;
- 7) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Pimpinan; dan
- 8) melaksanakan penyiapan bahan dan data serta menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Seksi Kefarmasian.

**b. Seksi Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga**

Seksi Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan peyusunan kebijakan, koordinasi, pembinaan, fasilitasi, serta monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan bidang alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga. Uraian tugas Seksi Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga meliputi :

- 1) mengelola administrasi dan menyusun program kerja Seksi Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga;
- 2) melakukan koordinasi dan menyiapkan bahan Seksi Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga dengan unit kerja terkait;
- 3) melaksanakan rencana kegiatan teknis operasional Seksi Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga;
- 4) mengevaluasi hasil kegiatan Seksi Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga;
- 5) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Pimpinan; dan
- 6) melaksanakan penyiapan bahan dan data serta menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Seksi Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga.

### **1.3 Isu – Isu Strategis**

Dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah, tidak dapat terlepas dari berbagai isu penting dan strategis yang berkembang baik pada tatanan pemerintah Pusat maupun tatanan Daerah.

Isu - isu pokok dan atau strategis tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Meningkatnya Angka Harapan Hidup
- 2) Masih tingginya Angka Kematian Ibu (AKI)
- 3) Masih tingginya Prevalensi Stunting
- 4) Penderita TBC 100% mendapat pengobatan sesuai standar

Selanjutnya Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah memandang perlu untuk melakukan langkah - langkah responsif terhadap isu - isu tersebut, selain memperhatikan arah kebijakan pembangunan secara umum. Implementasi dari responsif tersebut selanjutnya dituangkan dalam Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah periode 2021 - 2026.

### **1.4 Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2025**

Berdasarkan rekomendasi yang diberikan dalam evaluasi SAKIP 2025, berikut adalah tindak lanjut yang telah dan akan dilakukan:

NO.	Rekomendasi / Catatan LHE AKIP 2025	Rencana Tindak Lanjut	Progres Pelaksanaan	Kendala Pelaksanaan Tindak Lanjut	Bukti Dukung (Link Data)
1	Menyelaraskan kembali isu-isu strategis yang ada dalam dokumen perencanaan.	Isu strategis dalam Renstra tersebut tidak perlu disesuaikan lagi, karena: Dokumen tersebut sudah tidak menjadi acuan perencanaan aktif tetapi mengacu kepada RPJMD 2025-2030. Perubahan atau dinamika terbaru sebaiknya dimasukkan ke dalam Renstra periode selanjutnya (Renstra baru). Menyelaraskan isu strategis dalam dokumen yang sudah tidak berlaku tidak berdampak langsung terhadap pelaksanaan program dan anggaran ke depan.	Dokumen tersebut sudah tidak menjadi acuan perencanaan aktif.	Dokumen tersebut sudah tidak menjadi acuan perencanaan aktif.	Dokumen tersebut sudah tidak menjadi acuan perencanaan aktif.
2	Menyelaraskan sasaran pada dokumen perencanaan sehingga tidak terdapat perbedaan sasaran dalam dokumen perencanaan.	Sasaran dalam pada dokumen perencanaan tersebut tidak perlu disesuaikan lagi, karena: Dokumen tersebut sudah tidak menjadi acuan perencanaan aktif RPJMD 2025-2030.. Perubahan atau dinamika terbaru sebaiknya dimasukkan ke dalam Renstra periode selanjutnya (Renstra baru). Menyelaraskan sasaran dalam dokumen yang sudah tidak berlaku tidak berdampak langsung terhadap pelaksanaan program dan anggaran ke depan.	Dokumen tersebut sudah tidak menjadi acuan perencanaan aktif.	Dokumen tersebut sudah tidak menjadi acuan perencanaan aktif.	Dokumen tersebut sudah tidak menjadi acuan perencanaan aktif.
3	Memiliki dokumen pendukung yaitu Berita acara tentang perubahan target.	Membuat berita acara perubahan Target Renstra Dinas Kesehatan provinsi Sulawesi Tengah	Finalisasi Dokumen Perubahan Target Renstra, Membuat dokumen perubahan target Renstra berdasarkan berita acara yang telah disepakati. Membuat dokumen perubahan target Renstra berdasarkan berita acara yang telah disepakati.	Prosedur Administratif yang Kompleks Perubahan Renstra harus melalui proses formal (misalnya persetujuan pimpinan dan banyaknya tahapan birokrasi yang harus dilalui	<a href="https://drive.google.com/file/d/1VvxzDHxkS5ftKaKG7LLYSWGRFJSAwFMz/view?usp=drive_link">https://drive.google.com/file/d/1VvxzDHxkS5ftKaKG7LLYSWGRFJSAwFMz/view?usp=drive_link</a>

				memperlambat proses.	
4	Membuat/Menyusun data kinerja melalui mekanisme yang terstruktur sehingga dapat membangun data base kinerja.	Membuat/Menyusun data kinerja melalui mekanisme yang terstruktur sehingga dapat membangun data base kinerja.	Finalisasi penyusunan data kinerja melalui mekanisme yang terstruktur sehingga dapat membangun data base kinerja.	Tidak ada kendala Dalam penyusunan data kinerja melalui mekanisme yang terstruktur karena dokumen SOP sudah tersedia	<a href="https://drive.google.com/file/d/1BsPhk8P-7QAHmmsMjg5IU8dPRL2I56O/view?usp=drive_link">https://drive.google.com/file/d/1BsPhk8P-7QAHmmsMjg5IU8dPRL2I56O/view?usp=drive_link</a>
5	Mendokumentasikan program/kegiatan setiap bidang dengan melakukan monitoring setiap triwulan untuk dapat melihat capaian kinerja secara berkala melalui BA Monev, Daftar Hadir, Notulen dan Dokumentasi kegiatan.	Melengkapi dokumen program/kegiatan setiap bidang	Melengkapi dokumen program/kegiatan setiap bidang yang meliputi BA Monev, Daftar Hadir, Notulen dan Dokumentasi kegiatan.	Tidak ada kendala Dalam Melengkapi dokumen program/kegiatan setiap bidang yang meliputi BA Monev, Daftar Hadir, Notulen dan Dokumentasi.	<a href="https://drive.google.com/file/d/1Cd6U8N4zQKkiz-hRWVP4DbH4wPIrbFL/view?usp=drive_link">https://drive.google.com/file/d/1Cd6U8N4zQKkiz-hRWVP4DbH4wPIrbFL/view?usp=drive_link</a>
6	Memberikan informasi tentang keterlibatan pimpinan dalam pengambilan keputusan. Strategi yang didukung dengan data dukung yaitu: Daftar hadir, Notulensi dan dokumentasi.	Melengkapi dokumen terkait informasi keterlibatan pimpinan dalam pengambilan keputusan.	Melengkapi dokumen terkait informasi keterlibatan pimpinan dalam pengambilan keputusan. Strategi yang didukung dengan data dukung yaitu: Daftar hadir, Notulensi dan dokumentasi.	Tidak ada kendala dalam melengkapi dokumen terkait informasi keterlibatan pimpinan dalam pengambilan keputusan. Strategi yang didukung dengan data dukung yaitu: Daftar hadir, Notulensi dan dokumentasi.	<a href="https://drive.google.com/file/d/12INqzYcaM37zsl47sA6vOV2kEbKZMue/view?usp=drive_link">https://drive.google.com/file/d/12INqzYcaM37zsl47sA6vOV2kEbKZMue/view?usp=drive_link</a>

7	Memastikan bahwa didalam Laporan Kinerja Dinas Kesehatan informasi yang memadai untuk perbaikan kinerja organisasi dalam pelaksanaan program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan capaian kinerja.	Mereview kembali Laporan Kinerja Dinas Kesehatan agar informasi yang memadai terhadap program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan capaian kinerja.	Melengkapi Laporan Kinerja Dinas Kesehatan agar informasi yang memadai terhadap program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan capaian kinerja.	Tidak ada kendala dalam Melengkapi Laporan Kinerja Dinas Kesehatan agar informasi yang memadai terhadap program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan capaian kinerja.	<a href="https://drive.google.com/file/d/1o5ZbYpl7zJdPcWbl-N0MjFI3tkdFQ4pt/view?usp=drive_link">https://drive.google.com/file/d/1o5ZbYpl7zJdPcWbl-N0MjFI3tkdFQ4pt/view?usp=drive_link</a>
8	Membuat laporan kinerja secara triwulan.	Menyusun Laporan Triwulan Rencana Aksi capaian kinerja	Melengkapi semua dokumen Laporan Triwulan Rencana Aksi capaian kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah	Dalam Melengkapi semua dokumen Laporan Triwulan Rencana Aksi capaian kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah tidak terdapat kendala karena semua data tersedia.	<a href="https://drive.google.com/file/d/1EdLLJ42G5mWlImRKxJ1CqIObBbWbCUuLU/view?usp=drive_link">https://drive.google.com/file/d/1EdLLJ42G5mWlImRKxJ1CqIObBbWbCUuLU/view?usp=drive_link</a>
9	Melakukan dan mendokumentasikan evaluasi atas pelaksanaan rencana aksi.	Menyusun Laporan triwulan rencana aksi capaian kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah	Melengkapian semua data yang dibutuhkan dalam Laporan triwulan rencana aksi capaian kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah	Kendala dalam menyusun Laporan triwulan rencana aksi capaian kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah adalah waktu yang sangat singkat dalam proses penyusunan.	<a href="https://drive.google.com/file/d/1Ek4Zlr-hXoheVxn3nElpoaAmwiV7fXYr/view?usp=drive_link">https://drive.google.com/file/d/1Ek4Zlr-hXoheVxn3nElpoaAmwiV7fXYr/view?usp=drive_link</a>

10	Melakukan pemantauan atas rencana aksi pertriwulan dan digunakan untuk mengendalikan kinerja dan menyusun alternative perbaikan	Menyusun Laporan triwulan rencana aksi capaian kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah	Melengkapi semua data yang dibutuhkan dalam Laporan triwulan rencana aksi capaian kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah	Kendala dalam menyusun Laporan triwulan rencana aksi capaian kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah adalah waktu yang sangat singkat dalam proses penyusunan.	<a href="https://drive.google.com/file/d/1Ek4Zlr-hXoheVxn3nElpoaAmwiV7fXYr/view?usp=drive_link">https://drive.google.com/file/d/1Ek4Zlr-hXoheVxn3nElpoaAmwiV7fXYr/view?usp=drive_link</a>
----	---	---	--	---	---



## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

#### **2.1 Renstra Perangkat Daerah**

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029 merupakan kondisi yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan dengan memperhatikan tugas dan fungsi, kelompok sasaran yang dilayani, tujuan organisasi, permasalahan dan isu-isu strategis pembangunan daerah. Dengan demikian, penentuan tujuan Renstra PD fokus dari tujuan pembangunan daerah dan menggambarkan kondisi pencapaian hasil (outcome) kinerja perangkat daerah yang terukur, spesifik, rasional dan dapat dicapai pada akhir periode perencanaan.

Sebagai upaya dalam rangka menghadapi permasalahan, isu-isu strategis, tantangan dan peluang perubahan yang akan terjadi sesuai tugas dan fungsi Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah sekaligus upaya mendukung untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Visi Gubernur Sulawesi Tengah berdasarkan RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029 yakni **“Berani mewujudkan Sulawesi Tengah sebagai Wilayah Pertanian dan Industri yang Maju dan Berkelanjutan Tahun 2025-2029”** dengan Misi yaitu :

1. Mewujudkan Masyarakat sehat, cerdas dan sejahtera melalui pemenuhan kebutuhan dasar dan penyediaan lapangan kerja.
2. Mewujudkan Masyarakat Bahagia dan produktif melalui peningkatan ekonomi berbasis potensi unggulan daerah dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang berkeadilan.
3. Mewujudkan Pembangunan berbasis lingkungan dan tata ruang yang berkelanjutan berorientasi pada konektivitas antar wilayah dan antar sektor.
4. Meningkatkan tata Kelola pemerintahan bersih, inovatif, kolaboratif serta kemanan daerah yang tanggung berlandaskan nilai religious dan kearifan local.

Keterkaitan Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah dengan Misi Provinsi Sulawesi Tengah adalah yang mengacu pada **Misi ke 1** yaitu

**“Mewujudkan Masyarakat sehat, cerdas dan sejahtera melalui pemenuhan kebutuhan dasar dan penyediaan lapangan kerja.”**

Adapun tujuan strategis Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah yang disusun sebagai bentuk review terhadap sasaran RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah, yaitu **“Mewujudkan kualitas manusia Provinsi Sulawesi Tengah yang sehat dan cerdas.”** Sedangkan sasaran strategis jangka menengah Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah adalah **“Meningkatnya kualitas derajat Kesehatan Masyarakat.”**

Pencapaian sasaran pembangunan nasional tahun 2025 – 2029 merupakan manifestasi dari penguatan transformasi menuju Indonesia Emas 2045. Prioritas pembangunan yang terukur dan tersinergi dengan baik, strategi pembangunan wilayah yang konkret, serta tata kelola dan pengendalian pelaksanaan pembangunan yang kuat menjadi daya ungkit RPJMN Tahun 2025-2029 dalam mencapai sasaran pembangunan. Strategi prioritas pembangunan nasional dalam pencapaian sasaran pembangunan terdiri dari 3 strategi utama pembangunan nasional (Trisula RPJMN 2025- 2029) yaitu penurunan kemiskinan, peningkatan kualitas SDM dan pertumbuhan ekonomi tinggi dan berkelanjutan. Khusus untuk kesehatan ada pada Strategi Peningkatan Indeks Modal Manusia (IMM) yaitu :

1. Pencegahan stunting terutama pada 1000 HPK;
2. Pencegahan dan deteksi dini penyakit serta pembudayaan hidup sehat;
3. Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan;

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari tujuan tersebut yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu lima (tahun). Adapun sasaran Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah adalah sebagai berikut ;

1. Menurunnya angka kematian ibu
2. Menurunnya revalensi stunting

Tujuan, sasaran, indikator kinerja serta target yang akan dicapai oleh Dinas Kesehatan disajikan dalam Tabel berikut ini;

**Tabel**  
**Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Kesehatan**

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	Baseline 2024	TARGET TAHUNAN						Ket.
						2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	5	4		6	7	8	9	10	11	12
NSPK : UU Kesehatan No.17 tahun 2023, Peraturan Gubernur No.6 Tahun 2024												
Mewujudkan kualitas manusia Provinsi Sulawesi Tengah yang sehat	Meningkatnya kualitas derajat kesehatan masyarakat		<b>Usia Harapan Hidup</b>	Tahun	70.84	71.64	71.96	72.27	72.59	72.96	73.22	
		<b>Menurunnya angka kematian ibu</b>	Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup)	Angka	264	176	161	146	131	116	101	
		<b>Menurunnya prevalensi stunting</b>	Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) pada balita	%	26.1	24.9	22.5	21.2	19.8	18.5	17.9	

Strategi pembangunan daerah menempati posisi strategis sebagai penghubung antara visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan dengan strategi serta program kerja daerah. Strategi merupakan rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah-langkah/upaya yang akan dilakukan diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, penahapan pembangunan, lokus dan penentuan program prioritas dalam menghadapi lingkungan dinamis untuk mencapai tujuan/sasaran Renstra PD. Strategi Dinas Kesehatan disusun dengan menyelaraskannya dengan strategi pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah daerah. Penahapan pembangunan dimaksud adalah prioritas pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran kepala daerah. Pentahapan pembangunan Renstra PD Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029 disajikan pada tabel berikut ini:

**Tabel Penahapan Renstra Dinas Kesehatan  
Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029**

STRATEGI				
Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
<b>Tujuan: Mewujudkan Kualitas Masyarakat Sulawesi Tengah yang berdaya saing</b>				
<b>Sasaran: Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat</b>				
Promosikan perilaku hidup sehat dan lingkungan sehat	Pelatihan tenaga medis dan penguatan sistem informasi kesehatan	Implementasi layanan kesehatan digital (telemedisin) di daerah minim SDM	Implementasi layanan kesehatan digital (telemedisin) di daerah minim SDM; Penguatan layanan kesehatan primer, rujukan dan lansia	Replikasi sistem layanan digital ke seluruh kabupaten/kota
Pemetaan wilayah prioritas AKI dan Stunting, penguatan posyandu, distribusi suplemen gizi	Peningkatan kompetensi tenaga kesehatan dalam layanan PONEK dan cakupan PMT; Pemenuhan sarpras PONEK dan PONEK	Pemenuhan sarpras PONEK dan PONEK; Perluasan cakupan layanan dan kunjungan rumah	Perluasan cakupan layanan dan kunjungan rumah	Integrasi layanan kesehatan ibu-anak dalam sistem layanan dasar desa
Penyusunan pedoman skrining PTM dan edukasi gaya hidup yang sehat, penyediaan alat diagnostik	Penguatan deteksi dini dan layanan penanganan PTM di Puskesmas; Skrining PTM dasar di posyandu, sekolah dan tempat kerja; pengembangan sistem rujukan PTM	Perluasan deteksi dini dan layanan penanganan PTM di Puskesmas; Skrining PTM dasar di posyandu, sekolah dan tempat kerja; Skrining PTM dasar di posyandu, sekolah dan tempat kerja	Perluasan deteksi dini dan layanan penanganan PTM di Puskesmas; Skrining PTM dasar di posyandu, sekolah dan tempat kerja; Skrining PTM dasar di posyandu, sekolah dan tempat kerja	Integrasi pengendalian PTM ke dalam layanan primer dan pendidikan masyarakat

Analisis situasi Kasus TBC , Pembuatan Rencana Aksi Daerah TBC, Melaksanakan intensifikasi skrining TBC (program CKG /ILP) dan penemuan aktif TBC melalui Investigasi Kontak	Memperluas skrining TBC (program CKG /ILP) dan penemuan aktif TBC melalui Investigasi Kontak, perluasan fasyankes klinik pemerintah dan swasta dalam tata laksana TBC.	Memperluas skrining TBC (program CKG /ILP) dan peningkatan penemuan aktif TBC melalui Investigasi Kontak terintegrasi TPT, Memastikan kualitas layanan TB Resisten Obat melalui audit klinis, perluasan fasyankes klinik pemerintah dan swasta dalam tata laksana TBC, memepkuat jejaring layanan TBC di Fasyankes baik internal maupun eksterbal, memperkuat surveilans TBC di SITB melalui validasi data fasyankes pelaksanaan labkes provinsi menjadi lab kultur	Memperluas skrining TBC (program CKG /ILP) dan peningkatan penemuan aktif TBC melalui Investigasi Kontak terintegrasi TPT, Audit klinis TB Resisten Obat secara rutin , Perluasan Pemberian Terapi Pencegahan Tuberkulosis pada kontak serumah pasien bakteriologis dan klinis, perluasan fasyankes klinik pemerintah dan swasta dalam tata laksana TBC, memperkuat jejaring layanan TBC di Fasyankes baik internal maupun eksterbal, memperkuat surveilans TBC di SITB melalui validasi data fasyankes	Memperkuat jejaring layanan TBC di Fasyankes baik internal maupun eksterbal, memperkuat surveilans TBC di SITB melalui validasi data fasyankes pengembangan labkes provinsi menjadi lab kultur dan uji kepekaan
Pemetaan area risiko schistosomiasis	Peningkatan promosi kesehatan dan perubahan perilaku masyarakat;Penguatan surveilans schistosomiasis; Pengobatan massal di desa endemis	Peningkatan promosi kesehatan dan perubahan perilaku masyarakat;Penguatan surveilans schistosomiasis; Pengobatan massal di desa endemis	Peningkatan promosi kesehatan dan perubahan perilaku masyarakat;Penguatan surveilans schistosomiasis; Pengobatan massal di desa endemis	Penguatan kerja sama lintas sektor (KLHK, BKSDA, pertanian, pendidikan, pemerintah desa)
Peningkatan sosialisasi dan edukasi manfaat JKN kepada masyarakat	Penguatan pembiayaan JKN bagi penduduk miskin dan rentan melalui APBD (Jamkesda)	Optimalisasi integrasi pendataan DTKS dengan BPJS kesehatan	Optimalisasi integrasi pendataan DTKS dengan BPJS kesehatan	Penguatan kolaborasi dengan BPJS Kesehatan dan Dinsos untuk validasi data
Penyediaan dan peningkatan sarana, prasarana, fasilitas kesehatan, dan sumber daya kesehatan	Penyediaan dan peningkatan sarana, prasarana, fasilitas kesehatan, dan sumber daya kesehatan	Penyediaan dan peningkatan sarana, prasarana, fasilitas kesehatan, dan sumber daya kesehatan	Penyediaan dan peningkatan sarana, prasarana, fasilitas kesehatan, dan sumber daya kesehatan	Penyediaan dan peningkatan sarana, prasarana, fasilitas kesehatan, dan sumber daya kesehatan

Arah Kebijakan Renstra PD Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029 yang merupakan operasional NSPK sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan dan arah kebijakan RPJMD Tahun 2025-2029 serta selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran Renstra PD. Arah kebijakan Renstra PD Dinas Kesehatan Tahun 2025-2029 untuk masing-masing disajikan pada tabel berikut ini:

**Tabel Arah Kebijakan Renstra  
Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah**

No.	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Undang-Undang No.17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang mengatur berbagai aspek terkait kesehatan termasuk upaya kesehatan, fasilitas pelayanan kesehatan, sumber daya manusia kesehatan, perbekalan kesehatan dan lainnya	Peningkatan layanan kesehatan ibu dan anak terpadu berbasis keluarga	Implementasi program kesehatan ibu dan anak berbasis keluarga seperti Kelas Ibu Hamil, Kelas Balita, dan konseling gizi keluarga.	
2		Pembudayaan perilaku hidup sehat melalui Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas)	Penguatan pelaksanaan Germas secara terpadu lintas sektor di tingkat desa/kelurahan, kecamatan, dan kabupaten/kota	
3		Penguatan deteksi dini penyakit tidak menular dan integrasi layanan kesehatan digital (telemedis)	Penguatan system pelayanan kesehatan terpadu berbasis digital yang mendukung deteksi dini penyakit tidak menular dan pemanfaatan teknologi dalam system farmasi.	
4		Eliminasi penyakit endemik Schistosomiasis di Kabupaten Sigi dan Kabupaten Poso	Penguatan diagnosis dini dan pengobatan massal berkala di daerah endemis sesuai standar Kementerian Kesehatan	
5		Peningkatan pelayanan kesehatan dan gizi bagi usia sekolah, usia produktif, dan lansia;	Peningkatan kapasitas tenaga kesehatan dalam pelayanan usia sekolah, produktif dan lansia	
6		Pemenuhan sarana, prasarana dan alat kesehatan sesuai standar serta peningkatan kualitas pelayanan di puskesmas dan rumah sakit daerah	Penguatan sistem manajemen dan pemeliharaan fasilitas kesehatan	
7		Peningkatan jumlah tenaga kesehatan di fasilitas layanan kesehatan primer	Pemetaan kebutuhan tenaga kesehatan berdasarkan standar pelayanan minimal (SPM) dan standar akreditasi	
8		Pembangunan dan penguatan pusat kesehatan di daerah terpencil	Pembangunan fasilitas kesehatan yang memadai dengan standar pelayanan minimal	

## 2.2 Struktur Program dan Kegiatan Tahun 2025

Struktur Program dan kegiatan Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah.

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU APBD 2025	PAGU APBD 2025 PERUBAHAN SETELAH EFISIENSI	Bertambah/ Berkurang
1	2	3	4	
	<b>DINAS KESEHATAN</b>	<b>247,572,525,408</b>	<b>258,348,477,016</b>	<b>Bertambah</b>
<b>1</b>	<b>SEKRETARIAT</b>	<b>192,197,238,939</b>	<b>174,496,903,959</b>	<b>Berkurang</b>
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	191,622,239,149	174,208,791,552	<b>Berkurang</b>
<b>1</b>	<b>Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>1,108,644,000</b>	<b>523,716,500</b>	<b>Berkurang</b>
	1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	698,644,000	325,053,000	<b>Berkurang</b>
	2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	410,000,000	198,663,500	<b>Berkurang</b>
<b>2</b>	<b>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>181,274,159,888</b>	<b>168,552,258,443</b>	<b>Berkurang</b>
	1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	176,437,473,388	163,907,023,990	<b>Berkurang</b>
	2 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	4,402,680,000	4,382,769,653	<b>Berkurang</b>
	3 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	238,974,500	152,249,800	<b>Berkurang</b>
	4 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKP	135,146,000	76,775,000	<b>Berkurang</b>
	5 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	59,886,000	33,440,000	<b>Berkurang</b>

<b>3</b>	<b>Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>215,994,500</b>	<b>111,172,000</b>	<b>Berkurang</b>
1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	101,672,500	38,605,000	<b>Berkurang</b>
2	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	114,322,000	72,567,000	<b>Berkurang</b>
<b>4</b>	<b>Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>532,524,500</b>	<b>177,525,000</b>	<b>Berkurang</b>
1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	199,996,500		
2	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	150,098,000	75,040,000	<b>Berkurang</b>
3	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	182,430,000	102,485,000	<b>Berkurang</b>
<b>5</b>	<b>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>563,298,500</b>	<b>526,648,875</b>	<b>Berkurang</b>
1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	563,298,500	526,648,875	<b>Berkurang</b>
<b>6</b>	<b>Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>3,789,217,284</b>	<b>876,423,370</b>	<b>Berkurang</b>
1	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	2,535,800,000	712,303,350	<b>Berkurang</b>
2	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	199,997,004		
3	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1,053,420,280	164,120,020	<b>Berkurang</b>
<b>7</b>	<b>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>2,539,207,500</b>	<b>2,288,810,800</b>	<b>Berkurang</b>
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1,035,472,000	833,642,800	<b>Berkurang</b>
2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1,503,735,500	1,455,168,000	<b>Berkurang</b>
<b>8</b>	<b>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>1,599,192,977</b>	<b>1,152,236,564</b>	<b>Berkurang</b>

	1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	534,800,000	372,640,000	<b>Berkurang</b>
	2 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	900,142,977	635,386,564	<b>Berkurang</b>
	3 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	164,250,000	144,210,000	<b>Berkurang</b>
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	574,999,790	288,112,407	<b>Berkurang</b>
	<b>1 Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi</b>	<b>200,000,000</b>	<b>99,960,000</b>	<b>Berkurang</b>
	1 Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Lintas Kabupaten/Kota	200,000,000	99,960,000	<b>Berkurang</b>
	<b>2 Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi</b>	<b>374,999,790</b>	<b>188,152,407</b>	<b>Berkurang</b>
	1 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	374,999,790	188,152,407	<b>Berkurang</b>
	<b>2 BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT</b>	<b>3,438,210,635</b>	<b>3,560,202,643</b>	<b>Bertambah</b>
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	2,838,210,335	3,138,237,943	<b>Bertambah</b>
	<b>1 Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi</b>	<b>2,838,210,335</b>	<b>3,138,237,943</b>	<b>Bertambah</b>
	1 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	613,170,800	403,311,000	<b>Berkurang</b>
	2 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif	249,999,850	124,999,900	<b>Berkurang</b>
	3 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut	159,999,950	79,999,850	<b>Berkurang</b>

	4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	899,987,135	1,897,578,743	Berkurang
	5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	149,998,750	80,995,600	Berkurang
	6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	465,054,000	361,462,700	Berkurang
	7	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	150,000,200	75,000,150	Berkurang
	8	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	149,999,650	114,890,000	Berkurang
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	600,000,300	421,964,700	Berkurang
	<b>1</b>	<b>Kegiatan Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi</b>	<b>300,000,250</b>	<b>194,840,800</b>	Berkurang
	1	Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	300,000,250	194,840,800	Berkurang
	<b>2</b>	<b>Kegiatan Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam Rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi</b>	<b>150,000,050</b>	<b>137,857,700</b>	Berkurang
	1	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	150,000,050	137,857,700	Berkurang
	<b>3</b>	<b>Kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Provinsi</b>	<b>150,000,000</b>	<b>89,266,200</b>	Berkurang
	1	Bimbingan Teknis dan Supervisi UKBM	150,000,000	89,266,200	Berkurang
<b>3</b>		<b>BIDANG PELAYANAN KESEHATAN</b>	<b>42,549,998,300</b>	<b>71,271,260,000</b>	Bertambah
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	42,549,998,300	71,271,260,000	Bertambah

	<b>1 Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi</b>	<b>42,399,998,450</b>	<b>71,192,897,000</b>	<b>Bertambah</b>
	1 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	149,999,750	77,329,450	<b>Berkurang</b>
	2 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	40,149,999,800	69,309,013,950	<b>Bertambah</b>
	3 Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	1,799,999,850	1,656,611,100	<b>Berkurang</b>
	4 Verifikasi dan Penilaian Kelayakan Puskesmas untuk Registrasi Puskesmas	149,999,300	74,983,200	<b>Berkurang</b>
	5 Pengelolaan Rujukan dan Rujuk Balik	149,999,750	74,959,300	<b>Berkurang</b>
	<b>2 Kegiatan Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi</b>	<b>149,999,850</b>	<b>78,363,000</b>	<b>Berkurang</b>
	1 Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	149,999,850	78,363,000	<b>Berkurang</b>
<b>4</b>	<b>BIDANG KEFARMASIAN, SARANA ALAT KESEHATAN DAN SDM KESEHATAN</b>	<b>5,037,502,152</b>	<b>4,357,903,752</b>	<b>Berkurang</b>
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	3,777,404,000	3,702,404,000	<b>Berkurang</b>
	<b>1 Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi</b>	<b>3,777,404,000</b>	<b>3,702,404,000</b>	<b>Berkurang</b>
	1 Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman Serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	375,127,072	300,127,072	<b>Berkurang</b>
	2 Pengadaan Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	3,402,276,928	3,402,276,928	<b>Berkurang</b>
	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	659,999,919	356,945,669	<b>Berkurang</b>

	<b>1 Kegiatan Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK)</b>	<b>659,999,919</b>	<b>356,945,669</b>	<b>Berkurang</b>
	1 Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Penerbitan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang Pak	659,999,919	356,945,669	<b>Berkurang</b>
	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	600,098,233	298,554,083	<b>Berkurang</b>
	<b>1 Kegiatan Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi</b>	<b>300,051,400</b>	<b>150,026,450</b>	<b>Berkurang</b>
	1 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan	150,000,600	75,000,650	<b>Berkurang</b>
	2 Distribusi dan Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	150,050,800	75,025,800	<b>Berkurang</b>
	<b>2 Kegiatan Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi</b>	<b>300,046,833</b>	<b>148,527,633</b>	<b>Berkurang</b>
	1 Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	150,046,600	75,671,600	<b>Berkurang</b>
	2 Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	150,000,233	72,856,033	<b>Berkurang</b>
<b>5</b>	<b>BIDANG PENGENDALIAN DAN PENCEGAHAN PENYAKIT, SURVEILANS DAN IMUNISASI</b>	<b>4,349,575,382</b>	<b>4,662,206,662</b>	<b>Bertambah</b>
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	4,349,575,382	4,662,206,662	<b>Bertambah</b>
	<b>1 Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi</b>	<b>4,349,575,382</b>	<b>4,662,206,662</b>	<b>Bertambah</b>
	1 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	618,815,000	399,055,000	<b>Berkurang</b>

	2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	2,807,437,432	3,231,252,462	<b>Bertambah</b>
	3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	235,482,950	285,262,950	<b>Berkurang</b>
	4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Kecanduan NAPZA	100,000,000	49,628,750	<b>Berkurang</b>
	5	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	300,000,000	209,216,000	<b>Berkurang</b>
	6	Investigasi Lanjutan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal oleh Kabupaten/Kota	287,840,000	487,791,500	<b>Bertambah</b>
	<b>UPT LABORATORIUM KESEHATAN</b>		<b>1,730,032,300</b>	<b>3,496,106,300</b>	<b>Bertambah</b>
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		659,365,500	1,730,441,000	<b>Bertambah</b>
	<b>1</b>	<b>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>42,600,000</b>	<b>173,076,000</b>	<b>Bertambah</b>
	1	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	42,600,000	173,076,000	<b>Bertambah</b>
	<b>2</b>	<b>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>41,240,000</b>	<b>29,580,000</b>	<b>Berkurang</b>
	1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	41,240,000	29,580,000	<b>Berkurang</b>
	<b>3</b>	<b>Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>78,406,000</b>	<b>579,000,000</b>	<b>Berkurang</b>
	2	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	78,406,000	579,000,000	<b>Berkurang</b>
	<b>4</b>	<b>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>349,175,000</b>	<b>399,175,000</b>	<b>Bertambah</b>
	1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	349,175,000	399,175,000	<b>Bertambah</b>
	<b>5</b>	<b>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>147,944,500</b>	<b>549,610,000</b>	<b>Berkurang</b>

	1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	39,000,000	34,000,000	Berkurang
	2 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	30,000,000		
	3 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	78,944,500	515,610,000	Berkurang
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1,070,666,800	1,765,665,300	Bertambah
	<b>1 Kegiatan Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi</b>	<b>1,070,666,800</b>	<b>1,765,665,300</b>	<b>Bertambah</b>
	1 Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	1,070,666,800	1,765,665,300	Bertambah
	<b>UPT BADAN PENDIDIKAN PELATIHAN KESEHATAN</b>	<b>1,125,019,981</b>	<b>885,503,267</b>	<b>Berkurang</b>
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	913,674,024	790,963,267	Berkurang
	<b>1 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>26,640,000</b>	<b>64,560,000</b>	<b>Bertambah</b>
	1 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	26,640,000	64,560,000	Bertambah
	<b>2 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>66,572,150</b>	<b>78,240,390</b>	<b>Bertambah</b>
	1 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	66,572,150	78,240,390	Bertambah
	<b>3 Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>22,500,000</b>	<b>30,834,500</b>	<b>Bertambah</b>
	1 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	22,500,000	30,834,500	Bertambah
	<b>4 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>394,999,089</b>	<b>287,366,158</b>	<b>Berkurang</b>
	1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	394,999,089	287,366,158	Berkurang

	<b>5 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>402,962,785</b>	<b>329,962,219</b>	<b>Berkurang</b>
	1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	33,770,000	76,970,000	<b>Bertambah</b>
	2 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	248,672,785	194,312,219	<b>Berkurang</b>
	3 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	120,520,000	58,680,000	<b>Berkurang</b>
	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	211,345,957	94,540,000	<b>Berkurang</b>
	<b>1 Kegiatan Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi</b>	<b>211,345,957</b>	<b>94,540,000</b>	<b>Berkurang</b>
	1 Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	211,345,957	94,540,000	<b>Berkurang</b>
	<b>UPT PUSAT PELAYANAN KESELAMATAN TERPADU</b>	<b>749,999,700</b>	<b>811,034,760</b>	<b>Bertambah</b>
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	232,395,450	216,556,350	<b>Berkurang</b>
	<b>1 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>45,240,000</b>	<b>38,760,000</b>	<b>Berkurang</b>
	1 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	45,240,000	38,760,000	<b>Berkurang</b>
	<b>2 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>92,176,700</b>	<b>90,103,400</b>	<b>Berkurang</b>
	1 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	92,176,700	90,103,400	<b>Berkurang</b>
	<b>3 Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	-	-	
	1 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			

	<b>4 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>3,998,750</b>	<b>2,112,950</b>	<b>Berkurang</b>
	1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	3,998,750	2,112,950	<b>Berkurang</b>
	<b>5 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>90,980,000</b>	<b>85,580,000</b>	<b>Berkurang</b>
	1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	68,000,000	68,000,000	
	2 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	22,980,000	17,580,000	<b>Berkurang</b>
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	517,604,250	594,478,410	<b>Bertambah</b>
	<b>1 Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi</b>	<b>517,604,250</b>	<b>594,478,410</b>	<b>Bertambah</b>
	1 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/Berpotensi Bencana	99,247,450	51,254,850	<b>Berkurang</b>
	2 Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	250,000,000	458,771,260	<b>Bertambah</b>
	3 Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan	168,356,800	84,452,300	<b>Berkurang</b>
	<b>JUMLAH ANGGARAN DINAS KESEHATAN</b>	<b>251,177,577,389</b>	<b>263,541,121,342</b>	<b>Bertambah</b>
	<b>UPT RUMAH SAKIT UMUM DAERAH UNDATA</b>	<b>184,158,685,143</b>	<b>245,629,336,699</b>	<b>Bertambah</b>
	1 APBD	14,000,000,000	35,298,452,105	<b>Bertambah</b>

	2 BLUD	170,158,685,143	210,330,884,594	Bertambah
	<b>UPT RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MADANI</b>	<b>107,900,000,000</b>	<b>113,719,679,827</b>	Bertambah
	1 APBD	7,900,000,000	8,769,553,093	Bertambah
	2 BLUD	100,000,000,000	104,950,126,734	Bertambah
	<b>TOTAL ANGGARAN KESEHATAN</b>	<b>543,236,262,532</b>	<b>622,890,137,869</b>	Bertambah

### 2.3 Indikator Kinerja Utama

Berdasarkan IKU tahun 2025 terdapat 1 (Satu) Indikator Utama yaitu Usia Harapan Hidup. Setelah RPJMD dan Renstra tahun 2025-2029 terbaru terbit maka IKU mengikuti RPJMD dan Renstra terbaru, sehingga Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Dinas Kesehatan pada tahun 2025 berubah, perubahn IKU tersebut dapat dilihat pada Tabel berikut ;

**Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kesehatan Tahun 2025**

<b>SASARAN/ KINERJA UTAMA</b>	<b>INDIKATOR KINERJA UTAMA</b>	<b>TARGET</b>	<b>CAPAIAN 2025</b>	<b>PENJELASAN FORMULASI PERHITUNGAN</b>
Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	1. Usia Harapan Hidup	71.64	71.10	Rata-rata jumlah tahun kehidupan yang masih dijalani oleh seseorang yang telah berhasil mencapai umur tertentu
	2. Angka Kematian Ibu	176	131,95	Jumlah kematian ibu karena kehamilan, persalinan, dan masa nifas Jumlah kelahiran hidup pada tahun yang sama x 100.000
	3. Prevalensi Stunting	24.9	10,2	Jumlah Balita Stunting Total balita yang diukurJumlah balita stunting x100%

Indikator Umur Harapan Hidup (UHH) merupakan salah satu ukuran penting dalam menilai derajat kesehatan masyarakat. Umur Harapan Hidup merupakan Indikator kinerja utama pada tahun 2025 dan di tahun 2006 masih merupakan lator kinerja utama.

## 2.4 Perjanjian Kinerja



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 202**  
**UNIT KINERJA**

No	Sasaran Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat	Usia Harapan Hidup	71,64

No	Program	Anggaran (Rp)	Keterangan
1	Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	191,622,239,149	APBD
2	Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	54,090,187,807	APBD
3	Program peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan	600,098,233	APBD
4	Program sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman	659,999,919	APBD
5	Program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	600,000,300	APBD
<b>JUMLAH</b>		<b>247,572,525,408</b>	

Palu, 30 Januari 2025

<p style="text-align: center;"><b>PIHAK KEDUA</b> <b>GUBERNUR SULAWESI TENGAH</b></p> <div style="text-align: center;">  <p><b>H. Rusdy Mastura</b></p> </div>	<p style="text-align: center;"><b>PIHAK PERTAMA</b> <b>KEPALA DINAS KESEHATAN</b> <b>PROVINSI SULAWESI TENGAH</b></p> <div style="text-align: center;">  <p><b>dr. I Komang Adi Sujendra, Sp.PD</b> NIP. 19650325 199003 1 014</p> </div>
---	---

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025  
KEPALA DINAS KESEHATAN  
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET
1.	Meningkatnya Kualitas Derajat Kesehatan Masyarakat	Usia Harapan Hidup	71,64
		Angka Kematian Ibu (Per 100.000 KH)	176
		Prevalensi Stunting (Pendek dan sangat pendek pada balita)	23,90

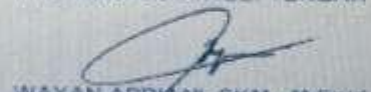
PROGRAM	ANGGARAN	KET
Dinas Kesehatan		
1 Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Rp. 184.949.892.916,34	APBD
2 Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Rp. 66.177.227.599,00	APBD
3 Program peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan	Rp. 298.554.083,00	APBD
4 Program sodisan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman	Rp. 355.945.669,06	APBD
5 Program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	Rp. 369.881.000,00	APBD
Jumlah	Rp. 252.152.301.267,40	

Palu, 16 September 2025

PIHAK KEDUA  
GUBERNUR SULAWESI TENGAH

  
ANWAR HAFID

PIHAK PERTAMA  
Pir. KEPALA DINAS KESEHATAN  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

  
WAYAN APRANI, SKM., M.Epid  
Pembina Tingkat I, IV/b  
NIP. 19700417 199312 2 001

## **BAB III**

### **AKUNTABILITAS KINERJA**

#### **3.1 Capaian Kinerja**

Dalam rangka mendukung penyelenggaraan pembangunan kesehatan di Provinsi Sulawesi Tengah menuju upaya pencapaian visi dan misi yaitu Menjadikan Provinsi Sulawesi Tengah Seajar Dengan Provinsi Maju di Kawasan Timur Indonesia, maka peranan Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah sebagai pembuat kebijakan dan penanggungjawab terhadap pelaksanaan pembangunan kesehatan wajib memberikan dukungan, pembinaan dan pengawasan di Wilayah Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Tengah, dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi tersebut Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah dapat menguraikan secara singkat muatan/substansi dari Perjanjian Kinerja tahun anggaran 2025 serta kaitannya dengan dokumen Renstra/RPJMD.

Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025 diukur dari tingkat keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah 2021- 2026. Dengan mengacu pada Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah.

Kinerja birokrasi pelayanan publik instansi pemerintah seperti halnya Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah, menjadi isu kebijakan yang makin strategis karena perbaikan kinerja birokrasi memiliki implikasi yang luas dalam kehidupan masyarakat, baik dari sisi ekonomi, politik dan sosial. Perbaikan kinerja birokrasi pelayanan di Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah diharapkan akan meningkatkan *image* Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah sebagai SKPD yang mempunyai kualitas yang tinggi dalam bidang pelayanan Kesehatan dan pelayanan di bidang lainnya. Dengan demikian, masyarakatpun tidak akan segan untuk menyerahkan kepercayaan mereka kepada Dinas Kesehatan dalam meningkatkan mutu kesehatan.

Dalam rangka mewujudkan perbaikan kinerja birokrasi, sebuah lembaga pemerintah dituntut untuk mempunyai arah dan tujuan yang jelas untuk dicapai. Hal ini akan mempermudah lembaga tersebut untuk

menentukan apa saja yang harus dipersiapkan, langkah apa yang harus ditempuh, bagaimana cara melakukannya dan sampai berapa tahun semua itu dapat diwujudkan. Demikian juga halnya dengan Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah, dalam upaya memberikan kejelasan arah dan tujuan yang ingin diraih, telah ditetapkan Rencana Strategi selama 5 tahun ke depan periode 2021-2026.

Renstra yang telah disusun tidak hanya sekedar menjadi koleksi, atau menambah perbendaharaan dokumen yang wajib dimiliki, akan tetapi memiliki tanggungjawab yang besar untuk dapat diimplementasikan serta dievaluasi sejauh mana pencapaian yang telah diraih. Artinya ketika tekad untuk mencapai kemajuan dituangkan dalam sebuah dokumen, mau tidak mau harus dilakukan evaluasi dan tinjauan ulang sejauh mana semua tekad tersebut telah dicapai. Jika tercapai seberapa besar presentase pencapaiannya, begitu sebaliknya apabila tidak tercapai mengapa belum tercapai, rintangan dan hambatan apa yang terjadi. Untuk mengukur pencapaian renstra tersebut pemerintah telah menyusun sebuah standar baku pengukuran bagi lembaga pemerintah yang disebut dengan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj).

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, disebutkan bahwa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah berisi ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana yang telah ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja dan dokumen perencanaan. Pencapaian sasaran tersebut sekurang-kurangnya menyajikan informasi tentang:

- a. Pencapaian tujuan dan sasaran organisasi
- b. Realisasi pencapaian indikator kinerja utama organisasi
- c. Penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja dan
- d. Perbandingan capaian indikator kinerja sampai dengan tahun berjalan dengan target 5 (lima) tahunan yang direncanakan.

Sesuai dengan Peraturan Men PAN dan RB di atas dan untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai perkembangan Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah dalam memperoleh dan mencapai kinerja selama tahun 2025, di bawah ini akan diuraikan secara rinci pencapaian sasaran kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah. Diharapkan uraian berikut dapat

memberikan informasi dan gambaran yang akurat bagi pihak yang berkepentingan dalam pengambilan kebijakan dan keputusan untuk pengembangan bidang kesehatan di masa yang akan datang.

**a. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja Tahun 2025**

Indikator Usia Harapan Hidup Ini merupakan keberhasilan program bidang kesehatan. Yang mana bukan semata-mata menjadi tanggung jawab Dinas Kesehatan dalam pencapaiannya melainkan menjadi tanggung jawab kita bersama antara unsur pemerintah, swasta, akademisi serta masyarakat secara keseluruhannya. Membandingkan Indikator Kinerja Utama target dan realisasi dengan tahun sebelumnya adalah sebagai berikut :

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %
1.	Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat	Usia Harapan Hidup	71.64	71.10	99.24
		Angka kematian ibu	176	131,95	133.38
		Prevalensi Stunting	24.9	10.2	244.1

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa ;

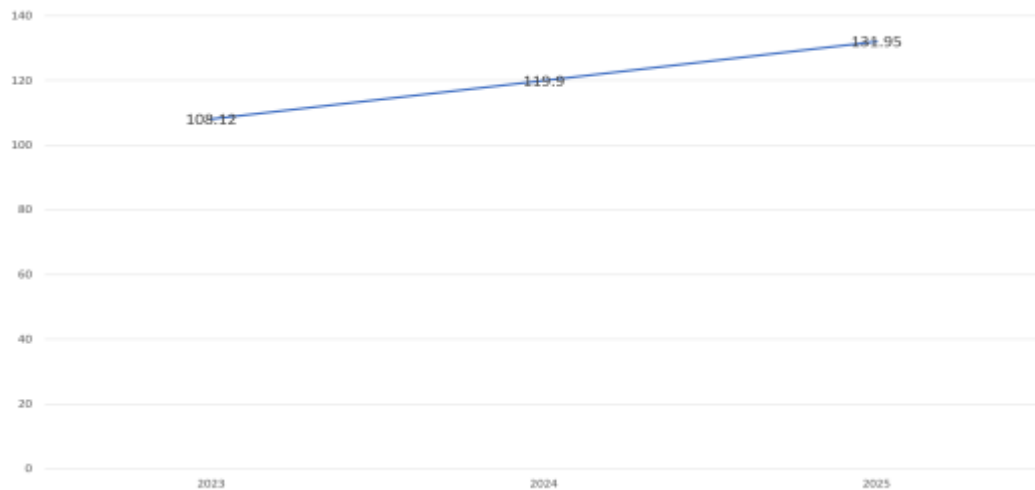
**Umur Harapan Hidup saat lahir (UHH)**

yang merepresentasikan dimensi umur panjang dan hidup sehat terus meningkat dari tahun ke tahun. Jika dibandingkan target usia harapan hidup/angka harapan hidup pada tahun 2025 hampir mencapai target yaitu 71,10. Interpretasi dari angka kelahiran hidup ini adalah seorang bayi yang di lahirkan di provinsi Sulawesi Tengah pada Tahun 2025 mempunyai harapan untuk hidup selama 71.10 tahun kedepan.

**Angka kematian ibu**

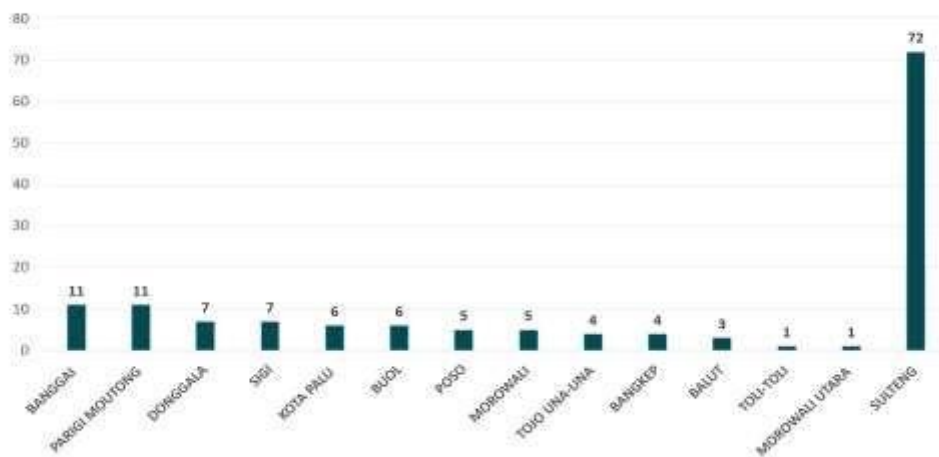
Realisasi Angka Kematian Ibu di Provinsi Sulawesi Tengah pada tahun 2025 sebesar 131,95 per 100000 KH . Jika dibandingkan dengan target AKI pada tahun 2025 sudah mencapai target yaitu 131.95 dengan jumlah kasus kematian ibu sebanyak 72 kasus dengan 3 kabupaten terbanyak jumlah kasusnya yaitu di kabupaten Banggai dan Parigi Moutong masing-masing sebanyak 11 kasus, kabupaten Donggala dan Kabupaten Sigi masing-masing sebanyak 7 kasus. Angka Kematian Ibu tahun 2023 sampai tahun 2025 ini

mengalami kenaikan yaitu pada tahun 2023 sebesar 109,12 per 100000 KH, mengalami kenaikan pada tahun 2024 sebesar 119,9 per 100000 KH, dan mengalami kenaikan pada tahun 2025 sebesar 131,95 per 100000 KH .



Indikator angka dan jumlah kematian ibu merupakan indikator negatif dimana bila semakin banyak kasus yang terjadi berarti masih diperlukan penguatan dalam penurunan angka kematian ibu.

JUMLAH KEMATIAN IBU KABUPATEN/KOTA PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2025



### Prevalensi Stunting

Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan Panjang atau tinggi badannya berada dibawah standard (Perpres 72 Tahun 2021). Selanjutnya menurut Who (2020) stunting adalah pendek atau sangat pendek berdasarkan Panjang / tinggi badan menurut usia yang kurang dari -2 Standar Deviasi (SD) pada kurva pertumbuhan WHO. Stunting dapat terjadi mulai janin masih dalam kandungan dan baru nampak saat anak berusia dua tahun .Dampak stunting pada anak dapat dilihat pada kondisi

gagal tumbuh, gangguan perkembangan kognitif dan motorik, serta gangguan metabolisme pada saat dewasa.

Percepatan pencegahan stunting dapat dilakukan dengan cara intervensi gizi spesifik yang merupakan tanggung jawab sektor kesehatan dan intervensi gizi sensitif yang melibatkan lintas sector melalui integrasi dan konvergensi. Untuk tahun 2021 telah dibentuk Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) baik tingkat Desa, Kecamatan, Kabupaten dan Provinsi yang mana kegiatan ini nantinya bisa dapat segera mengatasi masalah stunting secara bersama.

Realisasi Prevalensi Stunting di Provinsi Sulawesi Tengah pada tahun 2025 sebesar 10.2% berdasarkan data e-PPGBM . Jika dibandingkan dengan target AKI pada tahun 2025 sudah mencapai target yaitu 23.90%.

**b. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir**

Berikut tabel perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir :

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	2023			2024			2025		
			Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	%Capaian	Target	Realisasi	%Capaian
	Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat	Usia Harapan Hidup	69.01	69.42	100.59	69.1	78.08	101.41	71.64	71.10	99.24
1	Menurunnya Angka Kematian ibu	Angka Kematian Ibu	90.79	108.2	83.90	90	123.57	2.83	176	131.95	133.38
2	Menurunnya Prevalensi Stunting	Prevalensi Stunting	22	27.2	80.8	14	26.1	53.63	24.9	10.2	244.1

Tabel diatas menunjukkan realisasi kinerja tujuan dan sasaran selama 3 tahun berturut-turut sejak tahun 2023 sampai dengan 2025.

Pada tahun 2025, Dinas Kesehatan telah melaksanakan seluruh program dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Sesuai dengan Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025 dan Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan Provinsi Daerah, ada 3 (Tiga) tujuan Dinas Kesehatan yaitu meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dengan indikator ;

**Usia Harapan Hidup (UHH).**

Tren Usia arapan hidup selama 3 tahun berturut-turut selalu meningkat. Dan apabila dibandingkan dengan target, Usia Harapan Hidup (UHH) tahun 2025 hampir mencapai target dengan persentase capaian 71.10. Upaya yang telah dilakukan adalah peningkatan akses serta kuantitas kesehatan masyarakat dengan pemberian jaminan kesehatan untuk orang miskin, akreditasi fasilitas pelayanan kesehatan, peningkatan kepatuhan

petugas terhadap SOP, pemenuhan sarana prasarana dan peningkatan kompetensi SDM, implementasi PHBS dan Germas di semua sektor dan akselerasi pencapaian kabupaten kota sehat.

### Angka Kematian Ibu

Tren Angka Kematian Ibu selama 3 tahun berturut-turut selalu meningkat. Dan apabila dibandingkan dengan target, Angka Kematian Ibu tahun 2025 telah mencapai target dengan persentase capaian 131.95 persen.

### Prevalensi Stunting

Tren Prevalensi Stunting selama 3 tahun berturut-turut selalu Menurun . Dan apabila dibandingkan dengan target, Angka Kematian Ibu tahun 2025 telah mencapai target dengan persentase capaian 221 persen..

### c. Membandingkan Realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka panjang menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

Berikut tabel perbandingan antara Realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka panjang menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi ;

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi 2025	Target Akhir Renstra 2026	Target Renstra 2029	Tingkat kemajuan terhadap renstra 2021-2026	Tingkat kemajuan terhadap renstra 2025-2029
1	2	3	4	5	6	7 = 4/5*100	8 = 4/6*100
	Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat	Usia Harapan Hidup	71,10	80,01	72.96	88.86	97.45
1	Menurunnya Angka Kematian ibu	Angka Kematian Ibu	131,95		116		113.75
2	Menurunnya Prevalensi Stunting	Prevalensi Stunting	10,2		18.50		55.13

Tabel diatas menunjukkan perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2025 dan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen Renstra. Dari indikator kinerja tujuan Usia Harapan Hidup masih jauh dari target 2026 yaitu 80.01 tetapi untuk target renstra 2029 sudah hampir capai target 72.96. Sedangkan untuk indikator sasaran Angka kematian Ibu masih sudah capai target renstra 2026 yaitu 183 (Karena ini adalah indikaor negatif jadi semakin kecil capaian semankin Baik). Begitupulah dengan indikator sasaran Prevalensi stunting sudah mencapai akhir renstra 2029.

Pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) akhir 2026 dan akhir renstra 2029 menunjukkan perkembangan yang positif yaitu tingkat kemajuan pada indikator UHH tahun akhir tahun 2026 yaitu 88.86 dan UHH akhir renstra 2029 yaitu 97.45. Dan untuk indikator Angka kematian ibu tahun akhir renstra 2029 113.75 menunjukkan perkembangan positif . Kemudian untuk indiktor Prevalensi stunting renstra akhir tahun 2029 masih jauh dari realisasi tahun 2025.



**d. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan strandar Nasional**

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Realiasi Tahun 2025	Standar Nasional	Lebih Tinggi/Lebih Rendah
1	2	3	4	5	6 = 4-5*100
	Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat	Usia Harapan Hidup	71,10	80,01	- 8.91
1	Menurunnya Angka Kematian ibu	Angka Kematian Ibu	131,95	183	- 51.05
2	Menurunnya Prevalensi Stunting	Prevalensi Stunting	10,2	18,8	- 8.6

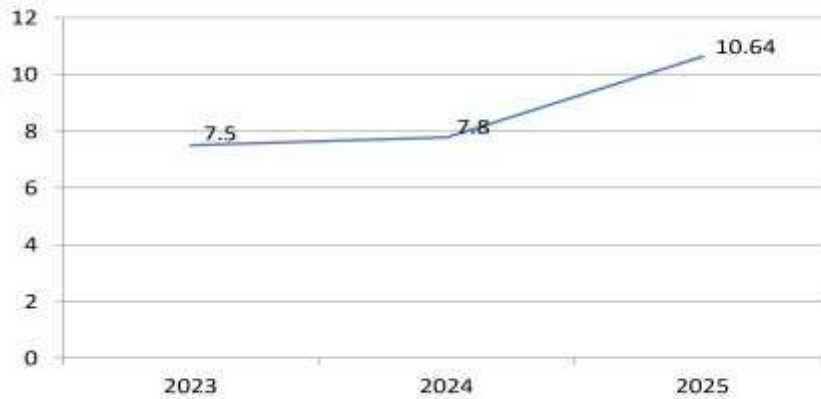
Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa Usia Harapan Hidup, capaian tahun 2025 sebesar 71.10% jika dibandingkan dengan target nasional sebesar 80.01% Belum mencapai target nasional. Realisasi tahun 2025 lebih rendah dari target nasional yaitu – 8.91%. Capaian Angka Kematian Ibu yaitu 131,95 jika dibandingkan dengan target nasional sebesar 183 Sudah capai target nasional. Realisasi tahun 2025 lebih rendah dari standar nasional yaitu -51.05. Capaian Prevalensi Stunting yaitu 10.2 jika dibandingkan dengan target nasional sebesar 18.8%. Realisasi tahun 2025 lebih rendah dari target nasional yaitu -8.6% Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah tetap berupaya agar kedepannya dapat mencapai target nasional.

**e. Analisis penyebab keberhasilan/Kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**

**1. Capaian Program Angka Kematian Bayi**

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa Realisasi indikator kematian bayii pada tahun 2025 adalah sebesar 32.8%, realisasi ini tidak capai target yang ditetapkan yaitu sebesar 3.49 per 1000 KH. Angka Kematia Bayi ini terjadi peningkatan dari tahun 2024 yaitu sebesar 7.56 per 1000 KH. Trend angka kematian bayi di Provinsi Sulawesi Tengah selama 3 tahun terakhir dapat dilihat pada grafik di bawah ini :

**TREND ANGKA KEMATIAN BAYI (AKB) 3 TAHUN TERAKHIR DI PROVINSI SULAWESI TENGAH**



Berdasarkan grafik di atas menunjukkan bahwa AKB selama 3 tahun terakhir tidak jauh berbeda, tahun 2023 sebesar 7,5 per 1000 KH, Tahun 2024 mengalami kenaikan menjadi 7,8 per 1000 KH, dan mengalami kenaikan kembali menjadi 10,64 per 1000 KH pada tahun 2025.

**Penyebab Kegagalan adalah sebagai berikut :**

- Kondisi sosial, ekonomi dan pendidikan keluarga yang mempengaruhi tingkat kesehatan ibu hamil dan bayi baru lahir
- Sarana dan prasarana pelayanan kesehatan yang belum memadai dalam penanganan kasus komplikasi yang ada pada bayi baru lahir
- Belum semua tenaga kesehatan di tingkat pelayanan dasar terpapar dengan kompetensi dalam penanganan kegawatdaruratan neonatal
- Pelaksanaan pelayanan antenatal care yang didapatkan oleh ibu hamil dan keluarga belum sesuai standar

**Alternatif solusi yang telah dilakukan:**

- Pelaksanaan Komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) pada ibu hamil dan keluarga akan pentingnya pemeriksaan Kesehatan selama kehamilan
- Pemenuhan sarana dan prasarana yang menunjang pelayanan penanganan kegawatdaruratan neonatal
- Peningkatan kapasitas petugas dalam memberikan pelayanan kebidanan
- Peningkatan kualitas pelayanan antenatal care sesuai standar minimal 6 kali selama kehamilannya (10 T + USG 2 kali yang dilakukan oleh dokter

umum /obygn pada kunjungan pertama dan kelima)

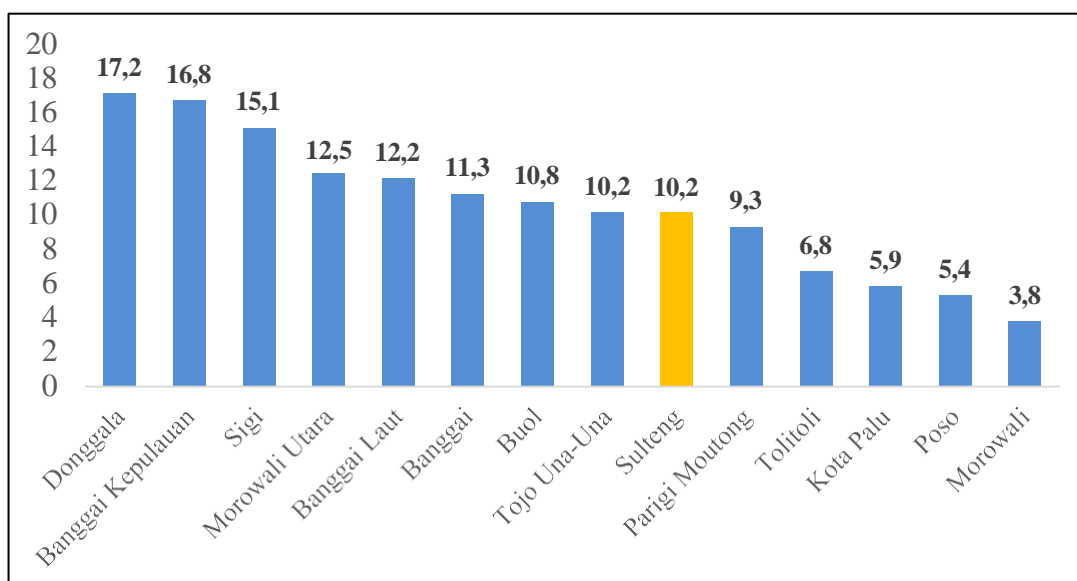
### Prevelensi Stunting pada Balita

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa Presentase balita stunting tahun 2025 berada dibawah target RPJMD. Prevalensi stunting tahun 2024 sebesar 10,2% dari target 14% dengan capaian kinerja 72,9%.

Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan Panjang atau tinggi badannya berada dibawah standard (Perpres 72 Tahun 2021). Selanjutnya menurut Who (2020) stunting adalah pendek atau sangat pendek berdasarkan Panjang / tinggi badan menurut usia yang kurang dari -2 Standar Deviasi (SD) pada kurva pertumbuhan WHO. Stunting dapat terjadi mulai janin masih dalam kandungan dan baru nampak saat anak berusia dua tahun .Dampak stunting pada anak dapat dilihat pada kondisi gagal tumbuh, gangguan perkembangan kognitif dan motorik, serta gangguan metabolisme pada saat dewasa.

Percepatan pencegahan stunting dapat dilakukan dengan cara intervensi gizi spesifik yang merupakan tanggung jawab sektor kesehatan dan intervensi gizi senitif yang melitkan lintas sector melalui integrasi dan konvergensi. Untuk tahun 2021 telah dibentuk Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) baik tingkat Desa, Kecamatan, Kabupaten dan Provinsi yang mana kegiatan ini nantinya bisa dapat segera mengatasi masalah stunting secara bersama.

**Grafik**  
**Prevalensi Balita Stunting Menurut Kabupaten/Kota**  
**Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025**



Pada grafik diatas prevalensi balita stunting yang tertinggi di Kabupaten Donggala sebesar 17,2% dan yang terendah di Kabupaten Morowali sebesar 3,8 %. Di Provinsi Sulawesi Tengah prevalensi stunting tahun 2025 sebesar 10,2% dari target RPJMD 23,9%. Presentase balita stunting tahun 2025 berada dibawah target RPJMD. Prevalensi stunting tahun 2024 sebesar 10,2% dari target 14% dengan capaian kinerja 72,9%.

Melihat data tersebut Provinsi Sulawesi Tengah sudah mencapai target.

**Penyebab kegagalan ini :** karena telah di implementasikan program 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) di beberapa Kabupaten/Kota dan adanya inovasi yang dilakukan oleh masing-masing Kabupaten/Kota dalam menurunkan angka stunting. Stunting merupakan salah satu priorotas nasional sehingga mendapat dukungan penuh dari pemerintah Kabupaten/Kota dan Provinsi, komitmen dari pemerintah dalam percepatan penurunan stunting bersama dan terintegrasi lintas program serta lintas sektor yang terkait.

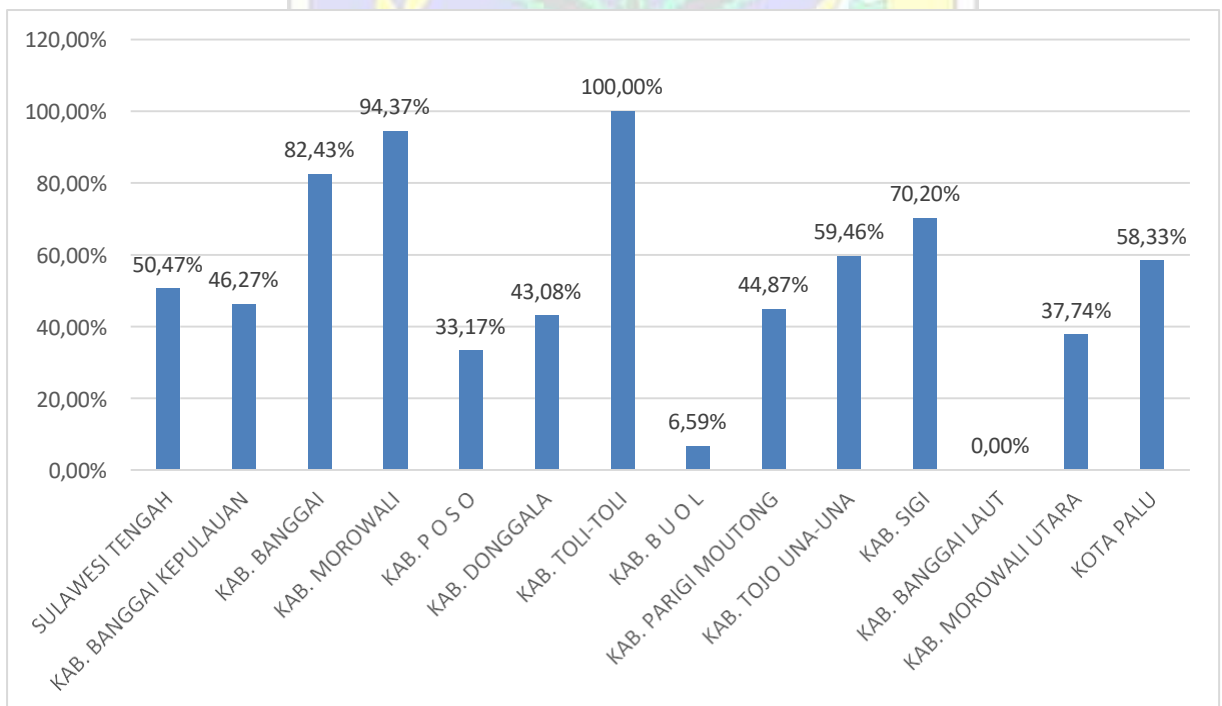
**Alternatif solusi yang telah dilakukan:**

- Monitoring dan Evaluasi Pembinaan Program Gizi
- Pertemuan Lintas Program dan Lintas Sektor terkait dalam rangka percepatan penurunan stunting
- Monitoring dan Evaluasi Percepatan Penurunan Stunting
- Pemberian Pangan Bergizi kepada Keluarga berisiko Stunting
- Pertemuan Intervensi Spesifik dan Sensitif Percepatan Penurunan Stunting
- Kegiatan Inovasi Terminal dan Transportasi Pangan Terpadu (Tetra Pandu)

### Kab/kota dengan kualitas air minum yang memenuhi syarat

Realisasi pada tahun 2025 adalah sebesar 50,47%, realisasi ini belum mencapai target yang ditetapkan sebesar 70%, dengan capaian 72,10%. Berdasarkan laporan manual yang diterima dari 13 Ka/Ko terdapat ada 9 Kab/Kota yang belum mencapai target yaitu Kab. Banggai Kepulauan, Poso, Donggala, Buol, Parigi Moutong, Tojo Una-Una, Banggai Laut, Morowali Utara dan Kota Palu, sementara sisanya 4 Kabupaten lainnya telah mencapai target tahun 2025, di mana tergambar sebagaimana grafik berikut :

**Grafik**  
**Ka/Ko Dengan Kualitas Air Minum Yang Memenuhi Syarat**  
**Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025**



#### Faktor penyebab keberhasilan pencapaian indikator sbb :

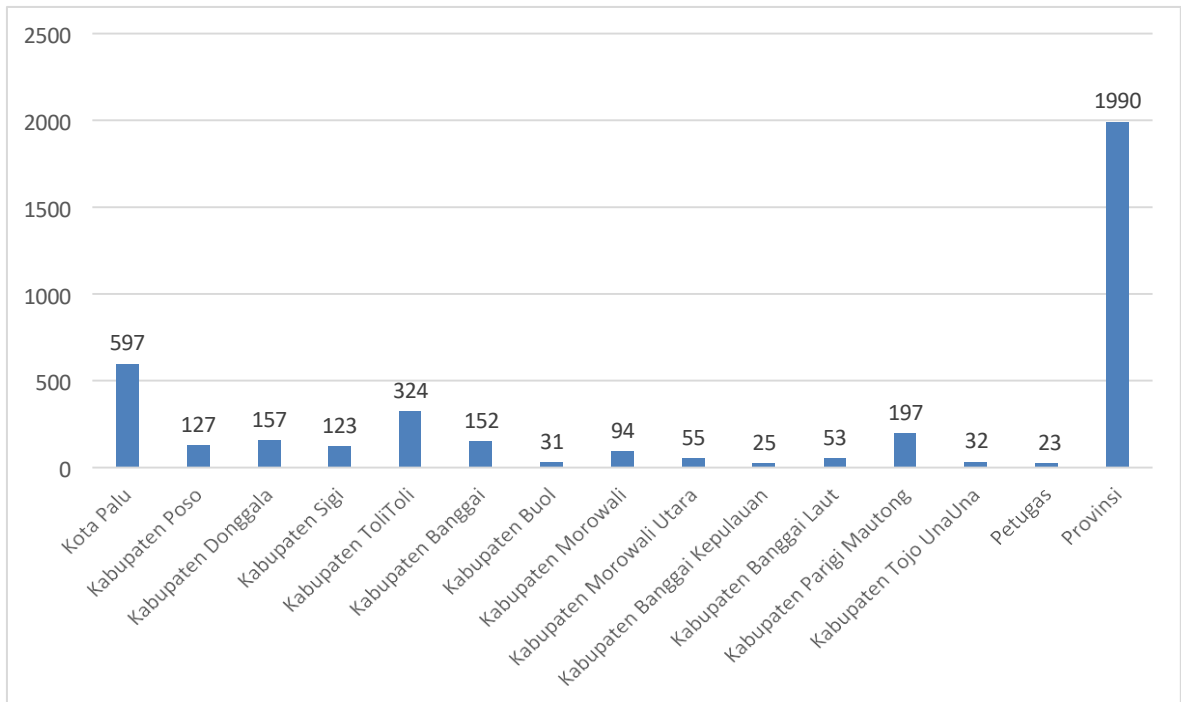
- Cemaran dari limbah industry sehingga kualitas sumber air baku menurun
- Dampak perubahan iklim seperti kekeringan menyebabkan kelangkaan air dan banjir bandang memicu pencemaran sumber air minum, utamanya di daerah pesisir dan pedesaan
- Tenaga Sanitarian Lingkungan terbatas, dan juga banyak yang rangkap jabatan

**Persentase penetapan status isthithaah kesehatan calon jamaah haji**

Realisasi pada tahun 2025 adalah sebesar 99,84%, realisasi ini belum mencapai target yang ditetapkan sebesar 100%, dengan capaian 99,84%. Berdasarkan laporan berbasis aplikasi yang diterima dari 13 Kabupaten terdapat 12 Kab/Kota yang mencapai target yaitu Kab. Banggai, Banggai Kepulauan, Banggai Laut, Buol, Tolitoli, Tojo Una-Una, Poso, Sigi, Donggala, Parigi Moutong, Morowali, Morowali Utara sementara sisanya 1 Kota lainnya telah mencapai target tahun 2025, di mana tergambar sebagaimana grafik berikut :

**Grafik**

**Persentase Penetapan Status Isthithaah Kesehatan Calon Jamaah Haji Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025**



Untuk melihat kebutuhan posyandu berdasarkan sebaran balita yang ada di suatu wilayah maka perlu dilakukan penghitungan kebutuhan atau rasio posyandu per satuan balita yang nantinya akan menjadi acuan dalam pembentukan posyandu baru atau dalam perencanaan pemekaran posyandu.

**Penyebab kegagalan indikator sbb :**

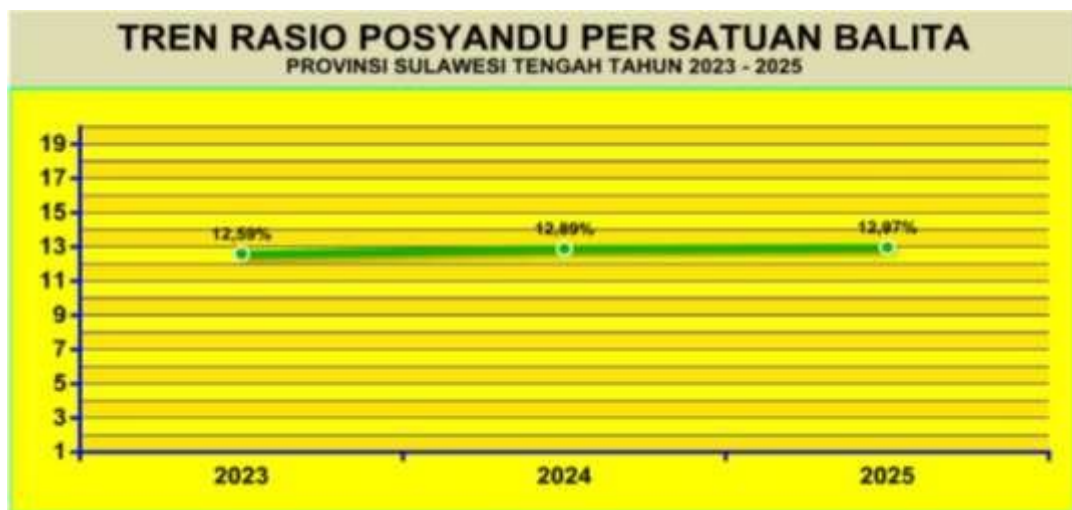
- a. Adanya Jamaah yang meninggal saat melaksanakan Ibadah Haji berjumlah 3 orang dengan sebaran 2 orang dari Kabupaten Poso dan 1 Orang dari Kota Palu

- b. Kurangnya kesadaran atau pengetahuan calon jemaah akan pentingnya menjaga kesehatan sejak dini (sebelum masa keberangkatan) dan rendahnya kepatuhan terhadap pengobatan penyakit kronis
- c. Pengetatan standar istithaah kesehatan oleh Kemenkes (termasuk skrining penyakit permanen) menyebabkan banyak jemaah yang gagal/tertunda keberangkatannya.

**Rasio posyandu per satuan balita**

Adapun tren rasio posyandu per satuan balita di Provinsi Sulawesi Tengah selama 3 tahun terakhir dapat dilihat pada tabel dan grafik di bawah ini:

NO	URAIAN	2023	2024	2025
1	Jumlah Posyandu	3.525	3.481	3.471
2	Jumlah Balita	279.929	269.930	267.554
3	Rasio	12,59	12,89	12,97



Dari data yang ada menunjukkan bahwa di Sulawesi Tengah dua tahun terakhir mengalami penurunan jumlah posyandu dari tahun 2023 yaitu 3.525 hal tersebut berdasarkan data jumlah posyandu yang masuk melalui aplikasi data komdat dan terjadinya penurunan jumlah posyandu diakibatkan adanya posyandu yang sudah bergabung karena jumlah sasaran layanan yang sudah berkurang atau mungkin ada permasalahan lain terkait pembiayaan posyandu. Peningkatan rasio posyandu per satuan balita mengalami kenaikan namun tidak signifikan hal ini juga disebabkan oleh jumlah proyeksi balita yang dikeluarkan oleh kementerian kesehatan menurun jumlah sasarannya pada dua tahun terakhir.

### Penyebab kegagalan sebagai berikut:

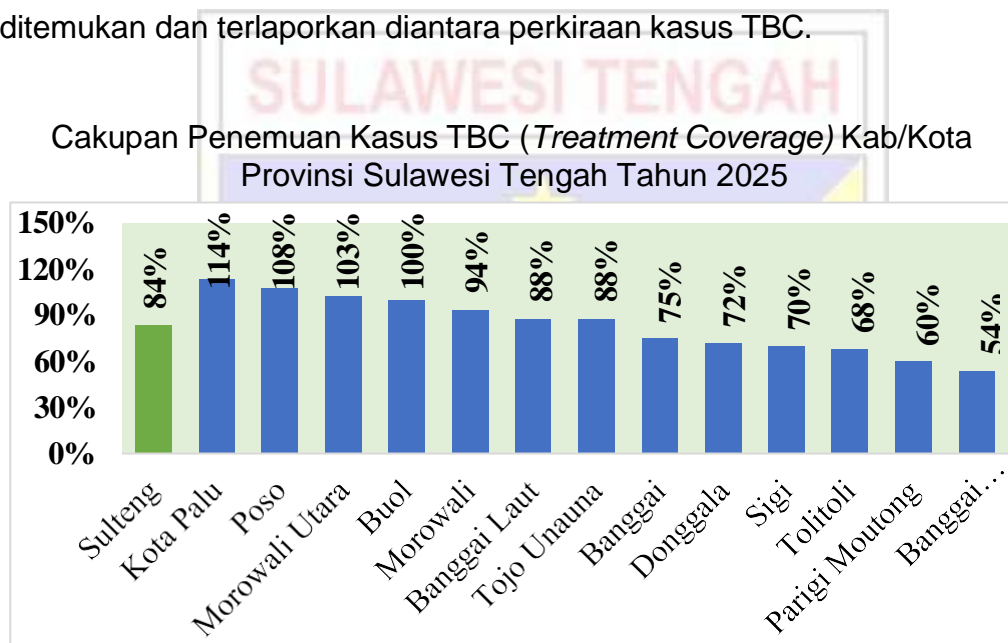
1. Peningkatan jumlah sasaran balita tidak dibarengi dengan penambahan jumlah posyandu
2. Terbatasnya pendanaan insentif kader oleh karena banyaknya pembiayaan di desa/kelurahan
3. Kurangnya pengawasan, monitong dan evaluasi terhadap posya

### Alternatif solusi yang telah dilakukan :

1. Perlu melakukan penambahan posyandu untuk lebih memudahkan dan mendekatkan masyarakat mendapatkan layanan kesehatan
2. Melakukan advokasi kepada pengambil kebijakan untuk benar-benar memperhatikan insentif kader sesuai dengan Undang-undang no. 6 tahun 2014 tentang desa
3. Melakukan percepatan peran TP-Posyandu dalam melakukan pengawasan dan pembinaan posyandu yang ada diwilayahnya.

### Cakupan penemuan kasus TBC (*Treatment Coverage*)

Cakupan penemuan kasus TBC adalah jumlah semua kasus TB yang ditemukan dan dilaporkan diantara perkiraan kasus TBC.



Sumber Data : SITB (*Sistem Informasi Tuberkulosis*) tahun 2025

Grafik diatas menunjukkan capaian penemuan kasus TBC kab/kota tahun 2025. Terlihat Lima kabupaten telah mencapai target penemuan, yaitu Kab. Kota Palu, Poso, Morowali Utara, Buol, dan Morowali. Kabupaten mencapai target penemuan kasus dengan didukung kegiatan

penemuan aktif TBC berupa Deteksi Dini ditempat berisiko, kegiatan Investigasi Kontak, kebijakan layanan BPJS di Rumah Sakit yaitu pasien TBC dapat dilakukan klaim BPJS jika pasien TBC tersebut telah memiliki nomor registrasi di SITB serta perluasan layanan TBC di DPM/Klinik dan RS Swasta.

Cakupan penemuan kasus TBC di Sulawesi Tengah tahun 2025 menurun 3% dibandingkan tahun 2024 yaitu dari 87% menjadi 84%.

**Penyebab kegagalan sebagai berikut :**

- a) Keterbatasan alat diagnostik (katrid) di pusat, prov dan kab disebabkan keterlambatan penyediaan katrid kab dari sumber pembiayaan DAK kabupaten
- b) Keterbatasan ketersediaan alat mikroskopis dan analisis di faskes khususnya di puskesmas
- c) Masih terdapatnya kasus TBC *under reporting* di layanan swasta DPM/klinik.
- d) Kegiatan penemuan aktif (investigasi kontak, skrining ditempat berisiko) belum dilakukan optimal disemua dilayanan puskesmas
- e) Masih terdapatnya layanan yang belum melaporkan kasus TBC (*delay reporting*)
- f) Jejaring internal fasyankes belum terkoordinasi baik antara petugas TBC dan program/unit lain disebagian besar fasyankes.

**Alternatif solusi yang telah dilakukan :**

Penyusunan RAD P2TB tingkat Provinsi Sulawesi Tengah

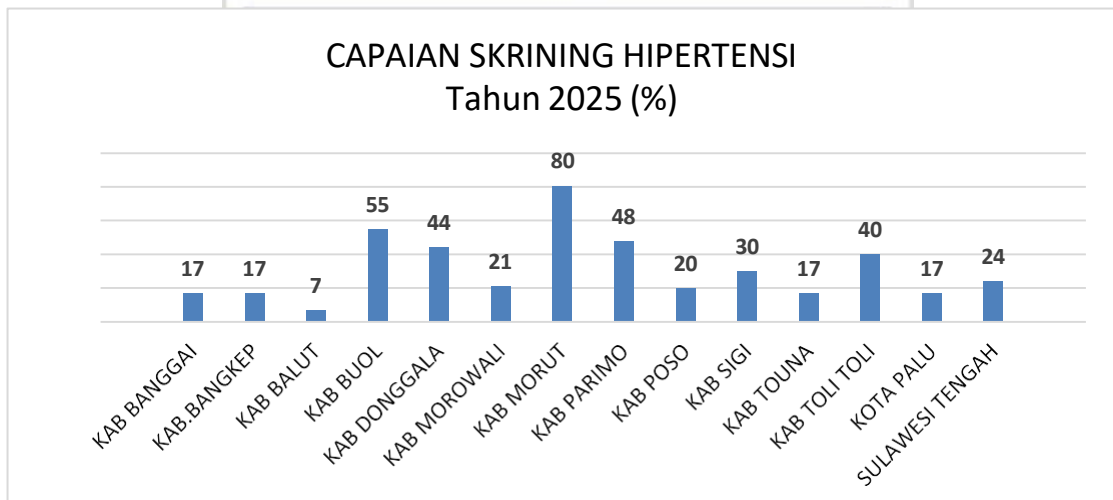
- Evaluasi capaian secara rutin setiap bulan (per tgl 5-10 diawal bulan) yang diumpun balik ke kab/kota
- Validasi data perfasyankes dilanjutkan OJT yang rutin dilakukan baik perbulan/pertriwulan dan intens dilakukan setiap minggu di TW 4.
- Evaluasi rakorpus rutin dilakukan oleh Kemendagri
- Kegiatan Aktif Case Finding (ACF) di lapas rutan pembiayaan Global Found dan APBN
- Kegiatan penemuan aktif berupa pemeriksaan kontak pasien TB (Investigasi Kontak) yang didukung pembiayaan BOK PKM
- OJT klinik, DPM, RS Swasta dalam pelaporan SITB
- Koordinasi tim logistik pusat untuk pemenuhan logistik P2TB
- Pembentukan WA group petugas TB faskes seprovinsi untuk

mempekuat koordinasi provinsi, kabupaten, dan fasyankes.

### **Persentase Skrining Hipertensi pada populasi Target**

Hipertensi atau darah tinggi adalah kondisi ketika tekanan darah berada pada angka 130/80 mmHg atau lebih. Jika tidak segera ditangani, hipertensi bisa menyebabkan komplikasi serius, seperti gagal jantung, penyakit ginjal, hingga stroke. Penyakit hipertensi cenderung terjadi pada penduduk usia  $\geq 15$  tahun ke atas. Berikut adalah data jumlah estimasi penderita hipertensi berusia  $\geq 15$  tahun di Sulawesi Tengah.

**Grafik**  
**Deteksi Dini Hipertensi Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025**



Berdasarkan Grafik diatas capaian skrining Hipertensi pada penduduk usia  $\geq 15$  tahun Provinsi Sulawesi Tengah sebanyak 523.227 penduduk atau 24 % dari target skrining tahun 2025 yaitu 1.642.456 Jiwa. Kabupaten/kota dengan skrining Hipertensi tertinggi adalah Kabupaten Morowali Utara dengan capaian skrining Hipertensi sebesar 80%, dan kabupaten yang terendah adalah Banggai laut sebesar 7 %.

### **Penyebab kegagalan dari indikator ini adalah sebagai berikut :**

- Prevalensi hipertensi atau tekanan darah di Indonesia cukup tinggi, akibat yang ditimbulkannya menjadi masalah Kesehatan masyarakat.
- Hipertensi sering tidak menunjukkan gejala, sehingga baru disadari bila telah menyebabkan gangguan fungsi jantung atau stroke
- Tidak jarang hipertensi ditemukan secara tidak sengaja pada waktu pemeriksaan Kesehatan rutin atau datang dengan keluhan lain
- Sebagian besar kasus hipertensi di masyarakat belum

terdiagnosis.

**Analisis Upaya yang dilakukan untuk mencapai indikator** adalah sebagai berikut:

1. Mengembangkan dan memperkuat kegiatan deteksi dini hipertensi secara aktif (skrining)
2. Meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan deteksi dini melalui kegiatan Posbindu PTM
2. Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana promotif-preventif, maupun sarana prasarana diagnostik dan pengobatan.

### **Cakupan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin**

Seiring dengan kebijakan transformasi kesehatan dan dalam rangka peningkatan akses pelayanan kesehatan yang berkualitas serta untuk menjamin keberlangsungan program Jaminan Kesehatan Nasional, maka Pemerintah telah menginstruksikan pada seluruh Kementerian untuk turut berperan aktif dalam optimalisasi pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional sebagaimana amanah yang tertuang dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022. Dalam instruksi tersebut diharapkan Gubernur dan Wali Kota untuk :

- a. melakukan langkah – langkah agar setiap penduduk yang berada di wilayahnya terdaftar sebagai peserta aktif dalam program Jaminan Kesehatan Nasional;
- b. melaksanakan verifikasi dan validasi seluruh segmen kepesertaan program Jaminan Kesehatan Nasional yang berada di wilayahnya;
- c. mengalokasikan anggaran kontribusi iuran penerima bantuan iuran (PBI), iuran penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi sebagai peserta pekerja bukan penerima upah (PBPU) dan peserta bukan pekerja (BP) sesuai kapasitas fiskal daerah.

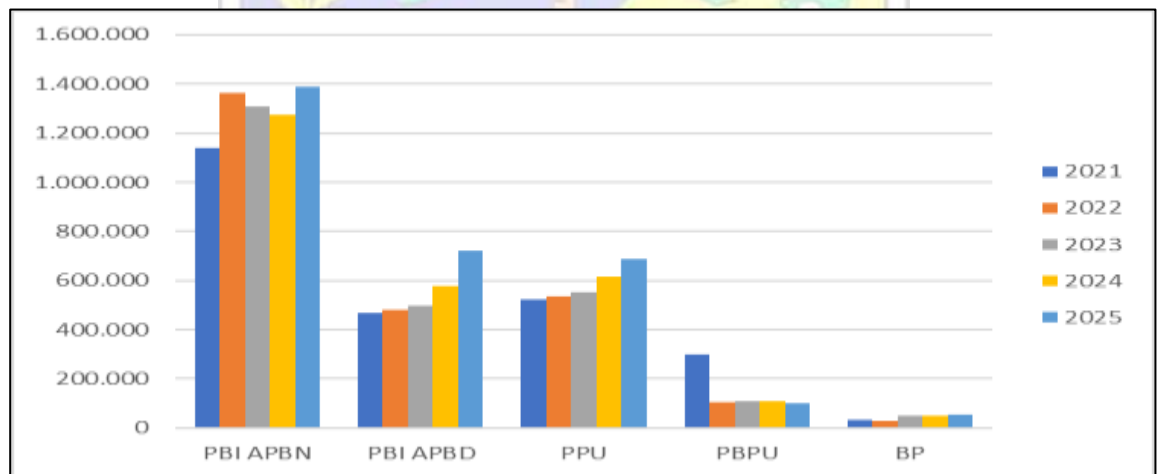
Menyikapi kebijakan tersebut, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah telah mengintegrasikan program Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) ke Jaminan Kesehatan Nasional dengan pola pembiayaan Propinsi dan Kabupaten/Kota mengalokasikan anggaran untuk iuran dan bantuan PBPU/BP, selain itu Propinsi mengalokasikan anggaran kontribusi PBI. Hal ini telah dituangkan dalam Kesepakatan Kerja antara Pemerintah

Provinsi dan Kabupaten/Kota dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS) tahun 2025.

Berdasarkan data BPJS Kesehatan per tanggal 31 Desember 2025, cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional di Provinsi Sulawesi Tengah mencapai 3.301.477 jiwa (101,72 %) dari total jumlah penduduk 3.245.659 jiwa, dengan demikian jumlah penduduk yang terdaftar sebagai peserta sudah melebihi jumlah penduduk Sulawesi tengah (*Sumber Data BPJS Cab. Palu dan Cab. Luwuk*). Adapun segmentasi

kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional tersebut terdiri dari PBI APBN 1.388.921 jiwa, PBI APBD 719.926 jiwa, PPU 686.954 jiwa, PBPU 99.814 jiwa dan BP 51.959 jiwa. Trend distribusi kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional per segmentasi sebagaimana grafik di bawah ini

**Grafik**  
**Distribusi Segmentasi Kepesertaan JKN**  
**Tingkat Provinsi Sulawesi Tengah**  
**Tahun 2021 s.d 2025**



TAHUN	PBI APBN	PBI APBD	PPU	PBPU	BP
2021	1.137.289	467.190	520.477	299.204	30.775
2022	1.361.970	478.399	536.405	103.064	28.755
2023	1.307.538	497.042	553.895	106.839	50.229
2024	1.273.826	575.420	617.421	110.522	47.667
2025	1.388.921	719.926	686.954	99.814	51.959

Berdasarkan grafik di atas, dapat dilihat bahwa kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional terus berfluktuatif dan cenderung meningkat pada tahun 2025 khususnya pada segmentasi kepesertaan PBI APBD,

Peningkatan jumlah kepesertaan JKN pada tahun 2025 tersebut sejalan dengan pelaksanaan Program Berani Sehat Tahun 2025, yang bertujuan untuk memperluas cakupan kepesertaan jaminan Kesehatan serta menjamin akses pelayanan kesehatan yang merata dan berkelanjutan bagi seluruh lapisan Masyarakat.

Di sisi lain, masih terdapat status kepesertaan yang tidak aktif yakni sebanyak 239.992 jiwa (7,27%) dari jumlah penduduk yang telah terdaftar. Hal ini karena terdapat peserta yang menunggak sebanyak 114.470 jiwa dan peserta yang mutasi (non aktif) sebanyak 239.992 jiwa.

Adapun untuk memberi kemudahan akses pelayanan kesehatan bagi peserta JKN-KIS (Rumah Sakit, Laboratorium) yang memenuhi kriteria sesuai ketentuan yang berlaku. Hingga saat ini terdapat 40 (empat puluh) fasilitas kesehatan yang telah bekerjasama dengan BPJS Kesehatan. Adapun rinciannya dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel**  
**Fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan**  
**Tingkat Provinsi Sulawesi Tengah Per 31 Desember 2025**

<b>NO</b>	<b>NAMA FASILITAS KESEHATAN</b>	<b>JUMLAH</b>
1	RS Kelas B	4
2	RS Kelas C	20
3	RS Kelas D	7
4	RS Kelas D Pratama	3
5	RS TNI/Polri Tingkat III	2
6	RS TNI/Polri Tingkat IV	1
7	Laboratorium	3
<b>TOTAL</b>		<b>40</b>

**Penyebab keberhasilan yaitu :** Optimalisasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Dinkes fokus pada peningkatan kepesertaan masyarakat miskin dalam program JKN-KIS melalui kategori Penerima Bantuan Iuran (PBI):

- Integrasi Data PBI: Melakukan verifikasi dan validasi data masyarakat miskin bersama Dinas Sosial agar mereka terdaftar sebagai peserta PBI, baik yang dibiayai melalui APBN maupun APBD (PBI Daerah).
- Pemenuhan Anggaran: Mengalokasikan anggaran khusus untuk membayar iuran bagi penduduk yang belum tercover oleh pemerintah pusat demi mengejar target *Universal Health Coverage* (UHC)

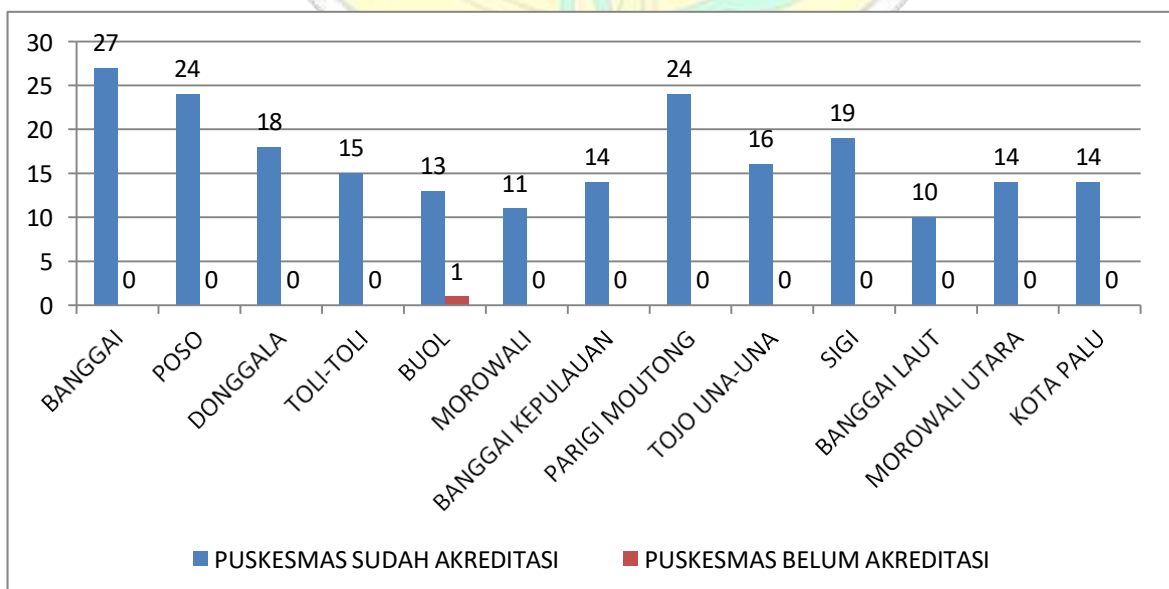
## Presentase Puskesmas yang terakreditasi

Tujuan utama akreditasi adalah untuk pembinaan peningkatan mutu, kinerja melalui perbaikan yang berkesinambungan terhadap sistem manajemen, sistem manajemen mutu dan sistem penyelenggaraan pelayanan klinis, serta penerapan manajemen risiko, dan bukan sekedar penilaian untuk mendapatkan sertifikat akreditasi. Pendekatan yang dipakai dalam akreditasi adalah keselamatan dan hak pasien dan keluarga, dengan tetap memperhatikan hak petugas.

Penyelenggaraan Akreditasi Puskesmas, dilakukan melalui survei Akreditasi. Survei Akreditasi merupakan kegiatan penilaian untuk mengukur tingkat kesesuaian terhadap standar Akreditasi, dilakukan oleh Lembaga Penyelenggara Akreditasi yang ditetapkan oleh Menteri.

Realisasi Indikator Persentase Puskesmas Yang Terakreditasi adalah 99,54%, realisasi ini tidak memenuhi target yang ditetapkan pada tahun 2025 yaitu 100% karena 1 (satu) Puskesmas baru teregistrasi tahun 2025 yaitu Puskesmas Unone Kabupaten Buol yang rencana akan di lakukan survey akreditasi tahun 2026. 219 Puskesmas di Provinsi Sulawesi Tengah sudah terakreditasi. Adapun pencapaian akreditasi puskesmas sampai dengan tahun 2025 dapat di lihat pada grafik di bawah ini :

**Grafik 8**  
**JUMLAH PUSKESMAS TERAKREDITASI DAN BELUM TERAKREDITASI DI KABUPATEN/KOTA PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2025**



### **Jumlah puskesmas yang memiliki tenaga sesuai standar**

Puskesmas yang telah memiliki 9 jenis tenaga kesehatan sesuai standar ketenagaan berdasarkan PERMENKES 75 tahun 2014 yakni : Dokter, Dokter Gigi, Perawat, Bidan, Tenaga Kesehatan Masyarakat, Tenaga Kesehatan Lingkungan, Ahli Teknologi Laboratorium Medik/Anaisis Kesehatan, Tenaga Gizi dan Tenaga Kefarmasian.

Dari 220 puskesmas pada tahun 2025 yang ada di Provinsi Sulawesi Tengah baru sekitar 99 puskesmas yang terpenuhi (45,0%) yang lengkap 9 tenaga kesehatan strategis dan ada 121 puskesmas atau (55,0%) yang belum lengkap tenaga kesehatan.

Dimana tahun 2025 tenaga yang masih kurang di puskesmas dari 9 jenis tenaga strategis adalah tenaga dokter, tenaga dokter gigi, tenaga kesehatan lingkungan, ATLM, Tenaga Gizi dan Tenaga Kefarmasian walaupun masih ada juga tenaga kesehatan yang lain belum tersedia dan jika dibandingkan dengan tahun 2024 puskesmas yang terpenuhi tenaga kesehatan sesuai standar Minimal sebesar 56,2%, ini artinya ada penurunan dari 2024 ke 2025 sebesar 10,91% penurunannya.

Berdasarkan analisis indikator kinerja output dan outcome, terdapat perbedaan capaian kinerja yang signifikan antara Tahun 2024 dan Tahun 2025 pada beberapa indikator utama bidang kesehatan. Pada indikator Persentase Puskesmas yang memiliki SDM Kesehatan sesuai standar sebagai indikator outcome, Tahun 2024 menunjukkan kinerja yang melampaui target. Dengan target sebesar 50%, realisasi mencapai 56,16%, sehingga capaian kinerja tercatat sebesar 112,30%. Kondisi ini menunjukkan bahwa pada Tahun 2024, pemenuhan SDM Kesehatan di Puskesmas telah berjalan sangat baik dan melebihi perencanaan. Sebaliknya, pada Tahun 2025, meskipun target dinaikkan menjadi 55%,

realisasi justru menurun menjadi 45,00%, dengan capaian kinerja sebesar 81,82%. Hal ini menunjukkan adanya penurunan capaian kinerja dibandingkan Tahun 2024, baik dari sisi realisasi maupun persentase capaian.

Tren yang sama terlihat pada indikator Persentase Puskesmas yang memiliki SDM Kesehatan sesuai standar sebagai indikator output. Pada Tahun 2024, capaian kinerja mencapai 112,30%, sedangkan pada Tahun 2025 capaian menurun menjadi 81,82%, sejalan dengan penurunan realisasi dan peningkatan target yang ditetapkan.

Pada indikator Rasio dokter per satuan penduduk, kinerja pada kedua tahun menunjukkan capaian di atas target. Tahun 2024 menetapkan target 0,51 per 100 penduduk dengan realisasi 0,66, sehingga capaian mencapai 128,95%. Pada Tahun 2025, target meningkat menjadi 0,54, dengan realisasi 0,63, dan capaian kinerja sebesar 116,99%. Meskipun masih melampaui target, capaian Tahun 2025 lebih rendah dibandingkan Tahun 2024.

Indikator Rasio tenaga medis per satuan penduduk menunjukkan tren peningkatan. Pada Tahun 2024, dengan target 4,71 per 100 penduduk, realisasi mencapai 6,16 dan capaian sebesar 130,70%. Pada Tahun 2025, target meningkat menjadi 4,97, realisasi naik menjadi 6,68, dan capaian kinerja meningkat menjadi 134,37%. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan ketersediaan tenaga medis secara kuantitatif.

Untuk indikator Persentase RSUD yang memiliki 4 dokter spesialis dasar dan 3 dokter spesialis penunjang, kinerja Tahun 2024 masih tergolong rendah. Dari target 58%, realisasi hanya 26,92%, dengan capaian 46,42%. Pada Tahun 2025, meskipun target dinaikkan menjadi 60%, realisasi meningkat menjadi 46,15%, sehingga capaian kinerja naik menjadi 76,92%. Data ini menunjukkan adanya perbaikan capaian dibandingkan Tahun 2024, meskipun target belum sepenuhnya tercapai.

Sementara itu, indikator Persentase Puskesmas Tanpa Dokter menunjukkan perbedaan arah capaian. Pada Tahun 2024, dengan target 4%, realisasi tercatat 3,20%, sehingga capaian sebesar 79,91%, yang menunjukkan kondisi lebih baik dari target. Namun pada Tahun 2025, realisasi meningkat menjadi 4,55% dengan target yang tetap 4%, sehingga

capaian menjadi 113,64%, yang menunjukkan peningkatan jumlah Puskesmas tanpa dokter dibandingkan Tahun sebelumnya.

Secara keseluruhan, Tahun 2024 menunjukkan capaian kinerja yang lebih stabil dan dominan melampaui target pada sebagian besar indikator, khususnya pemenuhan SDM Kesehatan di Puskesmas. Sementara itu, Tahun 2025 menunjukkan capaian yang bervariasi, dengan peningkatan pada rasio tenaga medis dan pemenuhan dokter spesialis RSUD, namun mengalami penurunan pada pemenuhan SDM Kesehatan Puskesmas dan peningkatan persentase Puskesmas tanpa dokter.

### **Persentase FKTP yang memenuhi Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan sesuai standar tahun 2025**

#### **Penyebab kegagalan indikator ini adalah :**

Adanya penyesuaian Permenkes baru ( Permenkes no 19 tahun 2024 ) yang menerapkan system kluster sehingga banyak alat standar yang tidak ada di ruangan sehingga di perlukan pengimputan baru dan pemindahan alat sesuai standar yang di tetapkan oleh permenkes Anggaran Terbatas: Keterbatasan anggaran yang dialokasikan untuk pemenuhan dan pemeliharaan SPA menjadi hambatan signifikan. Begitu juga dengan anggaran pemeliharaan (perbaikan, kalibrasi) Sarana Prasarana dan Alkes Puskesmas dan Rumah Sakit

Kuantitas dan Kualitas SDM Kesehatan:

Seringnya Pergantian Penanggung Jawab /Pengelola Aspek di Fasyankes  
Kekurangan Tenaga Medis: Terdapat kekurangan tenaga medis, termasuk dokter dan tenaga kesehatan lain, terutama di lokasi terpencil, yang berdampak pada kemampuan puskesmas untuk beroperasi secara optimal dan memenuhi standar pelayanan.

Kurangnya Pelatihan: Keterbatasan pelatihan bagi tenaga kesehatan dalam pengelolaan dan pengoperasian alat kesehatan yang baru atau canggih juga menjadi kendala.

Perencanaan yang Kurang Matang: Penilaian kebutuhan SPA yang tidak tepat sasaran dapat menyebabkan pengadaan sarana dan prasarana yang tidak sesuai dengan kebutuhan aktual puskesmas.

## Persentase Fasyankes yang melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai standar

Realisasi Indikator Persentase Fasyankes yang melaksanakan Pelayanan Kefarmasian sesuai Standar adalah 81.1%, realisasi ini melebihi target yang ditetapkan pada tahun 2025 yaitu 75%. Data dihitung berdasarkan Laporan Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas dan Rumah Sakit dari 13 Kabupaten/Kota se Sulawesi Tengah. Dari hasil rekapitulasi laporan pelayanan kefarmasian di Puskesmas dan Rumah Sakit pada tahun 2025, bahwa rerata puskesmas memenuhi standar pelayanan kefarmasian adalah 182 Puskesmas dari 219 Puskesmas (83.1%) dan rerata Rumah Sakit yang memenuhi standar pelayanan kefarmasian adalah 28 RS dari 40 RS (70%), berikut adalah grafik Persentase Fasyankes yang melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai standar :



Berdasarkan grafik tersebut diatas terdapat 5 kabupaten dengan seluruh sarana Rumah Sakit diwilayahnya melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai standar yaitu Kabupaten Buol, Sigi, Morowali Utara, Toli-Toli dan Banggai Kepulauan, serta 1 Kabupaten yang sarana Rumah Sakit di wilayahnya tidak menerapkan pelayanan kefarmasian sesuai standar yaitu Kabupaten Banggai Laut.

### Penyebab keberhasilan Masalah :

- Advokasi kepada *stakeholder* terkait seperti Pemerintah Daerah baik tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota (Badan Kepegawaian Daerah dan Dinas Kesehatan) terkait kebutuhan tenaga Apoteker khususnya pada sarana Puskesmas, hal ini diperkuat dengan amanah Menteri

Kesehatan dalam Surat Edaran Menteri Kesehatan RI Nomor. HK.02.01/Menkes/382/2019 Tentang Penempatan Apoteker di Puskesmas.

- b. Advokasi kepada pimpinan (Kepala Puskesmas / Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota) terkait pemenuhan sarana prasarana untuk seluruh pelaporan kefarmasian di Puskesmas (Pelayanan Kefarmasian melalui SIMONA, Ketersediaan Obat dan Vaksin melalui SELENA dan SMILE)
- c. Advokasi kepada Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota agar lebih aktif melakukan pembinaan dan pemantauan pelaporan secara berjenjang
- d. Pemberian *reward* dan penetapan petugas laporan pelayanan kefarmasian melalui SK Direktur Rumah Sakit dan Kepala Puskesmas.

**f. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber daya**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	
1	2		3	4	5	6	7	8	9 = 5-8
1	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Usia Harapan Hidup	71.64	71,10	99.24	3,138,237,943	1,910,326,442	60.87	40.68
2		Angka Kematian Ibu	176	131,95	133.38	403.311.000	401.264.550	25.85	107.53
3		Prevalensi Stunting	24.9	10,2	244.1	1.897.578.743	681.571.695	35.91	185.19

Berdasarkan table di atas, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan urusan kesehatan pada periode pelaporan telah berjalan dengan baik dan secara umum mencapai target kinerja yang ditetapkan, dengan tingkat serapan anggaran yang optimal.

**g. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Analisis ini merupakan bagian penting dalam laporan akintabilitas kinerja karena untuk memetakan sejauh mana program yang dijalankan berkontribusi terhadap target organisasi. Program dan kegiatan Dinas Kesehatan Sulawesi Tengah yang dilaksanakan Tahun 2025 untuk menunjang pencapaian target, beriku akan di sajikan data capaian target Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025

No.	Program dan Kegiatan	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Capaian	
				Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Usia Harapan Hidup	71.64	403,311,000.00	70.01	401,264,550.00	99.24	99.49
	Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Menurunnya Angka Kematian Ibu	Angka Kematian Ibu	176	403,311,000.00	131.95	401,264,550.00	74.97	99.49
		Menurunnya Prevalensi Stunting	Prevalensi Stunting	23.9	403,311,000.00	10.2	401,264,550.00	42.67	99.49

Berdasarkan table di atas, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan urusan kesehatan pada periode pelaporan telah berjalan dengan baik dan secara umum mencapai target kinerja yang ditetapkan, dengan tingkat serapan anggaran yang optimal.

### 3.2 Realisasi Anggaran

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU APBD 2025	PAGU APBD 2025 PERUBAHAN SETELAH EFISIENSI	REALISASI			Sisa Anggaran
				Keuangan (Rp)	%	FISIK (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>DINAS KESEHATAN</b>	<b>247.572.525.408</b>	<b>258.348.477.016</b>	<b>246.658.309.148</b>	<b>95,48</b>	<b>99,40</b>	<b>11.690.167.868</b>
<b>1</b>	<b>SEKRETARIAT</b>	<b>192.197.238.939</b>	<b>174.496.903.959</b>	<b>166.301.881.477</b>	<b>95,30</b>	<b>99,96</b>	<b>8.195.022.482</b>
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	191.622.239.149	174.208.791.552	166.041.583.070	95,31	99,94	8.167.208.482
<b>1</b>	<b>Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>1.108.644.000</b>	<b>523.716.500</b>	<b>448.743.450</b>	<b>85,68</b>	<b>91,90</b>	<b>74.973.050</b>
	1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	698.644.000	325.053.000	250.515.700	77,07	83,79	74.537.300
	2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	410.000.000	198.663.500	198.227.750	99,78	100,00	435.750
<b>2</b>	<b>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>181.274.159.888</b>	<b>168.552.258.443</b>	<b>160.689.844.127</b>	<b>95,34</b>	<b>100,00</b>	<b>7.862.414.316</b>
	1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	176.437.473.388	163.907.023.990	156.105.281.327	95,24	100,00	7.801.742.663

	2 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	4.402.680.000	4.382.769.653	4.322.460.000	98,62	100,00	60.309.653
	3 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	238.974.500	152.249.800	152.179.800	99,95	100,00	70.000
	4 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKP	135.146.000	76.775.000	76.658.000	99,85	100,00	117.000
	5 Pengelolaan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	59.886.000	33.440.000	33.265.000	99,48	100,00	175.000
	<b>3 Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>215.994.500</b>	<b>111.172.000</b>	<b>110.897.000</b>	<b>99,75</b>	<b>100,00</b>	<b>275.000</b>
	1 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	101.672.500	38.605.000	38.420.000	99,52	100,00	185.000
	2 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	114.322.000	72.567.000	72.477.000	99,88	100,00	90.000
	<b>4 Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>532.524.500</b>	<b>177.525.000</b>	<b>164.530.000</b>	<b>92,68</b>	<b>94,42</b>	<b>12.995.000</b>
	1 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	199.996.500					-
	2 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	150.098.000	75.040.000	65.140.000	86,81	86,81	9.900.000

	3 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	182.430.000			96,98		
			102.485.000	99.390.000		100,00	3.095.000
	<b>5 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>563.298.500</b>	<b>526.648.875</b>	<b>524.313.685</b>	<b>99,56</b>	<b>100,00</b>	<b>2.335.190</b>
	1 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	563.298.500			99,56		
			526.648.875	524.313.685		100,00	2.335.190
	<b>6 Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>3.789.217.284</b>	<b>876.423.370</b>	<b>872.501.290</b>	<b>99,55</b>	<b>200,00</b>	<b>3.922.080</b>
	1 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	2.535.800.000			99,58		
			712.303.350	709.300.000		100,00	3.003.350
	2 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	199.997.004					-
	3 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.053.420.280	164.120.020	163.201.290	99,44	100,00	918.730
	<b>7 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>2.539.207.500</b>	<b>2.288.810.800</b>	<b>2.126.206.468</b>	<b>92,90</b>	<b>100,00</b>	<b>162.604.332</b>
	1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.035.472.000	833.642.800	816.076.261	97,89	100,00	17.566.539
	2 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.503.735.500	1.455.168.000	1.310.130.207	90,03	100,00	145.037.793
	<b>8 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>1.599.192.977</b>	<b>1.152.236.564</b>	<b>1.104.547.050</b>	<b>95,86</b>	<b>96,92</b>	<b>47.689.514</b>

	1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	534.800.000				96,96	100,00	11.311.525
			372.640.000		361.328.475			
	2 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	900.142.977				94,27	94,42	36.377.989
			635.386.564		599.008.575			
	3 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	164.250.000				#####	100,00	-
			144.210.000		144.210.000			
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					90,35	93,22	27.814.000
		574.999.790						
	1 Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi		288.112.407		260.298.407	83,54	89,60	16.454.000
		200.000.000	99.960.000		83.506.000	83,54	89,60	16.454.000
	1 Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Lintas Kabupaten/Kota							
		200.000.000						
			99.960.000		83.506.000	93,96	96,84	11.360.000
	2 Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi							
	1 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan					93,96	96,84	11.360.000
		374.999.790	188.152.407		176.792.407			
		374.999.790						
			188.152.407		176.792.407			

<b>2</b>	<b>BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT</b>	<b>3.438.210.635</b>	<b>3.560.202.643</b>	<b>2.323.116.822</b>	<b>65,25</b>	<b>97,94</b>	<b>1.237.085.821</b>
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	2.838.210.335	3.138.237.943	1.910.326.442	<b>60,87</b>	<b>95,88</b>	1.227.911.501
	<b>1 Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi</b>	<b>2.838.210.335</b>	<b>3.138.237.943</b>	<b>1.910.326.442</b>	<b>60,87</b>	<b>95,88</b>	<b>1.227.911.501</b>
	1 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	613.170.800	403.311.000	401.264.550	<b>99,49</b>	<b>100,00</b>	2.046.450
	2 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif	249.999.850	124.999.900	124.999.900	#####	<b>100,00</b>	-
	3 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut	159.999.950	79.999.850	79.955.650	<b>99,94</b>	<b>100,00</b>	44.200
	4 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	899.987.135	1.897.578.743	681.571.695	<b>35,92</b>	<b>67,00</b>	1.216.007.048
	5 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	149.998.750	80.995.600	80.995.600	#####	<b>100,00</b>	-
	6 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	465.054.000	361.462.700	354.372.897	<b>98,04</b>	<b>100,00</b>	7.089.803
	7 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	150.000.200	75.000.150	74.306.150	<b>99,07</b>	<b>100,00</b>	694.000
	8 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	149.999.650	114.890.000	112.860.000	<b>98,23</b>	<b>100,00</b>	2.030.000

	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	600.000.300	421.964.700	412.790.380	97,83	100,00	9.174.320
	<b>1 Kegiatan Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi</b>	<b>300.000.250</b>	<b>194.840.800</b>	<b>191.158.640</b>	<b>98,11</b>	<b>100,00</b>	<b>3.682.160</b>
	1 Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	300.000.250	194.840.800	191.158.640	98,11	100,00	3.682.160
	<b>2 Kegiatan Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam Rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi</b>	<b>150.000.050</b>	<b>137.857.700</b>	<b>135.957.700</b>	<b>98,62</b>	<b>100,00</b>	<b>1.900.000</b>
	1 Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	150.000.050	137.857.700	135.957.700	98,62	100,00	1.900.000
	<b>3 Kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Provinsi</b>	<b>150.000.000</b>	<b>89.266.200</b>	<b>85.674.040</b>	<b>95,98</b>	<b>100,00</b>	<b>3.592.160</b>
	1 Bimbingan Teknis dan Supervisi UKBM	150.000.000	89.266.200	85.674.040	95,98	100,00	3.592.160

<b>3</b>	<b>BIDANG PELAYANAN KESEHATAN</b>	<b>42.549.998.300</b>	<b>71.271.260.000</b>	<b>69.688.972.999</b>	<b>97,78</b>	<b>100,00</b>	<b>1.582.287.001</b>
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	42.549.998.300	71.271.260.000	69.688.972.999	97,78	100,00	1.582.287.001
	<b>1 Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi</b>	<b>42.399.998.450</b>	<b>71.192.897.000</b>	<b>69.610.809.999</b>	<b>97,78</b>	<b>100,00</b>	<b>1.582.087.001</b>
	1 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	149.999.750	77.329.450	77.227.450	99,87	100,00	102.000
	2 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	40.149.999.800	69.309.013.950	67.841.250.569	97,88	100,00	1.467.763.381
	3 Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	1.799.999.850	1.656.611.100	1.542.519.480	93,11	100,00	114.091.620
	4 Verifikasi dan Penilaian Kelayakan Puskesmas untuk Registrasi Puskesmas	149.999.300	74.983.200	74.953.200	99,96	100,00	30.000
	5 Pengelolaan Rujukan dan Rujuk Balik	149.999.750	74.959.300	74.859.300	99,87	100,00	100.000
	<b>2 Kegiatan Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi</b>	<b>149.999.850</b>	<b>78.363.000</b>	<b>78.163.000</b>	<b>99,74</b>	<b>100,00</b>	<b>200.000</b>
	1 Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	149.999.850	78.363.000	78.163.000	99,74	100,00	200.000

<b>4</b>	<b>BIDANG KEFARMASIAN, SARANA ALAT KESEHATAN DAN SDM KESEHATAN</b>	<b>5.037.502.152</b>	<b>4.357.903.752</b>	<b>3.862.846.893</b>	<b>88,64</b>	<b>100,00</b>	<b>495.056.859</b>
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	3.777.404.000	3.702.404.000	3.214.067.240	<b>86,81</b>	<b>100,00</b>	488.336.760
	<b>1 Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi</b>	<b>3.777.404.000</b>	<b>3.702.404.000</b>	<b>3.214.067.240</b>	<b>86,81</b>	<b>100,00</b>	<b>488.336.760</b>
	1 Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman Serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	375.127.072	300.127.072	296.477.800	<b>98,78</b>	<b>100,00</b>	3.649.272
	2 Pengadaan Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	3.402.276.928	3.402.276.928	2.917.589.440	<b>85,75</b>	<b>100,00</b>	484.687.488
	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	659.999.919	356.945.669	354.864.670	<b>99,42</b>	<b>100,00</b>	2.080.999
	<b>1 Kegiatan Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK)</b>	<b>659.999.919</b>	<b>356.945.669</b>	<b>354.864.670</b>	<b>99,42</b>	<b>100,00</b>	<b>2.080.999</b>
	1 Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Penerbitan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang Pak	659.999.919	356.945.669	354.864.670	<b>99,42</b>	<b>100,00</b>	2.080.999

	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	600.098.233	298.554.083	293.914.983	98,45	100,00	4.639.100
<b>1</b>	<b>Kegiatan Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi</b>	<b>300.051.400</b>	<b>150.026.450</b>	<b>146.116.450</b>	<b>97,39</b>	<b>100,00</b>	<b>3.910.000</b>
	1 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan	150.000.600	75.000.650	71.400.650	95,20	100,00	3.600.000
	2 Distribusi dan Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	150.050.800	75.025.800	74.715.800	99,59	100,00	310.000
<b>2</b>	<b>Kegiatan Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi</b>	<b>300.046.833</b>	<b>148.527.633</b>	<b>147.798.533</b>	<b>99,51</b>	<b>100,00</b>	<b>729.100</b>
	1 Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	150.046.600	75.671.600	75.341.600	99,56	100,00	330.000
	2 Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	150.000.233	72.856.033	72.456.933	99,45	100,00	399.100
<b>5</b>	<b>BIDANG PENGENDALIAN DAN PENCEGAHAN PENYAKIT, SURVEILANS DAN IMUNISASI</b>	<b>4.349.575.382</b>	<b>4.662.206.662</b>	<b>4.481.490.957</b>	<b>96,12</b>	<b>97,00</b>	<b>180.715.705</b>
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	4.349.575.382	4.662.206.662	4.481.490.957	96,12	97,00	180.715.705

<b>1</b>	<b>Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi</b>	<b>4.349.575.382</b>	<b>4.662.206.662</b>	<b>4.481.490.957</b>	<b>96,12</b>	<b>97,00</b>	<b>180.715.705</b>
1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	618.815.000	399.055.000	387.616.295	97,13	100,00	11.438.705
2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	2.807.437.432	3.231.252.462	3.076.861.758	95,22	96,28	154.390.704
3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	235.482.950	285.262.950	285.262.950	#####	100,00	-
4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Kecanduan NAPZA	100.000.000	49.628.750	49.628.750	#####	100,00	-
5	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	300.000.000	209.216.000	194.814.000	93,12	93,33	14.402.000
6	Investigasi Lanjutan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal oleh Kabupaten/Kota	287.840.000	487.791.500	487.307.204	99,90	100,00	484.296
<b>UPT LABORATORIUM KESEHATAN</b>		<b>1.730.032.300</b>	<b>3.496.106.300</b>	<b>3.411.928.973</b>	<b>97,59</b>	<b>100,00</b>	<b>84.177.327</b>

	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	659.365.500	1.730.441.000	1.649.191.002	95,30	100,00	81.249.998
<b>1</b>	<b>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>42.600.000</b>	<b>173.076.000</b>	<b>166.894.644</b>	<b>96,43</b>	<b>100,00</b>	<b>6.181.356</b>
	1 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	42.600.000	173.076.000	166.894.644	96,43	100,00	6.181.356
<b>2</b>	<b>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>41.240.000</b>	<b>29.580.000</b>	<b>29.572.461</b>	<b>99,97</b>	<b>100,00</b>	<b>7.539</b>
	1 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	41.240.000	29.580.000	29.572.461	99,97	100,00	7.539
<b>3</b>	<b>Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>78.406.000</b>	<b>579.000.000</b>	<b>572.593.450</b>	<b>98,89</b>	<b>100,00</b>	<b>6.406.550</b>
	2 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	78.406.000	579.000.000	572.593.450	98,89	100,00	6.406.550
<b>4</b>	<b>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>349.175.000</b>	<b>399.175.000</b>	<b>336.499.204</b>	<b>84,30</b>	<b>100,00</b>	<b>62.675.796</b>
	1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	349.175.000	399.175.000	336.499.204	84,30	100,00	62.675.796
<b>5</b>	<b>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>147.944.500</b>	<b>549.610.000</b>	<b>543.631.243</b>	<b>98,91</b>	<b>100,00</b>	<b>5.978.757</b>
	1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan	39.000.000	549.610.000	543.631.243	84,92	100,00	5.127.709
			34.000.000	28.872.291			

	Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						
2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	30.000.000					-
3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	78.944.500	515.610.000	514.758.952	99,83	100,00	851.048
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.070.666.800	1.765.665.300	1.762.737.971	99,83	100,00	2.927.329
1	Kegiatan Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	1.070.666.800	1.765.665.300	1.762.737.971	99,83	100,00	2.927.329
1	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	1.070.666.800	1.765.665.300	1.762.737.971	99,83	100,00	2.927.329
	<b>UPT BADAN PENDIDIKAN PELATIHAN KESEHATAN</b>				96,98	100,00	26.718.457
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1.125.019.981	885.503.267	858.784.810			
		913.674.024			96,62	100,00	26.718.457
1	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	26.640.000	790.963.267	764.244.810	#####	100,00	-
1	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	26.640.000	64.560.000	64.560.000	#####	100,00	-
2	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		64.560.000	64.560.000	99,29	100,00	557.717
		66.572.150					
			78.240.390	77.682.673			

	1 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	66.572.150	78.240.390	77.682.673	<b>99,29</b>	<b>100,00</b>	557.717
	<b>3 Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>22.500.000</b>	<b>30.834.500</b>	<b>30.146.000</b>	<b>97,77</b>	<b>100,00</b>	<b>688.500</b>
	1 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	22.500.000	30.834.500	30.146.000	<b>97,77</b>	<b>100,00</b>	688.500
	<b>4 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>394.999.089</b>	<b>287.366.158</b>	<b>263.551.844</b>	<b>91,71</b>	<b>100,00</b>	<b>23.814.314</b>
	1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	394.999.089	287.366.158	263.551.844	<b>91,71</b>	<b>100,00</b>	23.814.314
	<b>5 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>402.962.785</b>	<b>329.962.219</b>	<b>328.304.293</b>	<b>99,50</b>	<b>100,00</b>	<b>1.657.926</b>
	1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	33.770.000	76.970.000	75.503.275	<b>98,09</b>	<b>100,00</b>	1.466.725
	2 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	248.672.785	194.312.219	194.181.568	<b>99,93</b>	<b>100,00</b>	130.651
	3 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	120.520.000	58.680.000	58.619.450	<b>99,90</b>	<b>100,00</b>	60.550

	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	211.345.957	94.540.000	94.540.000	#####	100,00	-
<b>1</b>	<b>Kegiatan Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi</b>	<b>211.345.957</b>	<b>94.540.000</b>	<b>94.540.000</b>	<b>#####</b>	<b>100,00</b>	<b>-</b>
1	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	211.345.957	94.540.000	94.540.000	#####	100,00	-
	<b>UPT PUSAT PELAYANAN KESELAMATAN TERPADU</b>	<b>749.999.700</b>	<b>811.034.760</b>	<b>790.836.581</b>	<b>97,51</b>	<b>100,00</b>	<b>20.198.179</b>
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	232.395.450	216.556.350	214.452.491	99,03	100,00	2.103.859
<b>1</b>	<b>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>45.240.000</b>	<b>38.760.000</b>	<b>37.100.000</b>	<b>95,72</b>	<b>100,00</b>	<b>1.660.000</b>
1	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	45.240.000	38.760.000	37.100.000	95,72	100,00	1.660.000
<b>2</b>	<b>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>92.176.700</b>	<b>90.103.400</b>	<b>90.103.400</b>	<b>#####</b>	<b>100,00</b>	<b>-</b>
1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	92.176.700	90.103.400	90.103.400	#####	100,00	-
<b>3</b>	<b>Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>			<b>-</b>
1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung						

	Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						
<b>4</b>	<b>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>3.998.750</b>	<b>2.112.950</b>	<b>1.669.091</b>	<b>78,99</b>	<b>100,00</b>	<b>443.859</b>
	1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	3.998.750	2.112.950	1.669.091	78,99	100,00	443.859
<b>5</b>	<b>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>90.980.000</b>	<b>85.580.000</b>	<b>85.580.000</b>	<b>#####</b>	<b>100,00</b>	<b>-</b>
	1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	68.000.000	68.000.000	68.000.000	#####	100,00	-
	2 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	22.980.000	17.580.000	17.580.000	#####	100,00	-
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	517.604.250	594.478.410	576.384.090	96,96	100,00	18.094.320
<b>1</b>	<b>Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi</b>	<b>517.604.250</b>	<b>594.478.410</b>	<b>576.384.090</b>	<b>96,96</b>	<b>100,00</b>	<b>18.094.320</b>

1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/Berpotensi Bencana	99.247.450	51.254.850	49.050.930	<b>95,70</b>	<b>100,00</b>	2.203.920
2	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	250.000.000	458.771.260	445.871.260	<b>97,19</b>	<b>100,00</b>	12.900.000
3	Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan	168.356.800	84.452.300	81.461.900	<b>96,46</b>	<b>100,00</b>	2.990.400
<b>JUMLAH ANGGARAN DINAS KESEHATAN</b>		<b>251.177.577.389</b>	<b>263.541.121.342</b>	<b>251.719.859.512</b>	<b>95,51</b>	<b>99,41</b>	<b>11.821.261.830</b>



### 3.3 Inovasi

#### Sereal Kelor

#### Konsep Dasar Sereal Kelor

##### a) Karakteristik Kelor

Kelor (*Moringa oleifera*) dikenal sebagai tanaman dengan nilai gizi tinggi yang berperan penting dalam mendukung ketahanan pangan dan peningkatan status gizi masyarakat. Daun kelor kaya akan nutrisi penting yang mencakup protein, vitamin, mineral, dan senyawa bioaktif, menjadikannya sumber pangan ideal untuk mengatasi masalah gizi, terutama di wilayah yang rawan bencana atau kekurangan gizi.

##### b) Kandungan Nutrisi Utama Daun Kelor

###### Protein:

Daun kelor kering mengandung sekitar 27 gram protein per 100 gram, yang lebih tinggi dibandingkan kebanyakan sayuran hijau. Kandungan ini juga meliputi 9 asam amino esensial, seperti lisin dan metionin, yang penting untuk pertumbuhan dan perbaikan jaringan tubuh.

(Sumber: FAO, Fuglie L.J., "The Miracle Tree", 2001)

###### Vitamin:

- Vitamin A (Beta-karoten): 6.78 mg per 100 gram daun segar, yang setara dengan sekitar 113% kebutuhan harian. Berperan dalam menjaga kesehatan mata dan kekebalan tubuh.
- Vitamin C: 51.7 mg per 100 gram daun segar, mencakup sekitar 57% kebutuhan harian, membantu meningkatkan kekebalan dan penyerapan zat besi.
- Vitamin E: 3.5 mg per 100 gram daun kering, berfungsi sebagai antioksidan untuk melindungi sel dari kerusakan.
- Vitamin B Kompleks:
  - B1 (Tiamin): 0.06 mg per 100 gram.
  - B2 (Riboflavin): 0.05 mg per 100 gram.
  - B3 (Niasin): 0.8 mg per 100 gram.

(Sumber: Penelitian lokal dan data FAO, 2001)

###### Mineral:

Daun kelor kaya akan kalsium (440 mg per 100 gram), kalium (259 mg per 100 gram), dan zat besi (7 mg per 100 gram). Zat ini penting untuk kesehatan tulang, fungsi otot, dan pembentukan darah.

### **Antioksidan dan Senyawa Bioaktif:**

Mengandung flavonoid, polifenol, dan glukosinolat yang memiliki sifat anti-inflamasi, antioksidan, dan memperkuat sistem imun tubuh.

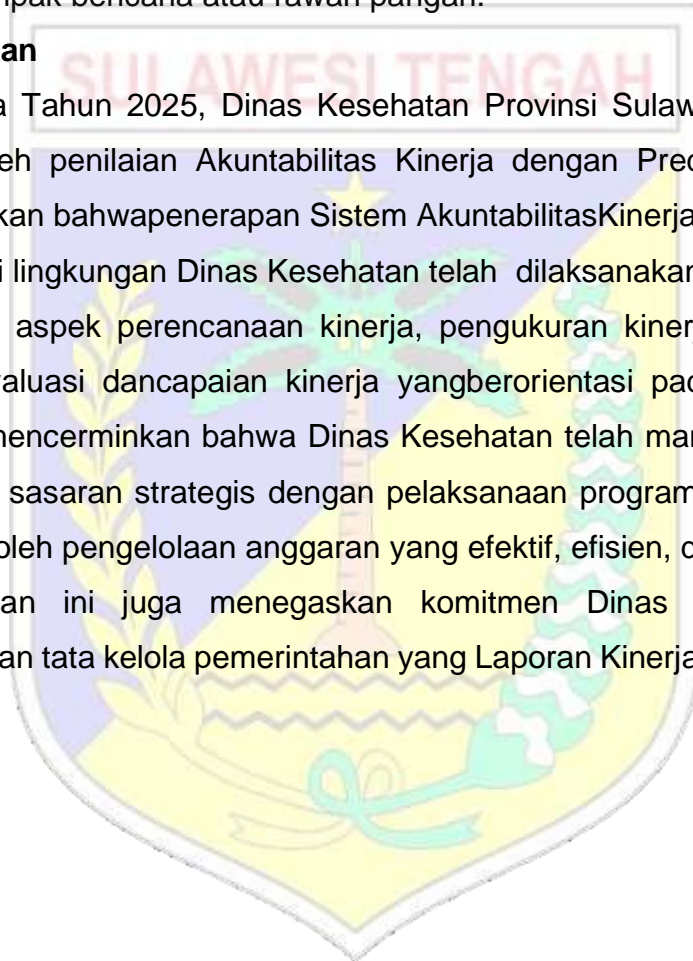
### **c) Manfaat Kelor**

Kandungan nutrisi dalam kelor mendukung berbagai manfaat kesehatan, seperti:

- Mengatasi malnutrisi pada kelompok rentan, seperti anak-anak dan ibu hamil.
- Memperkuat sistem imun untuk melawan penyakit.
- Membantu memperbaiki status kesehatan masyarakat di wilayah terdampak bencana atau rawan pangan.

### **3.4 Penghargaan**

Pada Tahun 2025, Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah berhasil memperoleh penilaian Akuntabilitas Kinerja dengan Predikat A. Capaian ini menunjukkan bahwa penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di lingkungan Dinas Kesehatan telah dilaksanakan secara sangat baik, mulai dari aspek perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, hingga evaluasi dan capaian kinerja yang berorientasi pada hasil. Predikat A tersebut mencerminkan bahwa Dinas Kesehatan telah mampu menyelaraskan tujuan dan sasaran strategis dengan pelaksanaan program dan kegiatan, serta didukung oleh pengelolaan anggaran yang efektif, efisien, dan akuntabel. Selain itu, capaian ini juga menegaskan komitmen Dinas Kesehatan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP).



## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1 Kesimpulan**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah dapat di tarik kesimpulan bahwa :

- i. Tahun 2025 sebagai tahun pertama RPJMD Provinsi Sulawesi, dimana hasil capaian kinerja sasaran yang ditetapkan secara umum belum memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Meskipun demikian, berbagai pencapaian tersebut menggambarkan juga bahwa ada peningkatan dari tahun ke tahun, oleh karena itu komitmen keterlibatan dan dukungan aktif segenap komponen aparatur negara, masyarakat, dunia usaha dan civil society sebagai bagian integral dari sistem pembangunan yang diharapkan.
- ii. Hasil dari analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja, bahwa semua indikator Kesehatan yang disusun telah menunjang capaian kinerja tujuan dan sasaran.
- iii. Selama tahun 2025, Dinas Kesehatan telah mengembangkan inovasi dan menerima Penghargaan.

#### **4.2 Saran/ Strategi kedepannya untuk meningkatkan kinerja**

- a. Meningkatkan kualitas layanan kesehatan yang berdaya saing.
- b. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana
- c. Meningkatkan kualitas layanan kesehatan bagi ibu dan anak.
- d. Meningkatkan penanggulangan stunting
- e. Menerapkan sistem perencanaan, pemrograman, pendanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi yang terpadu.
- f. Mengembangkan sistem manajemen pengelolaan keuangan daerah yang tertib administrasi, efektif, efisien, dan rasional.
- g. Menerapkan standar pelayanan berkualitas dan berstandar internasional.



**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH**  
**DINAS KESEHATAN**

JL. R.A KARTINI NO. 11 Telp ( 0451 ) 421170 – 422343 – 421070 FAKSIMILI (0451) 454646

**PALU 94111**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Wayan Apriani, SKM., M.Epid  
Jabatan : Plt. Kepala Dinas Kesehatan Prov. Sulawesi Tengah

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : Anwar Hafid  
Jabatan : Gubernur Sulawesi Tengah

Selaku atasan langsung **PIHAK PERTAMA** selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

**PIHAK PERTAMA** berjanji :

1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka, mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami;
2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi fisik dan keuangan perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam Sistem Elektronik Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP).

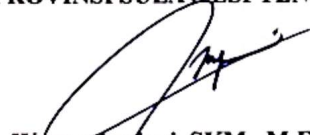
**PIHAK KEDUA** akan melakukan supervise yang diperluhkanserta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dan perjanjian ini dan mengambil Tindakan yang diperlukan dalam pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, 15 Mei 2025

**PIHAK KEDUA**  
**GUBERNUR SULAWESI TENGAH**

**PIHAK PERTAMA**  
**Plt. KEPALA DINAS KESEHATAN**  
**PROVINSI SULAWESI TENGAH**

Anwar Hafid

  
Wayan Apriani, SKM., M.Epid  
NIP. 19700417 199312 2 001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025  
UNIT KINERJA**

No	Sasaran Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat	Usia Harapan Hidup	71.64

No	Program	Anggaran (Rp)	Keterangan
1	Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	184,949,692,916.34	APBD
2	Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	66,177,227,599.00	APBD
3	Program peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan	298,554,083.00	APBD
4	Program sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman	356,945,669.06	APBD
5	Program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	369,881,000	APBD
	<b>JUMLAH</b>	<b>252,152,301,267.40</b>	

Palu, 15 Mei 2025

**PIHAK KEDUA  
GUBERNUR SULAWESI TENGAH**

Anwar Hafid

**PIHAK PERTAMA  
Pit. KEPALA DINAS KESEHATAN  
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

  
Wayan Apriani, SKM., M.Epid  
NIP. 19700417 199312 2 001



PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH  
**DINAS KESEHATAN**

Jalan R.A.Kartini No. 11 Telp. (0451) 421070,421170,421028 Faksimili (0451) 421170 Palu  
94111

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Wayan Apriani, SKM,M.Epid  
Jabatan : Sekretaris Dinas Kesehatan Prov. Sulawesi Tengah

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : dr. I Komang Adi Sujendra,Sp.PD  
Jabatan : Kepala Dinas Kesehatan Prov. Sulawesi Tengah

Selaku atasan langsung **PIHAK PERTAMA** selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

**PIHAK PERTAMA** berjanji :

1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka, mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami;
2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi fisik dan keuangan perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam Sistem Elektronik Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP).

**PIHAK KEDUA** akan melakukan supervise yang diperluhkanserta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dan perjanjian ini dan mengambil Tindakan yang diperlukan dalam pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, 30 Januari 2025

**PIHAK KEDUA**  
**KEPALA DINAS KESEHATAN**  
**PROV. SULAWESI TENGAH**

**Dr. I Komang Adi Sujendra,Sp.PD**  
NIP. 19650325 199003 1 014

**PIHAK PERTAMA**  
**SEKRETARIS DINAS KESEHATAN**  
**PROV. SULAWESI TENGAH**

**Wayan Apriani, SKM,M.Epid**  
NIP. 19700417 199312 2 001

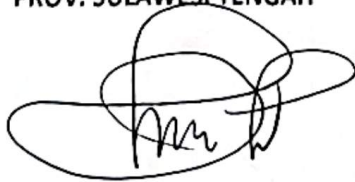
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

UNIT KINERJA

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Tata Kelola Reformasi Birokrasi General Perangkat Daerah		
2		Nilai SAKIP Dinas Kesehatan	83
3		Persentase Pencapaian IKU Dinas Kesehatan	95%
4		Persentase Pemenuhan Dokumen MR dan Probis	100%
5		Persentase Hasil Tindaklanjut Rekomendasi (TLHP) BPK dan APIP	90%
6		Persentase Capaian Realisasi APBD Perangkat Daerah	100%

Palu, 30 Januari 2025

PIHAK KEDUA  
KEPALA DINAS KESEHATAN  
PROV. SULAWESI TENGAH



Dr. I Komang Adi Sujendra, Sp.PD  
NIP. 19650325 199003 1 014

PIHAK PERTAMA  
SEKRETARIS DINAS KESEHATAN  
PROV. SULAWESI TENGAH



Wayan Apriani, SKM, M.Epid  
NIP. 19700417 199312 2 001



**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH**  
**DINAS KESEHATAN DAERAH**

Jl. R A Kartini Nomor 11 Telp. (0451) 421070; 454646 Faksimili (0451) 454646  
PALU 94111

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Nurlia Lahay,SKM  
Jabatan : Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : Wayan Apriani, SKM,M.Epid  
Jabatan : Sekretaris Dinas Kesehatan Prov. Sulawesi Tengah

Selaku atasan langsung **PIHAK PERTAMA** selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

**PIHAK PERTAMA** berjanji :

1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka, mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami;
2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi fisik dan keuangan perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam Sistem Elektronik Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP).

**PIHAK KEDUA** akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dan perjanjian ini dan mengambil Tindakan yang diperlukan dalam pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, 30 Januari 2025

**PIHAK KEDUA**  
**PEJABAT ESELON 3**

  
Wayan Apriani, SKM,M.Epid  
19700417 199312 2 001

**PIHAK PERTAMA**  
**PEJABAT ESELON 4**

  
Nurlia Lahay,SKM  
19751117 200502 2 006

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025**  
**UNIT KINERJA**

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya penyelesaian Tindaklanjuti Hasil Pemeriksaan (TLHP)	Persentase Dokumen Pengusulan Gaji dan Tunjangan yang Ditindaklanjuti Menjadi SPM	100%
2		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	
3		Jumlah Dokumen Pelaksanaan Tugas ASN	1
4		Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	
5		Jumlah Dokumen TLHP yang disusun	1
6		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
7		Jumlah laporan keuangan yang tersusun	1
8		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	
9		Persentase Dokumen Pertanggungjawaban yang diverifikasi dan ditindaklanjuti menjadi SPM	100%
10	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	
11		Jumlah Dokumen Rekonsiliasi dan Laporan Barang Milik Daerah	6

13	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	1
----	---	--	---

No	Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Keterangan
1.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	176,437,473,388	APBD
2.	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	4,402,680,000	APBD
3.	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	238,974,500	APBD
4.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKP	135,146,000	APBD
5.	Pengelolaandan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	59,886,000	APBD
6.	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	101,672,500	APBD
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	114,322,000	APBD

Palu, 30 Januari 2025

**PIHAK KEDUA**  
**PEJABAT ESELON 3**

**PIHAK PERTAMA**  
**PEJABAT ESELON 4**

**Wayan Apriani, SKM,M.Epid**  
19700417 199312 2 001

**Nurlia Lahay,SKM**  
19751117 200502 2 006



**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH**  
**DINAS KESEHATAN DAERAH**

Jl. R.A Kartini Nomor 11 Telp. (0451) 421070; 454646 Faksimili (0451) 454646  
PALU 94111

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : PLt. Nurhidayati, SKM.,M.A.P

Jabatan : Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : Wayan Apriani, SKM,M.Epid

Jabatan : Sekretaris Dinas Kesehatan Prov. Sulawesi Tengah

Selaku atasan langsung **PIHAK PERTAMA** selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

**PIHAK PERTAMA** berjanji :

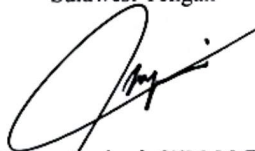
1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka, mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami;
2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi fisik dan keuangan perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam Sistem Elektronik Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP).

**PIHAK KEDUA** akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dan perjanjian ini dan mengambil Tindakan yang diperlukan dalam pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, 30 Januari 2025


**PIHAK KEDUA**

Sekretaris Dinas Kesehatan Provinsi.  
Sulawesi Tengah

  
Wayan Apriani, SKM,M.Epid  
19700417 199312 2 001

**PIHAK PERTAMA**

PLt, Kepala Sub Bagian Kepegawaian  
dan Umum

  
Nurhidayati, SKM.,M.A.P  
198110222008012008

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025**  
**UNIT KINERJA**

No	Sasaran Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1		Jumlah Paket Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	...%
		Persentase Paket Pekerjaan yang diumumkan RUP-nya melalui SIRUP	...%
		Persentase Pencatatan Pake e-Tendering pada SPSE sesuai Pagu RUP	...%
		Persentase Pencatatan Paket e-Purchasing pada Katalog Elektronik	...%
		Persentase Pencatatan paket Non e-Tendering dan e-Purchasing pada SPSE	...%
		Persentase Pencatatan pake transaksional pada e-Kontrak	...%
		Persentase Pencatatan paket transaksional pada Toko Daring	...%
		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
		Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
		Jumlah Bulan yang dipenuhi Kebutuhan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listriknya	12
2	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
3	Meningkatnya pemeliharaan barang milik daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	

No	Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Keterangan
1.	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	150,098,000	APBD
2.	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	182,430,000	APBD
3.	Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	199,996,500	APBD

Palu, 30 Januari 2025

**PIHAK KEDUA**

Sekretaris Dinas Kesehatan Provinsi.  
Sulawesi Tengah



Wayan Apriani, SKM, M.Epid  
19700417 199312 2 001

**PIHAK PERTAMA**

PLt, Kepala Sub Bagian Kepegawaian  
dan Umum



Nurhidayati, SKM., M.A.P  
198110222008012008



**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH**  
**DINAS KESEHATAN**

JL. R.A KARTINI NO. 11 Telp ( 0451 ) 421170 – 422343 – 421070 FAKSIMILI (0451) 454646  
**PALU 94111**

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA**  
**TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**  
**DINAS KESEHATAN PROVINSI SULAWESI TENGAH**  
**TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : dr. Jumriani  
Jabatan : Kepala Bidang Pencegahan dan pengendalian penyakit

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : dr. I Komang Adi Sujendra, Sp.PD  
Jabatan : Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah

Selaku atasan langsung PIHAK PERTAMA selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA pada tahun 2024 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, 30 Januari 2025

**PIHAK KEDUA**

**KEPALA DINAS KESEHATAN**  
**PROVINSI SULTENG**

**dr. I Komang Adi Sujendra, Sp.PD**  
Nip. 19650325 199003 1 014

**PIHAK PERTAMA**

**KEPALA BIDANG PENCEGAHAN DAN**  
**PENGENDALIAN PENYAKIT**

**dr. Jumriani**  
NIP. 19730914 200312 2 002

**PERJANJIAN KINERJA  
DINAS KESEHATAN PROVINSI SULAWESI TENGAH  
TAHUN 2025**

NO	SASARAN INDIKATOR/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terkendalinya Penyakit Menular Di Sulawesi Tengah	Persentase penemuan dan pengobatan kasus TBC (treatment Coverage)	70%
2.	Terkendalinya Penyakit Menular Di Sulawesi Tengah	Persentase kasus HIV yang di temukan dan di tindaklanjuti pada kelompok berisiko	70%
3.	Terkendalinya Penyakit Menular Di Sulawesi Tengah	Rasio Penemuan Kasus Baru Kusta	<5/100.000 Penduduk
4.	Menurunnya Angka Kematian Karena Pneumonia Pada Balita	Persentase Tatalaksana Kasus Pneumonia Anak Sesuai Standar	100%
5.		Persentase Tatalaksana Kasus Pneumonia Anak Sesuai Standar	100%
6.	Terwujudnya Pelayanan Kesehatan dan Penatalaksanaan kasus Hepatitis B sesuai standart	Persentase Tatalaksana Kasus Sesuai Standar Hepatitis B dan atau C	100%
7.	Terwujudnya Pelayanan Kesehatan dan Penatalaksanaan Kasus Diare Sesuai Standar	Persentase Tatalaksana Kasus Diare Sesuai Standar	100%
8.	Terwujudnya Eliminasi Malaria Provinsi Sulawesi Tengah	Persentase Kab/Kota Yang Memenuhi syarat eliminasi Malaria	80,00%
9.	Terwujudnya Peningkatan Upaya Pencegahan dan Pengendalian DBD Provinsi Sulawesi Tengah	Persentase kabupaten/Kota yang Insiden Rate < 10 per 100.000 penduduk	23%
10.	Turunnya Angka Kasus Kronis Filariasis	(Persentase Kab/Kota yang mencapai eliminasi Filariasis)	38,50%
11.	Terwujudnya Eliminasi Rabies Provinsi Sulawesi Tengah	Persentase Kasus GHPR yang ditangani sesuai standar	100%
12.	Terwujudnya Eliminasi Schistosomiasis	Persentase Desa yang 0 Kasus schistosomiasis pada Manusia, Keong dan Tikus	100%
13.	Terwujudnya Pengendalian Vektor Terpadu	Persentase Kab/Kota yang dibina melaporan	100%

		pengendalian Vektor terpadu	
14.	Terwujudnya Eradikasi Frambusia Provinsi Sulawesi Tengah	Persentase Kab/Kota yang dibina Pencegahan dan pengendalian Eradikasi (bebas) frambusia	23%
15.	Terkendalinya penyakit Tidak Menular di Wilayah Sulawesi Tengah	(Persentase Kab/kota yang menerapkan upaya Pencegahan dan penanggulangan penyakit tidak menular)	100%

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	
		APBD	APBN
1.	Program pemenuhan paya kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan masyarakat	Rp.4,349,575,382	
	<b>Jumlah</b>	<b>Rp.4,349,575,382</b>	

Palu, 30 Januari 2025

**PIHAK KEDUA**

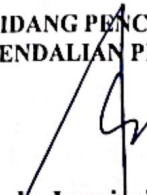
**KEPALA DINAS KESEHATAN  
PROVINSI SULTENG**



**dr. I Komang Adi Sujendra, Sp.PD**  
Nip. 19650325 199003 1 014

**PIHAK PERTAMA**

**KEPALA BIDANG PENCEGAHAN DAN  
PENGENDALIAN PENYAKIT**



**dr. Jumriani**  
Nip. 19730914 200312 2 002



**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH**  
**DINAS KESEHATAN DAERAH**

Jl. R.A Kartini Nomor 11 Telp. (0451) 421070; 454646 Faksimili (0451) 454646  
PALU 94111

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : dr. Moh. Ikbal

Jabatan : Kepala Seksi Pengendalian dan Pencegahan Penyakit

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : dr. Jumriani

Jabatan : Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

Selaku atasan langsung **PIHAK PERTAMA** selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

**PIHAK PERTAMA** berjanji :

1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka, mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami;
2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi fisik dan keuangan perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam Sistem Elektronik Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP).

**PIHAK KEDUA** akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dan perjanjian ini dan mengambil Tindakan yang diperlukan dalam pemberian penghargaan dan sanksi.

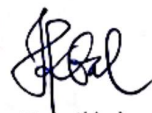
Palu, 30 Januari 2025

**PIHAK KEDUA**  
**KEPALA BIDANG PENGENDALIAN**  
**DAN PENCEGAHAN PENYAKIT**

  
dr. Jumriani

19730914 200312 2 002

**PIHAK PERTAMA**  
**KEPALA SEKSI PENGENDALIAN**  
**DAN PENCEGAHAN PENYAKIT MENULAR**

  
dr. Moh. Ikbal

19741229 201412 1 001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025**  
**UNIT KINERJA**

No	Sasaran Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Pemantauan berkala Penemuan Penderita Kusta	1. Jumlah penderita yang ditemukan dan dipantau	300 Orang
2	Tersusunnya Laporan Distribusi Obat Kusta Per Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Distribusi Obat Kusta yang disusun	13 Laporan
3	Terlaksananya On the job training cluster puskesmas	2. Jumlah orang yang dilakukan on the job training	50 Orang
4	Terlaksananya Pembinaan Tatalaksana Kasus Kusta	Jumlah Kabupaten/Kota yang dilakukan pembinaan	13 Kab.Kota
5	Terlaksananya Pendampingan pemberian obat pencegahan kusta	Jumlah Kabupaten/Kota yang dilakukan pendampingan	13 Kab.Kota
6	Pendampingan Skrining umur < 15 tahun di Kab./Kota	Jumlah Kabupaten/Kota yang dilakukan pendampingan skrining kusta di usia < 15 tahun	13 Kab.Kota
7	Terbinanya Kabupaten Kota terkait Tatalaksana Kasus Pneumonia Balita	Jumlah Kabupaten Kota yang terbina	13 Kab.Kota
8	Terlaksananya Penyusunan Laporan Program ISPA	Jumlah Laporan tahunan ISPA	1 Laporan
9	Terlaksananya Pengalokasian Logistik Program ISPA (ARI soundtimer, pulse oximeter)	Jumlah Laporan pengalokasian Logistik Program ISPA	1 Laporan
10	Tersedianya data evaluasi capaian indikator program ISPA kab/kota	Jumlah laporan evaluasi capaian indikator program ISPA kab/kota	12 laporan
11	Terlaksananya pembinaan teknis program ISPA	OJT Tatalaksana Program ISPA, Monev	13 Kab./Kota
12	Pendampingan Deteksi dini Hepatitis B dan atau C (DDHBC) pada ibu hamil di 13 Kab/Kota	Jumlah Kabupaten/Kota yang di dampingi melaksanakan Deteksi dini Hepatitis B dan atau C (DDHBC) pada ibu hamil	13 Laporan
13	Terlaksananya penyusunan laporan program hepatitis	Jumlah laporan tahunan hepatitis1	1 Laporan
14	Teralokasiannya logistik program Hepatitis (RDT HBsAg, RDT anti HBS dan HBIG) untuk populasi beresiko (nakes/nasis ke Kab/Kota	13 Kab/kota mendapatkan logistik program Hepatitis1	1 Laporan
15	Terlaksananya pembinaan teknis program hepatitis	OJT manajemen dan tatalaksana pembinaan program, MONEV1	13 Kab.Kota
16	Terlaksananya penyaluran zinc dan oralit	Jumlah kab/kota yang mendapatkan penyaluran zinc dan oralit	13 Kab.Kota
17	Terlaksananya Monev tata laksana kasus diare sesuai standar	Jumlah kab/kota yang melaksanakan tata laksana yang sesuai standar	13 Kab.Kota
18	Terlaksananya Survey Vektor Malaria di Kabupaten / Kota	Laporan Hasil Survey Vektor Malaria	13 Laporan
19	Terlaksananya Assesment Eliminasi Malaria	Jumlah Kab/Kota yang di eliminasi Malaria	7 Kab
20	Terlaksananya Penyelidikan Epidemiologi 1-2-5 Malaria	Laporan Hasil Penyelidikan Epidemiologi 1-2-5 Malaria	7 Laporan
21	Terlaksananya Pencatatan dan Pelaporan e-Sismal yang berkualitas	Jumlah Dokumen Pencatatan dan Pelaporan e-Sismal yang berkualitas	1 Dokumen
22	Terlaksananya Pemberantasan Sarang Nyamuk Melalui Fogging Fokus	Jumlah Dukungan Fogging Terhadap Kasus DBD	13 Kali Fogging


	arbovirosis/DBD	DBD	Kab.Kota
24	Terlaksananya pembinaan program pengendalian arbovirosis/DBD	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengendalian penyakit arbovirosis/DBD	13 Kab.Kota
25	Terlaksananya fasilitasi monitoring assignment pencapaian IR DBD	Jumlah Kab/Kota yang di monitoring terkait assement IR DBD	13 Kab.Kota
26	Terlaksananya pengendalian vektor penyakit DBD melalui survei jentik	Pelaksanaan survei jentik	13 Kab.Kota
27	Terlaksananya pengendalian vektor melalui fogging focus	pelaksanaan fogging focus	24 Locus
28	Terlaksananya Pedistribusian bahan Abate program DBD	Jumlah Kab/Kota yang mendapatkan pendistribusian logistik Abate	13 Kab.Kota
29	Terlaksananya Survey Darah Jari Oleh Tim di 3 Lokasi Yang Belum Eliminasi Filariasis	Jumlah Kab / Kota yang dilakukan Survey Darah Jari	Laporan
30	Terlaksananya Pelaporan Filariasis dan kecacingan	Jumlah Laporan	Laporan
31	Terlaksananya pembinaan progtram pengendalian arbovirosis/DBD	Jumih Instrumen Monev4	Instrumen
32	Terlaksananya Pengelolaan Pendistribusian Tablet dan sirup Abdenazol dan DEC	Jumlah Kab/Kota yang mendapatkan obat Tablet Albendazol dan DEC	9 Kab.Kota
33	Terlaksanya Pendampingan dan Ferifikasi Kasus Filariasis	Jumlah Kab/Kota yang mendapatkan pendampingan Verifikasi kasus filariasis	13 Kab.Kota
34	Terlaksananya Tata Laksana Manajemen Kasus Kronis	Jumlah Kab/Kota yang melaksanakan Tata Laksana Manajemen Kasus Kronis	9 Kab.Kota
35	Terlaksananya penanganan kasus gigitan hewan penular rabies	Persentase Kasus GHPR yang ditanganidan dilaporkan	100
36	Terlaksananya pelaporan GHPR dan kasus Rabies 45,0	Jumlah laporan	13 Kab.Kota
37	Terlaksananya pendampingan kewaspadaan dini terhadap peningkatan kasus dan KLB Rabies di kab/kota555	rabies center yang dibentuk	8 Kab.
38	Terlaksananya pendampingan dan Verivikasi Rumor kasus Rabies	jumlah kab/kota yang endemis rabies	13 Kab.Kota
39	Terlaksananya penyebarluasan informasi dengan pengembangan media KIE	tersedianya media KIE	Media KIE
40	terlaksananya OJT tatalaksana kasus GHPR dan tatalaksana kasus Rabies	pengelola Rabies / petugas Rabies center	13 Kab.Kota
41	Terlaksananya Pengobatan Schistosomiasis melalui Pengobatan Massal.	Prosentase Pengobatan penderita Schistosomiasis di wilayah Lindu, Napu dan Bada	90%
42	Terlaksananya Pelaporan Schistosomiasis	Jumlah Kab/Kota yang melaporkan schistosomiasis	2 kab
43	Terlaksananya Pemantauan Fokus keong4	Jumlah Fokus Keong yang diamati	132 Fokus
44	Terlaksananya Penyemprotan Fokus Keong	Jumlah Fokus keong Positif yang di interfensi	85 Fokus
45	Terlaksananya Pengobatan masal POPM Schisto	Prosesntase Jumlah orang yang di Obati	90
46	Terlaksananya pembinaan pengendalian vektor	jumlah instrumen kegiatan	1 Instrumen
47	Terlaksananya OJT silantor dan Indikator kinerja keglatan (IKK)	Jumlah orang yang dilakukan on the job training	40 Orang
48	Terlaksananya survei vektor dan binatang pembawa penyakit	Jumlah lokasi surevi1	120 Lokasi
49	Terlaksananya pendampingan pengendalian vektor secara fisik kimia biologi	Jumlah pendampingan pengendalian vektor	13 Kab. Kota
50	Terlaksananya pemetaan daerah lokus vektor	Jumlah lokasi yang dipetakan	10 Lokasi

51	Terlaksananya uji resistensi vektor terhadap insektisida	jumlah lokasi kegiatan	10 Lokus
52	Terlaksananya survei Leptospirosis	Jumlah fokus yang di survei	10 Lokasi
53	Terlaksananya Skrining untuk memastikan tidak adanya kasus penularan frambusia	Jumlah Kab/Kota Yang dilakukan Zeroo Kasus.	3 Kab.
54	Terlaksananya pelaporan prgoram frambusia	Jumlah Kab/Kota Yang Melaporkan Zeroo Kasus.	13 kab. Kota
55	Terlaksananya pendistribusian RDT Frambusia	Jumlah Kab/Kota yang mendapatkan logistik frambusian	6 Kab.
56	Terlaksananya Assignment eradikasi Frambusia	Terbentuknya Tim Eradikasi Frambusia	2 Kab
57	Terlaksananya pembentukan tim eradikasi Frambusia	Jumlah pendampingan tim eradikasi Frambusia	2 Tim


No	Program	Anggaran (Rp)	Keterangan
1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	999.999.882	APBD

Palu, 30 Januari 2025

**PIHAK KEDUA**  
**KEPALA BIDANG PENGENDALIAN**  
**DAN PENCEGAHAN PENYAKIT**

  
 dr. Jumriani  
 19730914 200312 2 002

**PIHAK PERTAMA**  
**KEPALA SEKSI PENGENDALIAN**  
**DAN PENCEGAHAN PENYAKIT MENULAR**

  
 dr. Moh. Iqbal  
 197412292014121001



**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH**  
**DINAS KESEHATAN DAERAH**

Jl. R.A Kartini Nomor 11 Telp. (0451) 421070; 454646 Faksimili (0451) 454646  
PALU 94111

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Evi Hinelyo, SKM., M.A.P

Jabatan : Kepala Seksi Penyakit Tidak Menular, Kesehatan Jiwa dan Napza

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : dr. Jumriani

Jabatan : Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

Selaku atasan langsung **PIHAK PERTAMA** selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

**PIHAK PERTAMA** berjanji :

1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka, mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami;
2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi fisik dan keuangan perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam Sistem Elektronik Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP).

**PIHAK KEDUA** akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dan perjanjian ini dan mengambil Tindakan yang diperlukan dalam pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, 30 Januari 2025

**PIHAK KEDUA**  
**KEPALA BIDANG PENGENDALIAN**  
**DAN PENCEGAHAN PENYAKIT**

dr. Jumriani  
19730914 200312 2 002

**PIHAK PERTAMA**  
**KEPALA SEKSI PTM, KESWA DAN NAPZA**  
**DINAS KESEHATAN PROVINSI SULAWESI TENGAH**

Evi Hinelyo, SKM., M.A.P  
19730825 199303 2 004

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025**  
**UNIT KINERJA**

No	Sasaran Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terdampinginya Kab/Kota dalam Skrining PTM Prioritas	Jumlah Kab/Kota yang mendapatkan Pendampingan Skrining PTM Prioritas	Terdampinginya Kab/Kota dalam Skrining PTM Prioritas
2	Tersosialisasinya konseling Upaya Berhenti Merokok (UBM) bagi Petugas Puskesmas	Jumlah Petugas Puskesmas yang ditingkatkan kapasitasnya dalam konseling Upaya Berhenti Merokok (UBM)	Tersosialisasinya konseling Upaya Berhenti Merokok (UBM) bagi Petugas Puskesmas
3	Terevaluasinya Kab/Kota terkait implementasi kawasan tanpa rokok ditingkat kecamatan dan desa	Jumlah Kab/kota yang di evaluasi terkait implementasi kawasan tanpa rokok ditingkat kecamatan dan desa	Terevaluasinya Kab/Kota terkait implementasi kawasan tanpa rokok ditingkat kecamatan dan desa
4	Tersosialisasinya dashboard e-monev KTR pada petugas Puskesmas	Jumlah petugas puskesmas yang ditingkatkan pengetahuannya tentang dashboard e-monev KTR	Tersosialisasinya dashboard e-monev KTR pada petugas Puskesmas
5	Cakupan merokok penduduk usia 10-18thn	Persentase merokok penduduk usia 10-18thn	Cakupan merokok penduduk usia 10-18thn
6	Terevaluasinya Puskesmas yang melaksanakan pelayanan terpadu (PANDU) PTM	Jumlah Puskesmas yang dievaluasi terkait pelayanan terpadu (PANDU) PTM	Terevaluasinya Puskesmas yang melaksanakan pelayanan terpadu (PANDU) PTM
7	Terbimbingnya petugas Puskesmas terkait skrining Kesehatan jiwa melalui Aplikasi SIMKESWA dan SIJIWA	Jumlah petugas Puskesmas yang dibimbing tentang Aplikasi SIMKESWA dan SIJIWA	Terbimbingnya petugas Puskesmas terkait skrining Kesehatan jiwa melalui Aplikasi SIMKESWA dan SIJIWA

No	Program	Anggaran (Rp)	Keterangan
1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	300,000,000	APBD
2	BOK	623,026,000	APBD
3	DBCHT	536,466,150	APBD
<b>Total</b>		<b>Rp. 1,459,492,150</b>	

Palu, 30 Januari 2025

**PIHAK KEDUA**  
**KEPALA BIDANG PENGENDALIAN**  
**DAN PENCEGAHAN PENYAKIT**



dr. Jumriani  
19730914 200312 2 002

**PIHAK PERTAMA**  
**KEPALA SEKSI PTM, KESWA DAN NAPZA**  
**DINAS KESEHATAN PROVINSI SULAWESI**  
**TENGAH**



Evi Hinele, SKM., M.A.P  
19730825 199303 2 004



PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH  
DINAS KESEHATAN

Jalan R.A.Kartini No. 11 Telp. (0451) 421070,421170,421028 Faksimili (0451) 421170 Palu 94111

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Hestiwati, SKM, M.Kes

Jabatan : Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : dr. I Komang Adi Sujendra, Sp.PD

Jabatan : Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah

Selaku atasan langsung **PIHAK PERTAMA** selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

**PIHAK PERTAMA** berjanji :

1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka, mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami;
2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi fisik dan keuangan perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam Sistem Elektronik Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP).

**PIHAK KEDUA** akan melakukan supervise yang diperluhkanserta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dan perjanjian ini dan mengambil Tindakan yang diperlukan dalam pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, 30 Januari 2025

**PIHAK KEDUA**  
KEPALA DINAS KESEHATAN  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

dr. I Komang Adi Sujendra, Sp.PD

**PIHAK PERTAMA**  
KEPALA BIDANG PELAYANAN KESEHATAN

Hestiwati, SKM, M.Kes  
NIP. 19780522 200804 2 001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025**

**UNIT KINERJA**

No	Sasaran Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya mutu alat Kesehatan Pada Fasyankes di kab/Kota	Persentase Fasilitas Kesehatan Dasar Yang Ditingkatkan Kualitas sediaan Alat Kesehatan	90%
		persentase RS milik Pemerintah yg memenuhi sarana, Prasarana, Dan Alat Kesehatan Sesuai Standar	90%
		Persentase Produk alat Kesehatan dan PKRT yg diuji dan memenuhi persyaratan Sesuai Standar	100%
		Persentase PAK cabang yang Memenuhi Ketetapan perizinan Berusaha Sesuai Standar	95%
		Persentase PAK cabang yang Menerapkan CDAKB yang sesuai standar	90%
2	Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan	Persentase RS yang Terakreditasi	100%
		Persentase RS yang Terakreditasi	100%
		Persentase Kab/Kota Dengan Kesiapan Akses Layanan Rujukan	60%
		Persentase faskes lainnya yang terakreditasi	100%
		Persentase penduduk yang mendapatkan jaminan Kesehatan	100%
	Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan transfusi darah	Persentase UTD yang melakukan pelayanan sesuai standar	83,33%
	Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Tradisional di Puskesmas	Persentase puskesmas yang melaksanakan Pelayanan Kesehatan Tradisional Akupresure	64,84%
		Persentase puskesmas yang melaksanakan Pelayanan Kesehatan Tradisional Pijat Baduta	44,29%
		Persentase Puskesmas yang Mempunyai Pembinaan Kelompok Asman	32%
		Persentase Puskesmas yang Melakukan Pendataan Penyehat Tradisional	33,3%


No	PROGRAM	Anggaran (Rp)
		APBN
	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya kesehatan Masyarakat	Rp. 42,549,998,300
	a. Kegiatan penyediaan layanan kesehatan untuk UKP rujukan UKM dan UKM rujukan tingkat daerah provinsi	Rp. 42,399,998,450
	b. Kegiatan penerbitan izin rumah sakit kelas B dan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat daerah provinsi	Rp. 149,999,850

PIHAK KEDUA  
KEPALA DINAS KESEHATAN  
PROVINSI SULAWESI TENGAH



dr. I Komang Adi Sujendra, Sp.PD  
NIP. 19650325 199003 1 014

Palu, 30 Januari 2025  
PIHAK PERTAMA  
KEPALA BIDANG PELAYANAN KESEHATAN



Hestiwati, SKM, M.Kes  
NIP. 19780522 200804 2 001



**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH**  
**DINAS KESEHATAN**

Jalan.R.A Kartini Nomor 11 Telepon (0451) 421170,421070 Palu 94111

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Fatma A. Deu.SKM.,M.Si  
Jabatan : Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan Dinas Kesehatan  
Provinsi Sulawesi Tengah

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : Hestiwati, SKM.,M,Kes  
Jabatan : Kepala Bidang Pelayanan kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah

Selaku atasan langsung **PIHAK PERTAMA** selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**


**PIHAK PERTAMA** berjanji :

1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka, mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami;
2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi fisik dan keuangan perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam Sistem Elektronik Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP).


**PIHAK KEDUA** akan melakukan supervise yang diperluhkanserta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dan perjanjian ini dan mengambil Tindakan yang diperluhkan dalam pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, 30 Januari 2025

**PIHAK KEDUA**  
**KEPALA BIDANG**  
**PELAYANAN KESEHATAN**  
**DINAS KESEHATAN PROVINSI**  
**SULAWESI TENGAH**

  
Hestiwati, SKM.,M.Kes  
NIP. 19780522 200804 2 001

**PIHAK PERTAMA**  
**KEPALA SEKSI PELAYANAN**  
**KESEHATAN RUJUKAN**  
**PROVINSI SULAWESI TENGAH**

  
Fatma, A. Deu.SKM.,M.Si  
NIP.19720324199703 2 005

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 UNIT KINERJA**

<b>No</b>	<b>Sasaran Kegiatan/Sub Kegiatan</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>
1	Jumlah Laporan pendampingan persiapan akreditasi RS	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan Kesehatan	2 Laporan
2	Jumlah Laporan pemantauan pengukuran indikator nasional mutu RS	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan Kesehatan	12 laporan
3	Jumlah Laporan monitoring dan evaluasi hasil Pelaksanaan Program Perbaikan Strategis (PPS) pasca akreditasi RS	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan Kesehatan	38 Laporan
4	Jumlah Laporan monitoring dan evaluasi penerapan SPM RS	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan Kesehatan	40 Laporan
5	Jumlah Laporan Pendampingan penyelenggaraan Pelayanan Penyakit Prioritas di RS	jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	6 Laporan
6	Jumlah Laporan evaluasi penyelenggaraan program pengembangan layanan prioritas di RS	jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	14 Laporan
7	Jumlah Laporan Monitoring evaluasi Rumah Sakit PONEK	jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	38 Laporan
8	Jumlah Laporan monitoring dan evaluasi penerapan RME di RS	jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	40 Laporan
9	Jumlah Laporan pendampingan penyusunan profil RS	jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	40 Laporan
10	Jumlah Kabupaten yang Mendapatkan Advokasi Penerapan dan pembiayaan telemedicine	jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	3 Kabupaten
11	Jumlah Laporan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan SISRUTE di RS	jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	40 Laporan
12	Jumlah Laporan monitoring dan evaluasi Bulanan data SIRS dan RS Online	jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	12 Laporan
13	Jumlah Laboratorium yang dilakukan monitoring dan evaluasi pengukuran indikator nasional mutu	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan Kesehatan	3 Laboratorium
14	Jumlah RS yang dilakukan monitoring dan evaluasi penerapan KRIS	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	40 RS

15	Persentase Dokumen Permasalahan Klinis yang ditindak lanjuti	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	100%
16	Persentase Penerima Bantuan Iuran yang dibayarkan oleh pemerintah daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	100%
17	Persentase Pekerja Bukan Penerima Upah yang dibayarkan oleh pemerintah daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	100%
18	Jumlah kab/Kota yang dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program jaminan kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	13 Kab/Kota
19	Jumlah Pengelola Program JKN di Puskesmas yang mendapatkan sosialisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1095 Orang
20	Jumlah dokumen laporan program jaminan kesehatan yang dibuat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1 Dokumen
21	Jumlah Laporan pendampingan persiapan akreditasi RS	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan Kesehatan	2 Laporan
22	Jumlah Laporan pemantauan pengukuran indikator nasional mutu RS	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan Kesehatan	12 laporan
23	Jumlah Laporan monitoring dan evaluasi hasil Pelaksanaan Program Perbaikan Strategis (PPS) pasca akreditasi RS	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan Kesehatan	38 Laporan


NO	PROGRAM	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN
	Pemenuhan upaya Kesehatan program dan upaya Kesehatan masyarakat	a. Penyediaan jaminan Kesehatan masyarakat	RP. 40,149,999,800
		b. Pengelolaan rujukan dan rujuk balik	RP. 149,999,750
		Penerbitan izin rumah sakit kelas B dan fasilitas pelayanan Kesehatan Tk. Daerah Provinsi	
		a. Peningkatan mutu pelayanan kesehatan	RP. 149,999,850
<b>TOTAL</b>			<b>Rp. 449.999,400</b>

Palu, 30 Januari 2025

**PIHAK KEDUA**  
**KEPALA BIDANG**  
**PELAYANAN KESEHATAN**  
**PROVINSI SULAWESI TENGAH**

  
Hestiawati, SKM., M.Kes  
NIP. 19780522 200804 2 001

**PIHAK PERTAMA**  
**KEPALA SEKSI PELAYANAN**  
**KESEHATAN DINAS KESEHATAN**  
**PROVINSI SULAWESI TENGAH**

  
Fatma, A. De, SKM., M.Si  
NIP. 19720324 199703 2 005



**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH**  
**DINAS KESEHATAN**

Jalan.R.A Kartini Nomor 11 Telepon (0451) 421170,421070 Palu 94111

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Misnawati, SST.,M.Kes  
Jabatan : Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Primer Dinas Kesehatan  
Provinsi Sulawesi Tengah

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : Hestiwati, SKM.,M,Kes  
Jabatan : Kepala Bidang Pelayanan kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah

Selaku atasan langsung **PIHAK PERTAMA** selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

**PIHAK PERTAMA** berjanji :

1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka, mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami;
2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi fisik dan keuanganperangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam Sistem Elektronik Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP).

**PIHAK KEDUA** akan melakukan supervise yang diperluhkanserta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dan perjanjian ini dan mengambil Tindakan yang diperlukan dalam pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, 30 Januari 2025

**PIHAK KEDUA**  
**KEPALA BIDANG**  
**PELAYANAN KESEHATAN**  
**DINAS KESEHATAN PROVINSI**  
**SULAWESI TENGAH**

Hestiwati, SKM.,M.Kes  
NIP. 19780522 200804 2 001

**PIHAK PERTAMA**  
**KEPALA SEKSI PRIMER DINAS**  
**KESEHATAN PROVINSI SULAWESI**  
**TENGAH**

Misnawati, SST.M.,Kes  
NIP.19781101 200502 2 005

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 UNIT KINERJA**

No	Sasaran Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Jumlah Puskesmas yang dilakukan monitoring Pasca Pelaksanaan Survei Akreditasi 13 kab/kota	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	219 Puskesmas
2	Jumlah Kabupaten/ Kota yang dilakukan Monev Rekam Medis Elektronik yang dilaksanakan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Verifikasi dan Penilaian Kelayakan Puskesmas untuk Registrasi Puskesmas	13 Kab/kota
3	Jumlah Pelaksanaan Akreditasi Klinik yang di monitoring melalui Aplikasi Data Fasyankes Online (DFO) 13 kab/kota	Jumlah Dokumen Hasil Verifikasi dan Penilaian Kelayakan Puskesmas untuk Registrasi Puskesmas	54 Klinik
4	Jumlah rekapitan laporan Indikator Nasional Mutu (INM) di 512 FKTP dan Jejaring, Insiden Keselamatan Pasien (IKP) di 347 Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dan Jejaring 13 Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Verifikasi dan Penilaian Kelayakan Puskesmas untuk Registrasi Puskesmas	4 Laporan
5	Jumlah Feed Back Laporan INM dan IKP FKTP dan Jejaring di Kabupaten/Kota Tahun 2025	Jumlah Dokumen Hasil Verifikasi dan Penilaian Kelayakan Puskesmas untuk Registrasi Puskesmas	4 Laporan
6	Jumlah Laporan Penerapan RME (Rekam medik Eelektronik) di 347 FKTP yang di monitoring melalui Aplikasi Data Fasyankes Online (DFO) dan Dashboard Satu Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Verifikasi dan Penilaian Kelayakan Puskesmas untuk Registrasi Puskesmas	4 Laporan
7	Persentase Layanan verifikasi registrasi online puskesmas	Jumlah Dokumen Hasil Verifikasi dan Penilaian Kelayakan Puskesmas untuk Registrasi Puskesmas	100%
8	Persentase Pelayanan Verifikasi Usulan Peningkatan Status Puskesmas	Jumlah Dokumen Hasil Verifikasi dan Penilaian Kelayakan Puskesmas untuk Registrasi Puskesmas	100%
9	Jumlah Dokumen MOU Kepala daerah Implementasi Telemedicine di Puskesmas 13 Kab/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	13 Dokumen
10	Jumlah Dokumen Kajian Pemetaan Kebutuhan Locus Layanan Telemedicine 13 Kab/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	13 Dokumen
11	Terevaluasinya Implementasi Telemedicine di Puskesmas 13 Kab/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	13 Dokumen

12	Jumlah Dokumen Data Sistem Informasi Puskesmas yang Tervalidasi	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	4 Dokumen
13	Jumlah Puskesmas yang dibina dalam Penetapan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	13 Kab/kota
14	Jumlah Puskesmas yang Dimonitoring Penerapan BLUD Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	5 Kabupaten
15	Jumlah Puskesmas yang dilakukan Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan Rujukan Non Spesialistik di Kab/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	219 PKM
16	Jumlah Puskesmas yang melaksanakan Pelayanan Kesehatan Gigi dan mulut yang optimal	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	219 Puskesmas
17	Jumlah Puskesmas yang melaporkan data cakupan Kesehatan Gigi Mulut yang Optimal	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	219 Puskesmas
18	Jumlah puskesmas yang dipantau data Kesehatan Gigi Mulut melalui aplikasi SIP	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	219 Puskesmas
19	Jumlah pendampingan Pelayann Kesehatan Bergerak yang dilaksanakan di Daerah Terpencil Perbatasan Kepulauan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	4 Kali
20	Evaluasi kegiatan pelaksanaan Pelayann Kesehatan Bergerak (PKB) selama 1 tahun	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	1 Puskesmas
21	Jumlah Puskesmas yang di Monitoring Pengimputan Data dan intervensi keluarga, Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PIS-PK) dalam Aplikasi Keluarga Sehat versi 2.0	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	219 Puskesmas
22	Jumlah Puskesmas yang menerapkan Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer (ILP)	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	40 Puskesmas
23	Jumlah Kabupaten/Kota yang sudah melakuklan Louching Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer ( ILP)	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	13 Kab/kota
24	Jumlah Kabupaten/Kota yang sudah melakuklan Louching Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer ( ILP)	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	13 Kab/kota
25	Jumlah Kabupaten/Kota yang telah membuat MOU antara Puskesmas dan Jejaringnya	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	13 Dokumen

26	Jumlah Puskesmas yang mendapatkan pendampingan jejaring Puskesmas di 13 Kab/kota	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	114 Puskesmas
----	--	--	------------------

NO	SUB KEGIATAN	ANGGARAN	KET
1.	Pembina pelaksana upaya pelayanan kesehatan	Rp. 1,799,999,850	APBD
2.	Verifikasi dan penilaian Kelayakan puskesmas untuk registrasi puskesmas	Rp. 149,999,300	APBD
<b>TOTAL</b>		<b>Rp. 1.949,999,150</b>	

Palu, 30 Januari 2025

**PIHAK KEDUA**  
**KEPALA BIDANG**  
**PELAYANAN KESEHATAN**  
**PROVINSI SULAWESI TENGAH**



Hestiawati, SKM., M.Kes  
NIP. 19780522 200804 2 001

**PIHAK PERTAMA**  
**KEPALA SEKSI PRIMER KESEHATAN**  
**DINAS KESEHATAN PROVINSI**  
**SULAWESI TENGAH**



Misnawati, SST.M., Kes  
NIP.19781101 200502 2 005



PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH  
DINAS KESEHATAN

Jalan R.A.Kartini No. 11 Telp. (0451) 421070,421170,421028 Faksimili (0451) 421170 Palu  
94111

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Meyke M. Wongkar, S.Farm, M.Si, Apt

Jabatan : Kepala Bldang Kefarmasian, Alat Kesehatan dan SDM

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : dr. I Komang Adi Sujendra,Sp.PD

Jabatan : Kepala Dinas Kesehatan Prov. Sulawesi Tengah

Selaku atasan langsung **PIHAK PERTAMA** selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

**PIHAK PERTAMA** berjanji :

1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka, mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami;
2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi fisik dan keuangan perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam Sistem Elektronik Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP).

**PIHAK KEDUA** akan melakukan supervise yang diperluhkanserta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dan perjanjian ini dan mengambil Tindakan yang diperlukan dalam pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, 30 Januari 2025

**PIHAK KEDUA**  
KEPALA DINAS KESEHATAN  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

dr. I Komang Adi Sujendra,Sp.PD  
NIP. 19650325 199003 1 014

**PIHAK PERTAMA**  
KEPALA BIDANG KEFARMASIAN, ALKES &  
SDMK

Meyke M. Wongkar, S.Farm, M.Si, Apt  
NIP. 19690529 199403 2 010

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**  
**UNIT KINERJA**

No	Sasaran Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Ketersediaan Obat, Vaksin dan BMHP	Persentase Ketersediaan obat esensial dan vaksin di instalasi Farmasi 13 kabupaten/kota Persentase ketesediaan obat dan vaksin	80%
2.	Meningkatnya Mutu pelayanan kefarmasian sesuai standar	Persentase instalasi farmasi Kab/Kota dengan Tata Kelola Obat Sesuai Standar Persentase Kab/kota dengan ketersediaan obat dan vaksin esensial	70%
		Persentase Fasyankes yang melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai standar	75%
3.	Meningkatnya Pemenuhan dan Pemerataan SDM Kesehatan Yang Berkualitas	Jumlah fasyankes yang telah terpenuhi 9 tenaga SDM Kesehatan / jumlah fasyankes x 100	55%
5.		Jumlah RSUD Kab/Kota yang telah terpenuhi 4 dokter spesialis dasar (obgyn, anak, penyakit dalam dan bedah) dan 3 spesialis lainnya.	55%
6.	Meningkatnya Kompetensi melalui Sistem Pendidikan Pelatihan SDM Kesehatan	Jumlah SDM Kesehatan yg mendapat sertifikat pd pelatihan teknis kesehatan, fungsional Kesehatan dan manajemen kesehatan / Jumlah Seluruh SDM Kesehatan yang terdaftar SIS-SDMK	100%
7.		jumlah SDM Kesehatan yang ditingkatkan kualifikasi melalui pendidikan lanjutan tahun berjalan / Jumlah SDM Kesehatan yang Terdaftar	100%
8.	Meningkatnya mutu alat Kesehatan Pada Fasyankes di kab/Kota	Persentase Fasilitas Kesehatan Dasar Yang Ditingkatkan Kualitas sediaan Alat Kesehatan	90%
		pesentase RS milik Pemerintah yg memenuhi sarana, Prasarana, Dan Alat Kesehatan Sesuai Standar	90%
		Persentase Produk alat Kesehatan dan PKRT yg diuji dan memenuhi persyaratan Sesuai Standar	100%
		Persentase PAK cabang yang Memenuhi Ketentuan perizinan Berusaha Sesuai Standar	95%
		Persentase PAK cabang yang Menerapkan CDAKB yang sesuai standar	90%
		Persentase fasyankes yang terkalibrasi alat kesehatan sesuai standar	100%

Program & Kegiatan	Anggaran	Keterangan Sumber Dana	
		APBD	APBN
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Rp. 3.777,404,000	APBD	
1. Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Sarana, Prasarana, dan Alkes untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Rp. 3,777,404,000		
Program Sedia Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan dan Minuman	Rp. 659,999,919	APBD	
1. Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan serta tindak Lanjut Penerbitan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK	Rp. 659,999,919		
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Rp. 600,098,233	APBD	
1. Kegiatan Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi	Rp. 300,051,400		
2. Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknik Sumber Daya Manusia kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Rp. 300,046,833		

Palu, 30 Januari 2025

**PIHAK KEDUA**  
**KEPALA DINAS KESEHATAN**  
**PROVINSI SULAWESI TENGAH**



**dr. I Komang Adi Sujendra, Sp.PD**  
NIP. 19650325 199003 1 014

**PIHAK PERTAMA**  
**KEPALA BIDANG KEFARMASIAN, ALKES &**  
**SDMK**



**Meyke M. Wongkar, S.Farm, M.Si, Apt**  
NIP. 19690519 199403 2 010



**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH**  
**DINAS KESEHATAN DAERAH**

Jl. R.A Kartini Nomor 11 Telp. (0451) 421070; 454646 Faksimili (0451) 454646  
PALU 94111

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Valen Ruterlin T, S.Si., M.Farm., Apt

Jabatan : Kepala Seksi Alat Kesehatan dan PKRT

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : Meyke M Wongkar, S.Farm., M.Si., Apt

Jabatan : Kepala Bidang Kefarmasian, Alat Kesehatan dan SDM

Selaku atasan langsung **PIHAK PERTAMA** selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

**PIHAK PERTAMA** berjanji :

1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka, mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami;
2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi fisik dan keuangan perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam Sistem Elektronik Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP).

**PIHAK KEDUA** akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dan perjanjian ini dan mengambil Tindakan yang diperlukan dalam pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, 30 Januari 2025

**PIHAK KEDUA**  
**PEJABAT ESELON 3**

Meyke M. Wongkar, S.Farm., M.Si., Apt  
19690519 199403 2 010

**PIHAK PERTAMA**  
**PEJABAT ESELON 4**

Valen Ruterlin T., S.Si., M.Farm., Apt  
19750521 200903 2 001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025**  
**UNIT KINERJA**

Sasaran Kegiatan (1)	Sub Kegiatan (2)	Indikator Kinerja (3)	Target (4)
Tersosialisasinya pemenuhan Prasarana, Prasarana dan Alat Kesehatan sesuai standar FKTP 13 kab/kota	Jumlah Operator dan Penanggungjawab Tenaga Faskes Dasar (Kab/Kota) yang mendapat sosialisasi pemenuhan Prasarana, Prasarana dan Alat Kesehatan sesuai Standar	Jumlah PBF Cabang dan Cabang PAK yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindakanlanjutan Penerbitan Perizinan	113 Orang
Terdampinginya Akreditasi standar mutu Sarana, Prasarana dan Alkes di Fasilitas Kesehatan Dasar (Puskesmas)	Jumlah Faskes yang belum Terakreditasi Dasar (Puskesmas) yang mendapat pendampingan Akreditasi standar mutu Sarana, Prasarana dan Alkes	Jumlah PBF Cabang dan Cabang PAK yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindakanlanjutan Penerbitan Perizinan	113 Pusk
Terverifikasinya Permohonan usulan DAK FKTP kab/kota	Persentase Permohonan usulan DAK FKTP yang Terverifikasi	Jumlah PBF Cabang dan Cabang PAK yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindakanlanjutan Penerbitan Perizinan	100%
Tersosialisasinya pemenuhan Prasarana, Prasarana dan Alat Kesehatan sesuai standar RS 13 kab/kota	Jumlah Operator dan Penanggungjawab Tenaga Faskes di RS (Kab/Kota) yang mendapat sosialisasi pemenuhan Prasarana, Prasarana dan Alat Kesehatan sesuai Standar	Jumlah PBF Cabang dan Cabang PAK yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindakanlanjutan Penerbitan Perizinan	25 Orang

Terdampinginya Akreditasi standar mutu Sarana, Prasarana dan Alkes di RS	Jumlah RS yang belum Terakreditasi RS yang mendapat pendampingan Akreditasi standar mutu Sarana, Prasarana dan Alkes	Jumlah PBF Cabang dan Cabang PAK yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindakanlanjutan Penerbitan Perizinan	25 RS
Terverifikasinya Usulan Sarana Prasarana Dan alat Kesehatan RS di dalam ASPAK	Persentase Usulan Sarana Prasarana Dan alat Kesehatan RS di dalam ASPAK yang di Verifikasi	Jumlah PBF Cabang dan Cabang PAK yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindakanlanjutan Penerbitan Perizinan	100%
Terawasinya Alat kesehatan dan PKRT di Fasyankes dan atau Retail di Kota Palu yang Terawasi	Jumlah Fasyankes dan atau retail yang diawasi	Jumlah PBF Cabang dan Cabang PAK yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindakanlanjutan Penerbitan Perizinan	30Fasyankes dan atau Retail
Terverifikasinya dan Terfalidasinya permohonan perizinan Berusaha pada Lembaga Penyalur Alat kesehatan Cabang sesuai Standar	Persentase Permohonan Perizinan berusaha yang terlayani	Jumlah PBF Cabang dan Cabang PAK yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindakanlanjutan Penerbitan Perizinan	100%

Terverifikasinya dan Terfalisasinya permohonan Perizinan CDAKB pada Lembaga Penyalur Alat kesehatan Cabang sesuai Ketentuan	Persentase Permohonan Peizinan CDAKB dan sesuai ketentuan PerMenkes yang Terlayani	Jumlah PBF Cabang dan Cabang PAK yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindaklanjut Penerbitan Perizinan	100%
Termonitoring dan terawasinya masa berlaku izin PAK dan CDAKB Cabang yang akan berakhir masa berlakunya	Jumlah PAK dan CDAKB yang termonitoring	Jumlah PBF Cabang dan Cabang PAK yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindaklanjut Penerbitan Perizinan	25 PAK dan CDAKB
tersusunnya dokumen fasyankes yang terkalibrasi alat kesehatan	Jumlah dokumen	Jumlah PBF Cabang dan Cabang PAK yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindaklanjut Penerbitan Perizinan	2 Dokumen
terbinanya fasyankes tentang standar minimal kalibrasi alat kesehatan	jumlah fasyankes yang terbina	Jumlah PBF Cabang dan Cabang PAK yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindaklanjut Penerbitan Perizinan	393 Fasyankes

Palu, 30 Januari 2025

**PIHAK KEDUA  
PEJABAT ESELON 3**



Meyke M. Wongkar, S.Farm., M.Si., Apt  
19690519 199403 2 010

**PIHAK PERTAMA  
PEJABAT ESELON 4**



Valen Rutelilin T., S.Si., M.Farm., Apt  
19750521 200903 2 001



**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH**  
**DINAS KESEHATAN DAERAH**

Jl. R.A Kartini Nomor 11 Telp. (0451) 421070; 454646 Faksimili (0451) 454646  
PALU 94111

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Asmanur AR, S.Farm, Apt

Jabatan : Kepala Seksi Kefarmasian

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : Meyke M. Wongkar, S.Farm, M.Si, Apt

Jabatan : Kepala Bidang Kefarmasian, Alat Kesehatan dan SDM

Selaku atasan langsung **PIHAK PERTAMA** selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

**PIHAK PERTAMA** berjanji :

1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka, mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami;
2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi fisik dan keuangan perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam Sistem Elektronik Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP).

**PIHAK KEDUA** akan melakukan supervise yang diperluhkanserta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dan perjanjian ini dan mengambil Tindakan yang diperluhkan dalam pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, 30 Januari 2025

**PIHAK KEDUA**  
**KEPALA BIDANG KEFARMASIAN, ALKES & SDM**

Meyke M. Wongkar, S.Farm, M.Si, Apt  
NIP. 19690519 199403 2 010

**PIHAK PERTAMA**  
**KEPALA SEKSI KEFARMASIAN**

Asmanur AR, S.Farm, Apt  
NIP. 19870817 201101 2 015

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**  
**UNIT KINERJA**

No	Sasaran Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	Jumlah instalasi yang terdistribusi	Jumlah dokumen distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan	13 Instalasi farmasi kab/kota
1	Jumlah IFK dan Puskesmas yang dimonitoring ketersediaan obat dan vaksin	Jumlah dokumen distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan	78 sarana
2	Jumlah laporan Pengelolaan Obat, Vaksin dan BMHP di instalasi farmasi provinsi	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	12 Laporan
3	Jumlah Kab/Kota yang dimonitoring melakukan pengisian form penilaian kesesuaian standar di IFK	Jumlah PBF Cabang dan Cabang PAK yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindakanlanjutan Penerbitan Perizinan	13 kab/kota
4	Jumlah kab/kota yang mendapatkan sosialisasi CDOB	Jumlah PBF Cabang dan Cabang PAK yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindakanlanjutan Penerbitan Perizinan	13 Kab/Kota
5	Jumlah PBF yang terbina	Jumlah PBF Cabang dan Cabang PAK yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindakanlanjutan Penerbitan Perizinan	27 Sarana PBF
6	Persentase PBF yang terlayani permohonan izinnya	Jumlah PBF Cabang dan Cabang PAK yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindakanlanjutan Penerbitan Perizinan	100%
7	Jumlah unit layanan yang terawasi	Jumlah PBF Cabang dan Cabang PAK yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindakanlanjutan Penerbitan Perizinan	250 unit layanan
8	Jumlah pelaporan pelayanan kefarmasian	Jumlah PBF Cabang dan Cabang PAK yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindakanlanjutan Penerbitan Perizinan	12 Laporan
9	Jumlah puskesmas dan RS yang memenuhi standar pelayanan kefarmasian	Jumlah PBF Cabang dan Cabang PAK yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindakanlanjutan Penerbitan Perizinan	194 Sarana Fasyankes

Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1. Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alkes untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tk. Daerah Provinsi	Rp. 3.777.404.000	APBD
Sub Kegiatan		
2. Distribusi Alkes, Obat, BHP, BMHP, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	Rp. 375.127.072	
3. Pengadaan Obat, BHP, BMHP, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	Rp. 3.402.276.928	
Kegiatan		
1. Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang PAK	Rp. 659.999.919	
Sub Kegiatan		
2. Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK	Rp. 659.999.919	

**PIHAK KEDUA**  
**KEPALA BIDANG KEFARMASIAN, ALKES DAN SDM**



**Meyke M. Wongkar, S.Farm, M.Si, Apt**  
**NIP. 19690519 199403 2 010**

**Palu, 30 Januari 2025**  
**PIHAK PERTAMA**  
**KEPALA SEKSI KEFARMASIAN**



**Asmanur AR, S.Farm, Apt**  
**NIP. 19870817 201101 2 015**



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH  
DINAS KESEHATAN

JL. R.A KARTINI NO. 11 Telp (0451) 421170 – 422343 – 421070 FAKSIMILI (0451) 454646

PALU 94111

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA  
TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH  
DINAS KESEHATAN PROVINSI SULAWESI TENGAH  
TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Fransesca D. Rasubala, SKM, MAP  
Jabatan : Kepala Dinas Kesehatan Prov. Sulawesi Tengah  
Dinas Kesehatan Prov. Sulawesi Tengah

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : dr. I Komang Adi Sujendra, Sp.PD  
Jabatan : Kepala Dinas Kesehatan Prov. Sulawesi Tengah

Selaku atasan langsung PIHAK PERTAMA selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA pada tahun 2025 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, 30 Januari 2025

PIHAK KEDUA  
KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI  
SULAWESI TENGAH

dr. I Komang Adi Sujendra, Sp.PD  
NIP. 19650325 199003 1 014

PIHAK PERTAMA  
KEPALA BIDANG KESEHATAN  
MASYARAKAT

Fransesca D. Rasubala, SKM, MAP  
NIP. 19670216 199003 2 004

**PERJANJIAN KINERJA  
TAHUN 2025  
UNIT KINERJA**

No	Sasaran Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
	Jumlah Kab/kota yang melakukan 8 jenis kampanye kesehatan (pembudayaan Germas) / Jumlah Kab.Kota x 100	Persentase Peningkatan Sekolah Sehat di Kab/Kota	5%
	Meningkatnya kualitas pelayanan promosi kesehatan	Persentase kab/kota melaksanakan pelaporan promosi kesehatan	100%
	Meningkatnya Tempat Fasilitas Umum yang dilakukan pengawasan sesuai standar	Persentase Kab/kota yang memenuhi TFU yang dilakukan pengawasan sesuai standar	75,4%
	Meningkatnya frekuensi pengawasan eksternal terhadap sarana air minum yang komunal	Persentase sarana air minum yang dilakukan pengawasan sesuai standar di kab/kota	7,9%
	Meningkatnya desa/kelurahan Stop Buang Air Besar Sembarangan	Persentase Desa/kelurahan yang melaksanakan Stop Buang Air Besar Sembarangan	49,7%
	Meningkatnya RS melakukan penyelenggaraan kesehatan lingkungan	Persentase RS yang menyelenggarakan kesehatan lingkungan	15,0%
	Meningkatnya persentase fasyankes yang melaksanakan pengelolaan limbah medis sesuai standar	Persentase fasyankes (RS dan Puskesmas) yang melaksanakan pengelolaan limbah medis sesuai standar	7,7%
	Meningkatnya jumlah kabupaten/kota yang menyelenggarakan adaptasi perubahan iklim dan kebencanaan lingkungan	Persentase kabupaten/kota menyelenggarakan adaptasi perubahan iklim dan kebencanaan lingkungan	23%
	Meningkatnya Pembinaan Kab/Kota dalam Pelaksanaan Program kesehatan Haji	Persentase Kab/Kota yang dibina program kesehatan haji	100%
	meningkatnya pelayanan kesehatan haji	Persentase penetapan calon status istithoah kesehatan calon jemaah haji	100%
	Meningkatnya Pembinaan kabupaten/kota dalam melaksanakan kesehatan kerja	Persentase Kab/kota yang mendapat pembinaan melaksanakan kesehatan kerja	100%

Meningkatnya jumlah pekerja Kab/kota yang melakukan kegiatan skrinning kesehatan di tempat kerja	Persentase kab/kota yang melaksanakan kegiatan skrinning kesehatan di tempat kerja	100%
Meningkatnya Pembinaan Puskesmas dalam melaksanakan peningkatan aktivitas fisik	Persentase Kab/kota yang mendapat pembinaan peningkatan aktivitas fisik	100%
Terwujudnya peningkatan Kesehatan masyarakat melalui pendekatan promotive dan preventif pada setiap siklus kehidupan yang didukung oleh peningkatan tata kelola kesehatan masyarakat Kab/Kota	Persentase cakupan pelayanan kesehatan Ibu Hamil K6	75,0%
	Persentase Persalinan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	95%
	angka kematian ibu (per 100.000 kelahiran hidup)	108
	Jumlah Kematian / Jumlah Lahir Hidup x 100.000	
	Persentase bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100,00%
	Persentase balita yang dipantau pertumbuhan dan perkembangannya	85,00%
Meningkatnya Pembinaan Pengelolaan Pelayanan Gizi Masyarakat	Prevalensi Balita Underweight	22%

#### APBD

NO	PROGRAM	ANGGARAN
<b>1</b>	<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>	
1.	Kegiatan penyediaan layanan Kesehatan untuk UKP rujukan, UKM dan UKM rujukan tingkat daerah provinsi	Rp. 2,838,210,335
<b>11</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</b>	
1.	Kegiatan advokasi, pemberdayaan, kemitraan, peningkatan peran serta masyarakat dan lintas sector tingkat daerah provinsi	Rp. 300,000,250
2.	Kegiatan pelaksanaan komunikasi informasi dan edukasi (KIE) perilaku hidup bersih dan sehat dalam rangka promotive preventif tingkat daerah provinsi	Rp. 150,000,050

3.	Kegiatan pengembangan dan pelaksanaan upaya Kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM) tingkat daerah provinsi	Rp. 150,000,000
----	--	-----------------

Palu, 30 Januari 2025

**PIHAK KEDUA**

**KEPALA DINAS KESEHATAN  
PROVINSI SULAWESI TENGAH**



**dr. I Komang Adi Sujendra  
NIP. 19650325 199003 1 014**

**PIHAK PERTAMA**

**KEPALA BIDANG KESEHATAN  
MASYARAKAT**



**Fransesca D. Rasubala, SKM, MAP  
NIP. 19670216 199003 2 004**



**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH**  
**DINAS KESEHATAN**

JL. R.A KARTINI NO. 11 Telp ( 0451 ) 421170 – 422343 – 421070 FAKSIMILI (0451) 454646  
**PALU 94111**

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA**  
**TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**  
**DINAS KESEHATAN PROVINSI SULAWESI TENGAH**  
**TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Fahri, SKM  
Jabatan : Kepala Seksi Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : Fransesca D. Rasubala, SKM, MAP  
Jabatan : Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat

Selaku atasan langsung **PIHAK PERTAMA** selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

**PIHAK PERTAMA** berjanji :

1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka, mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami;
2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi fisik dan keuangan perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam Sistem Elektronik Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (c-MEP).

**PIHAK KEDUA** akan melakukan supervise yang diperluhkanserta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dan perjanjian ini dan mengambil Tindakan yang diperlukan dalam pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, 30 Januari 2025

**PIHAK KEDUA**

**KEPALA BIDANG KESEHATAN  
MASYARAKAT**

Fransesca D. Rasubala, SKM, MAP  
NIP. 19670216 199003 2 004

**PIHAK PERTAMA**

**KEPALA SEKSI PROMOSI KESEHATAN DAN  
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT  
DINAS KESEHATAN PROVINSI SULTENG**

Fahri, SKM  
NIP.19800814 200902 1 001

**PERJANJIAN KINERJA  
TAHUN 2024  
UNIT KINERJA**

No	Sasaran Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Teridentifikasi dan tervalidasinya Kab/Kota yang Memiliki sekolah sehat	Jumlah Dokumen Hasil Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	4 dokumen
2	Terbinanya mitra kerja kesehatan di Kab/Kota Melakukan Penguatan Sekolah Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	4 Kerjasama/MOU
3	Terjalannya Kerjasama Pembentukan Kampus Sehat dengan Unuversitas dan lembaga Pendidikan Tinggi	Jumlah Dokumen Hasil Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	4 Kerjasama/MOU
4	Terbinanya Mitra Universitas Lembaga Pendidikan Tinggi dalam Memenuhi Status Kampus Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	4 Dokumen
5	Terjalinya komitmen instansi pengelolah satuan pendidikan dalam memanfaatkan bahan ajar kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	5 Prov/Kab/Kota, kanwil agama
6	Tersusunnya dokumen data dan informasi satuan pendidikan yang memanfaatkan bahan ajar kesehatan di 13 kab/kota	Jumlah Dokumen Hasil Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	13 Dokumen
7	Terlaksananya penggerakan pembudayaan Germas	Jumlah Dokumen Hasil Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	3 kab/kota
8	Terevaluasinya implememtasi Germas di kab/Kota	Jumlah Dok dr. I Komang Adi Sujendra, Sp.PD umen Hasil Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	3 kab/kota
9	Terbentuknya kampung germas di kabupaten Parigi Moutong dan Tojo Una-Una	Jumlah Dokumen Hasil Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat	2 Kabupaten

10	Teridentifikasi dan tervalidasinya Kab/Kota yang Memiliki sekolah sehat	Jumlah Dokumen Hasil Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	2 Kabupaten
11	Terevaluasinya Pembinaan Posyandu di Kab/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi UKBM	1 Dokumen
12	Terselenggaranya Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat melalui Koordinasi Promkes dengan kab/kota	Jumlah Dokumen Hasil Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	40 Orang
13	Terbinanya posyandu dalam implementasi posyandu terintegrasi	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi UKBM	300 Posyandu
14	Terbinanya kompetensi kader posyandu dalam memenuhi peningkatan strata madya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	30 Kader
15	Tersebarluaskanya informasi kesehatan melalui Pameran Expo	Jumlah Dokumen Hasil Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	1 kali
16	Tersebarluaskanya informasi kesehatan melalui Pameran HKN	Jumlah Dokumen Hasil Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	1 kali
17	Tersebarluaskanya informasi kesehatan melalui Dialog RRI	Jumlah Dokumen Hasil Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	1 kali
18	Tersebarluaskanya informasi kesehatan melalui Dialog TVRI	Jumlah Dokumen Hasil Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	1 kali
19	Tersebarluaskanya informasi kesehatan melalui Podcast	Jumlah Dokumen Hasil Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	12 kali
20	Tersebarluaskanya informasi kesehatan melalui Konten Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	10 kali
21	Tersebarluaskanya informasi pada hari-hari besar / kampanye kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	10 kali
22	Termonitoring dan terevaluasinya data laporan pelaksanaan promosi kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	29 laporan
23	Terbinanya petugas promosi kesehatan kabupaten/kota dan puskesmas	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	13 Petugas

NO	PROGRAM	ANGGARAN
1	<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>	
1.	Kegiatan penyediaan layanan Kesehatan untuk UKP rujukan, UKM dan UKM rujukan tingkat daerah provinsi	
	Pengelolaan pelayanan Promosi Kesehatan	Rp. 150,000,200
11	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</b>	
1.	Kegiatan advokasi, pemberdayaan, kemitraan, peningkatan peran serta masyarakat dan lintas sector tingkat daerah provinsi	Rp. 300,000,250
2.	Kegiatan pelaksanaan komunikasi informasi dan edukasi (KIE) perilaku hidup bersih dan sehat dalam rangka promotive preventif tingkat daerah provinsi	Rp. 150,000,050
3.	Kegiatan pengembangan dan pelaksanaan upaya Kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM) tingkat daerah provinsi	Rp. 150.000.000
<b>Total</b>		<b>Rp. 750,000,500</b>

Palu, 30 Januari 2025

**PIHAK KEDUA**

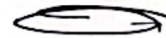
**KEPALA BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT**



Fransesca D. Rasubala, SKM, MAP  
NIP. 19670216 199003 2 004

**PIHAK PERTAMA**

**KEPALA SEKSI PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DINAS KESEHATAN PROVINSI SULTENG**



Fahri, SKM  
NIP.19800814 200902 1 001



PEMERINTAH DAERAH PROPINSI SULAWESI TENGAH  
**DINAS KESEHATAN**

JALAN. R.A. KARTINI NO. 11 TELEPON (0451) 421170 – 422343 – 421070 FAXIMILI (0451) 454646  
PALU 94111

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Budiman AR, SKM  
Jabatan : Kepala Seksi Kesling Kesjaor

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : Fransesca D. Rasubala, SKM, MAP  
Jabatan : Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat

Selaku atasan langsung **PIHAK PERTAMA** selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

**PIHAK PERTAMA** berjanji :

1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka, mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami;
2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi fisik dan keuangan perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam Sistem Elektronik Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP).


**PIHAK KEDUA** akan melakukan supervise yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dan perjanjian ini dan mengambil Tindakan yang diperlukan dalam pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, 30 Januari 2025

**PIHAK KEDUA**  
KEPALA BIDANG KESEHATAN  
MASYARAKAT

  
Fransesca D. Rasubala, SKM, MAP  
NIP. 19670216 199003 2 004

**PIHAK PERTAMA**  
PEJABAT ESELON 4

  
Budiman AR, SKM  
NIP 19750621 199503 1 003

## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

No	Sasaran Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Teradvokasinya stakeholder di Kab/Kota untuk melaksanakan kebijakan Kab/Kota Sehat (Kab. Tolitoli, Buol, Bangkep, Balut)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	4 Kab/Kota
2	Terdampinginya Kab/Kota dalam pemenuhan persyaratan penilaian Kab/Kota sehat (Kota palu, poso, dan morowali)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	3 Kab/Kota
3	Tersusunnya laporan evaluasi tentang capaian KKS bulanan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 laporan
4	Tersusunnya laporan evaluasi tentang capaian KKS tahunan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 laporan
5	Terbimbingnya Pengelola TPP (penjamah makanan dan minuman) dan tenaga sanitarian puskesmas mengenai laik hygiene sanitasi makanan dan minuman (pemenuhan standar TPP) di Kabupaten Buol	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	17 Orang
6	Terlatihnya Pengelola TPP (penjamah makanan dan minuman) dan tenaga sanitarian puskesmas mengenai laik hygiene sanitasi makanan dan minuman (pemenuhan standar TPP) di Kabupaten Buol	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	30 orang
7	Tersusunnya laporan evaluasi tentang capaian TPP bulanan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 laporan
8	Tersusunnya laporan evaluasi tentang capaian TPP tahunan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 laporan
9	Terbimbingnya Pengelola Program TFU tentang pelaksanaan pengawasan TFU sesuai standar di Kab Morut	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	18 Orang
10	Tersusunnya laporan evaluasi tentang capaian TFU bulanan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 laporan
11	Tersusunnya laporan evaluasi tentang capaian TFU tahunan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 laporan
12	Terbimbingnya pembinaan terhadap sumber daya TSL puskesmas dan pengelola program kabupaten banggai dalam melakukan pengawasan eksternal sarana air minum dan terlaksananya pemantauan dan evaluasi capaian target pengawasan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	18 Orang
13	Tersusunnya laporan evaluasi tentang capaian sarana air minum bulanan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 laporan
14	Tersusunnya laporan evaluasi tentang capaian sarana air minum tahunan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 laporan
15	Terbangunnya komitmen desa SBS dengan lintas sektor terkait di kabupaten parimo	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 komitmen
16	tersusunnya laporan evaluasi tentang capaian STBM bulanan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 laporan
17	tersusunnya laporan evaluasi tentang capaian STBM tahunan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 laporan
18	terlaksananya verifikasi desa SBS di kabupaten Poso dan Kab. Morowali	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	2 Kabupaten
19	Terpenuhinya standar kesehatan lingkungan rumah sakit	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	6 RS
20	Terpenuhinya standar pengelolaan limbah medis di Rumah Sakit	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	6 RS

21	Terpenuhinya standar pengelolaan limbah medis di Puskesmas	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	14 puskesmas
22	tersusunnya laporan evaluasi tentang capaian limbah medis fasyankes bulanan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 laporan
23	tersusunnya laporan evaluasi tentang capaian limbah medis fasyankes tahunan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 laporan
24	Terbinanya TSL pengelola di dinkes dan puskesmas untuk terbentuknya desa siap iklim yang ada di kab/kota serta Memiliki peta kerentanan/risiko, memiliki rencana kerja dan ada intervensi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	17 Orang
25	tersusunnya laporan evaluasi tentang capaian API-KL bulanan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 laporan
26	tersusunnya laporan evaluasi tentang capaian API-KL tahunan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 laporan
27	Terbinanya Kab/Kota dalam pelaksanaan program kesehatan haji	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	7 kab/kota
28	terpenuhinya persyaratan status isthithoah calon jemaah haji	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	100%
29	Terevaluasinya Penerapan Sistem Informasi Terpadu kesehatan kerja dan Olahraga (SITKO) pada Puskesmas di Kab. Bankep, poso, Touna, Morut dan Sigi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	5 Kab/Kota
30	Terdampinginya Pengelola Program Kesjaor di Dinas Kesehatan Kab Bangkep, Morut dan Morowali	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	3 Orang
31	Tersusunnya Laporan Monitoring Evaluasi Data Capaian Program kesehatan Kerja kab/kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	19 Laporan
32	Terdampinginya Puskesmas dan Kab/kota yang melakukan skrinning kesehatan di tempat kerja	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	12 Kab/Kota
33	Tersusunnya Laporan Monitoring Evaluasi Data skrinning kesehatan kerja di Kab/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	19 Laporan
34	Terdampinginya puskesmas yang melaksanakan peningkatan aktivitas fisik	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	219 Puskesmas
35	Tersusunnya Laporan Monitoring Evaluasi Data Capaian Program kesehatan Olahraga kab/kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	19 Laporan

## UNIT KINERJA

Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1. Kesehatan Lingkungan Sub Kegiatan : Pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan	Rp 465,054,000	APBD
2. Kesehatan Kerja dan Olahraga Sub Kegiatan : Pengelolaan pelayanan kesehatan kerja dan Olahraga di tempat kerja	Rp 149,998,750	APBD
3. Kesehatan Haji Sub Kegiatan : Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	Rp 149,999,650	APBD

**PIHAK KEDUA  
KEPALA BIDANG  
KESEHATAN MASYARAKAT**

Fransesca D Rasubala, SKM, MAP  
NIP. 19670216 199003 2 004

Palu, 30 Januari 2025

**PIHAK PERTAMA  
PEJABAT ESELON 4**

Budiman AR, SKM  
NIP. 19750621 199503 1 803



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : dr. Ryzqa  
Jabatan : Kepala UPT. Laboratium Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : dr. I Komang Adi Sujendra, Sp.PD  
Jabatan : Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah

Selaku atasan langsung **PIHAK PERTAMA** selanjutnya disebut

**PIHAK KEDUA** **PIHAK PERTAMA** berjanji:

1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka, mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami;
2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi fisik dan keuangan perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam Sistem Elektronik Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP).

**PIHAK KEDUA** akan melakukan supervise yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dan perjanjian ini dan mengambil Tindakan yang diperlukan dalam pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, 30 Januari 2025

**PIHAK KEDUA**  
**KEPALA DINAS KESEHATAN**  
**PROVINSI SULAWESI TENGAH**

dr. I Komang Adi Sujendra, Sp.PD  
NIP. 19650325 199003 1014

**PIHAK PERTAMA**  
**KEPALA UPT. LABORATORIUM KESEHATAN**  
**PROVINSI SULAWESI TENGAH**

dr. Ryzqa  
NIP. 19871122 2014021 1003

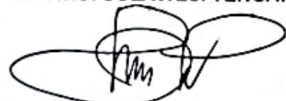
**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025  
UNIT KINERJA**

NO	SASARAN INDIKATOR/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terlaksananya Pelayanan Laboratorium Kesehatan sesuai standar	(Persentase Permohonan Pemeriksaan Laboratorium Kesehatan Yang Terlayani Sesuai Standar)	100%
2.	<u>Meningkatnya Mutu Laboratorium Kesehatan</u>	(Persentase Layanan Laboratorium kesehatan yang Terakreditasi)	100%
		Persentase Laboratorium Kesehatan Masyarakat Tingkat 1 Kab/Kota yang meningkat mutu pelayanannya	18.35%
3.	Terlayaninya kebutuhan penunjang UPT Laboratorium Kesehatan	(Persentase terlayaninya kebutuhan penunjang UPT Laboratorium kesehatan)	100%
4.	Terpeliharanya barang milik daerah	(Persentase terpeliharanya barang milik daerah)	100%
5	Meningkatnya kualitas Penunjang/Administrasi Umum	(Persentasi Unit Kerja Yang dilayani Keperluan Administrasi Umumnya)	100%

NO	SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	KET
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp. 659,365,500	APBD
2.	Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Rp. 1,070,666,800	APBD

Palu, 30 Januari 2025

**PIHAK KEDUA  
KEPALA DINAS KESEHATAN  
PROVINSI SULAWESI TENGAH**



dr. I Komang Adi Sujendra, Sp.PD  
NIP. 19650325 199003 1014

**PIHAK PERTAMA  
KEPALA UPT. LABORATORIUM KESEHATAN  
PROVINSI SULAWESI TENGAH**



dr. Ryzqa  
NIP. 19871122 2014021 1003



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH  
DINAS KESEHATAN  
UPT. LABORATORIUM KESEHATAN

JL. UNDATA NO. 27 E Telp ( 0451 ) 422423 FAKSIMILI (0451) 454482  
PALU 94111

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA  
TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH  
UPT. LABORATORIUM KESEHATAN  
PROVINSI SULAWESI TENGAH  
TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Afuad, SKM.,M.Kes  
Jabatan : Kepala Sub Bagian Tata Usaha  
UPT. Laboratorium Kesehatan Prov. Sulawesi Tengah

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : dr. Ryzqa  
Jabatan : Kepala UPT. Laboratorium Kesehatan Prov. Sulawesi Tengah

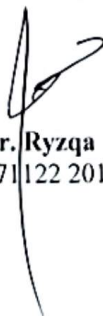
Selaku atasan langsung PIHAK PERTAMA selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA pada tahun 2025 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA.

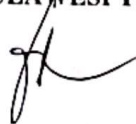
PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, 30 Januari 2025

**PIHAK KEDUA**  
LA UPT. LABORATORIUM KESEHATAN  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

  
dr. Ryzqa  
NIP. 19871122 201402 1 003

**PIHAK PERTAMA**  
KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA  
UPT. LABORATORIUM KESEHATAN  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

  
Afuad, SKM.,M.,Kes  
NIP. 19680701 199303 1 006

**PERJANJIAN KINERJA UPT. LABORATORIUM KESEHATAN  
PROVINSI SULAWESI TENGAH  
TAHUN 2025**

NO	SASARAN KEGIATAN/SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET
1.	Terpenuhinya kebutuhan listrik, telepon, air di lingkup labkes	(Jumlah bulan pemenuhan layanan listrik, telepon, dan air)	12 bulan
2.	Terpeliharanya kendaraan dinas operasional	(Jumlah unit kendaraan dinas operasional yang berfungsi dengan baik)	9 unit kendaraan
3.	Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor yang terpelihara	Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
4.	Terpenuhinya kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah paket pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor)	Terpenuhinya kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi. - Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah - Kegiatan : Administrasi Perangkat Daerah - Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah -Kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah -Kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah a) Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan pajak dan perizinan kendraan Dinas Operasional dan lapangan b) Pemeliharaan/rehsbilias sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	  42,600,000 41,240,000 78,406,000 349,175,000  39,000,000 78,944,500
<b>JUMLAH</b>		<b>Rp. 629,365,500</b>

Palu, 30 Januari 2025

**PIHAK KEDUA  
KEPALA UPT. LABORATORIUM  
KESEHATAN  
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

  
dr. Ryzza

**PIHAK PERTAMA  
KEPALA SUB. BAGIAN TATA USAHA  
UPT. LABORATORIUM KESEHATAN**

  
Afriand SKM M.Kes



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH  
DINAS KESEHATAN

UPT. LABORATORIUM KESEHATAN

JL. UNDATA NO. 27 E Telp ( 0451 ) 422423 FAKSIMILI (0451) 454482

PALU 94111

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA  
TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH  
UPT. LABORATORIUM KESEHATAN  
PROVINSI SULAWESI TENGAH  
TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Afuad, SKM.,M.Kes  
Jabatan : Kepala Sub Bagian Tata Usaha  
UPT. Laboratorium Kesehatan Prov. Sulawesi Tengah

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : dr. Ryzqa  
Jabatan : Kepala UPT. Laboratorium Kesehatan Prov. Sulawesi Tengah

Selaku atasan langsung PIHAK PERTAMA selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA pada tahun 2025 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, 30 Januari 2025

**PIHAK KEDUA**  
KAPALA UPT. LABORATORIUM KESEHATAN  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

  
dr. Ryzqa  
NIP. 19871122 201402 1 003

**PIHAK PERTAMA**  
KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA  
UPT. LABORATORIUM KESEHATAN  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

  
Afuad, SKM.,M.,Kes  
NIP. 19680701 199303 1 006

**PERJANJIAN KINERJA UPT. LABORATORIUM KESEHATAN  
PROVINSI SULAWESI TENGAH  
TAHUN 2025**

NO	SASARAN KEGIATAN/SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET
1.	Terpenuhinya kebutuhan listrik, telepon, air di lingkup labkes	(Jumlah bulan pemenuhan layanan listrik, telepon, dan air)	12 bulan
2.	Terpeliharanya kendaraan dinas operasional	(Jumlah unit kendaraan dinas operasional yang berfungsi dengan baik)	9 unit kendaraan
3.	Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Penduku Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor yang terpelihara	Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Penduku Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
4.	Terpenuhinya kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah paket pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor)	Terpenuhinya kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi. - Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah - Kegiatan : Administrasi Perangkat Daerah - Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah -Kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah -Kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah a) Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan pajak dan perizinan kendraan Dinas Operasional dan lapangan b) Pemeliharaan/rehsibilitas sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	42,600,000 41,240,000 78,406,000 349,175,000  39,000,000 78,944,500
<b>JUMLAH</b>		<b>Rp. 629,365,500</b>

Palu, 30 Januari 2025

**PIHAK KEDUA  
KEPALA UPT. LABORATORIUM  
KESEHATAN  
PROVINSI SULAWESI TENGAH**



**PIHAK PERTAMA  
KEPALA SUB. BAGIAN TATA USAHA  
UPT. LABORATORIUM KESEHATAN**



Afriad SKM M Kes



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH  
DINAS KESEHATAN

UPT. LABORATORIUM KESEHATAN

JL. UNDATA NO. 27 E Telp ( 0451 ) 422423 FAKSIMILI (0451) 454482

PALU 94111

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA  
TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH  
UPT. LABORATORIUM KESEHATAN  
PROVINSI SULAWESI TENGAH  
TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Anik Wijayanti, S.ST  
Jabatan : Kepala Seksi Pelayanan dan Mutu UPT. Laboratorium Kesehatan  
Prov. Sulawesi Tengah

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : dr. Ryzqa  
Jabatan : Kepala UPT. Laboratorium Kesehatan Prov. Sulawesi Tengah

Selaku atasan langsung PIHAK PERTAMA selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

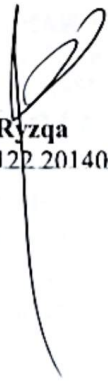
PIHAK PERTAMA pada tahun 2025 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA.


PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, Januari 2025

**PIHAK KEDUA**  
LA UPT. LABORATORIUM KESEHATAN  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

**PIHAK PERTAMA**  
KEPALA SEKSI PELAYANAN DAN MUTU  
UPT. LABORATORIUM KESEHATAN  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

  
dr. Ryzqa  
NIP. 19871122 201402 1 003

  
Anik Wijayanti, S.ST  
NIP. 19770205 200003 2003

**PERJANJIAN KINERJA UPT. LABORATORIUM KESEHATAN  
PROVINSI SULAWESI TENGAH  
TAHUN 2025**

NO	SASARAN KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terlayannya permohonan pemeriksaan Laboratorium Kimia dan Kesehatan Lingkungan sesuai standar	Jumlah sampel pemeriksaan Laboratorium Kimia dan Kesehatan Lingkungan yang diperiksa sesuai standar	780 Sampel (Jumlah sampel rerata dalam 1 tahun)
2.	Terlayannya Permohonan Pemeriksaan Laboratorium Biomolekuler	Persentase sampel pemeriksaan Laboratorium Biomolekuler yang diperiksa sesuai standar	100%
3.	Terlayannya Permohonan Pemeriksaan Laboratorium Mikrobiologi	Jumlah sampel pemeriksaan Laboratorium Mikrobiologi yang diperiksa sesuai standar	975 Sampel (Jumlah sampel rerata dalam 1 tahun)
4.	Terlayannya permohonan pemeriksaan Laboratorium Patologi Klinik	Jumlah sampel pemeriksaan Laboratorium Patolog klinik yang diperiksa sesuai standar	4.550 Sampel (Jumlah sampel rerata dalam 1 tahun)

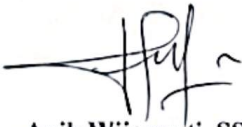
NO	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
1	<b>Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat</b> - Kegiatan Penerbitan izin rumah sakit kelas B fasilitas pelayanan Kesehatan tingkat daerah provinsi	Rp. 300,022,300
<b>JUMLAH</b>		<b>Rp. 300,022,300</b>

Palu, 30 Januari 2025

**PIHAK KEDUA**  
**KEPALA UPT. LABORATORIUM KESEHATAN**  
**PROVINSI SULAWESI TENGAH**

  
dr. Ryzqa  
NIP. 19871122 201402 1 003

**PIHAK PERTAMA**  
**KEPALA SEKSI PELAYANAN DAN MUTU**  
**UPT. LABORATORIUM KESEHATAN**  
**PROVINSI SULAWESI TENGAH**

  
Anik Wijayanti, SST  
NIP. 19770205 200003 2003



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH  
DINAS KESEHATAN

UPT. LABORATORIUM KESEHATAN

JL. UNDATA NO. 27 E Telp (0451) 422423 FAKSIMILI (0451) 454482

PALU 94111

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA  
TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH  
UPT. LABORATORIUM KESEHATAN  
PROVINSI SULAWESI TENGAH  
TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Anik Wijayanti, S.ST  
Jabatan : Kepala Seksi Pelayanan dan Mutu UPT. Laboratorium Kesehatan  
Prov. Sulawesi Tengah

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : dr. Ryzqa  
Jabatan : Kepala UPT. Laboratorium Kesehatan Prov. Sulawesi Tengah

Selaku atasan langsung PIHAK PERTAMA selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA pada tahun 2025 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah dicantumkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA  
LA UPT. LABORATORIUM KESEHATAN  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

dr. Ryzqa  
NIP. 19871122 201402 1 003

Palu, Januari 2025  
PIHAK PERTAMA  
KEPALA SEKSI PELAYANAN DAN MUTU  
UPT. LABORATORIUM KESEHATAN  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

Anik Wijayanti, S.ST  
NIP. 19770205 200003 2003


**PERJANJIAN KINERJA UPT. LABORATORIUM KESEHATAN  
PROVINSI SULAWESI TENGAH  
TAHUN 2025**

NO	SASARAN KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terlayannya permohonan pemeriksaan Laboratorium Kimia dan Kesehatan Lingkungan sesuai standar	Jumlah sampel pemeriksaan Laboratorium Kimia dan Kesehatan Lingkungan yang diperiksa sesuai standar	780 Sampel (Jumlah sampel rerata dalam 1 tahun)
2.	Terlayannya Permohonan Pemeriksaan Laboratorium Biomolekuler	Persentase sampel pemeriksaan Laboratorium Biomolekuler yang diperiksa sesuai standar	100%
3.	Terlayannya Permohonan Pemeriksaan Laboratorium Mikrobiologi	Jumlah sampel pemeriksaan Laboratorium Mikrobiologi yang diperiksa sesuai standar	975 Sampel (Jumlah sampel rerata dalam 1 tahun)
4.	Terlayannya permohonan pemeriksaan Laboratorium Patologi Klinik	Jumlah sampel pemeriksaan Laboratorium Patolog klinik yang diperiksa sesuai standar	4.550 Sampel (Jumlah sampel rerata dalam 1 tahun)


NO	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
1	<b>Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat</b> - Kegiatan Penerbitan izin rumah sakit kelas B fasilitas pelayanan Kesehatan tigtat daerah provinsi	Rp. 300,022,300
<b>JUMLAH</b>		<b>Rp. 300,022,300</b>

Palu,30 Januari 2025

**PIHAK KEDUA  
KEPALA UPT. LABORATORIUM  
KESEHATAN  
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

  
**dr. Ryzqa**  
NIP. 19871122 201402 1 003

**PIHAK PERTAMA  
KEPALA SEKSI PELAYANAN DAN MUTU  
UPT. LABORATORIUM KESEHATAN  
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

  
**Anik Wijayanti, SST**  
NIP. 19770205 200003 2003



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH  
DINAS KESEHATAN

UPT. LABORATORIUM KESEHATAN

JL. UNDATA NO. 27 E Telp ( 0451 ) 422423 FAKSIMILI (0451) 454482

P A L U 94111

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA  
TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH  
UPT. LABORATORIUM KESEHATAN  
PROVINSI SULAWESI TENGAH  
TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Yen Mulyati, SST.,MM  
Jabatan : Kepala Seksi Pengujian  
UPT. Laboratorium Kesehatan Prov. Sulawesi Tengah

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : dr. Ryzqa  
Jabatan : Kepala UPT. Laboratorium Kesehatan Prov. Sulawesi Tengah


Selaku atasan langsung PIHAK PERTAMA selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA pada tahun 2025 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA.


PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, 30 Januari 2025

**PIHAK KEDUA  
KEPALA UPT. LABORATORIUM  
KESEHATAN  
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

  
dr. Ryzqa  
NIP. 19871122201402 1 003

**PIHAK PERTAMA  
KEPALA SEKSI PENGUJIAN  
UPT. LABORATORIUM KESEHATAN  
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

  
Yen Mulyati, S.ST.,MM  
NIP. 19720106 199803 2 004

**PERJANJIAN KINERJA UPT. LABORATORIUM KESEHATAN  
PROVINSI SULAWESI TENGAH  
TAHUN 2025**

NO	SASARAN KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terkalibrasinya Peralatan Laboratorium UPT Labkes	Jumlah sarana dan prasarana alat Laboratorium UPT Labkes yang di kalibrasi.	20 Unit Alat
2.	Tersusunnya Dokumen Persyaratan Akreditasi Laboratorium Kesehatan	Jumlah dokumen penilaian mutu dan pengembangan sesuai standar akreditasi	1 Dokumen
3.	Terbinanya Laboratorium Kesehatan masrakat tingkat 1 Kabupaten/Kota Terkait Mutu Pelayanan	Jumlah laboratorium Kesehatan masrakat tingkat 1 kab/kota yang mendapatkan bimtek terkait mutu pelayanan	40 Unit Labkesmas tingkat 1

	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
1	<b>Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat</b>  - Kegiatan Penerbitan izin rumah sakit kelas B fasilitas pelayanan Kesehatan tingkat daerah provinsi	Rp. 560,119,000
<b>JUMLAH</b>		<b>Rp. 560,119,000</b>

Palu.30 Januari 2025

**PIHAK KEDUA  
KEPALA UPT. LABORATORIUM  
KESEHATAN  
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

  
**dr. Ryzqa**  
NIP. 19871122 201402 1 003

**PIHAK PERTAMA  
KEPALA SEKSI PENGUJIAN  
UPT. LABORATORIUM KESEHATAN  
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

  
**Yen Mulyati, S.ST.,MM**  
NIP. 19720106 199803 2 004



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH  
DINAS KESEHATAN  
UPT. LABORATORIUM KESEHATAN

JL. UNDATA NO. 27 E Telp ( 0451 ) 422423 FAKSIMILI (0451) 454482  
PALU 94111

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA  
TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH  
UPT. LABORATORIUM KESEHATAN  
PROVINSI SULAWESI TENGAH  
TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Yen Mulyati, SST.,MM  
Jabatan : Kepala Seksi Pengujian  
UPT. Laboratorium Kesehatan Prov. Sulawesi Tengah

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : dr. Ryzqa  
Jabatan : Kepala UPT. Laboratorium Kesehatan Prov. Sulawesi Tengah

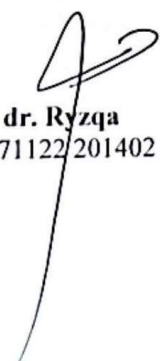
Selaku atasan langsung PIHAK PERTAMA selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA pada tahun 2025 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA.

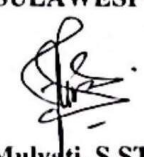
PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, 30 Januari 2025

**PIHAK KEDUA  
KEPALA UPT. LABORATORIUM  
KESEHATAN  
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

  
dr. Ryzqa  
NIP. 198711222014021003

**PIHAK PERTAMA  
KEPALA SEKSI PENGUJIAN  
UPT. LABORATORIUM KESEHATAN  
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

  
Yen Mulyati, S.ST.,MM  
NIP. 197201061998032004

**PERJANJIAN KINERJA UPT. LABORATORIUM KESEHATAN  
PROVINSI SULAWESI TENGAH  
TAHUN 2025**

NO	SASARAN KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terkalibrasinya Peralatan Laboratorium UPT Labkes	Jumlah sarana dan prasarana alat Laboratrouim UPT Labkes yang di kalibrasi.	20 Unit Alat
2.	Tersusunnya Dokumen Persyaratan Akreditasi Laboratorium Kesehatan	Jumlah dokumen penilaian mutu dan pengembangan sesuai standar akreditasi	1 Dokumen
3.	Terbinanya Laboratorium Kesehatan masrakat tingkat 1 Kabupaten/Kota Terkait Mutu Pelayanan	Jumlah laboratorium Kesehatan masrakat tingkat 1 kab/kota yang mendapatkan bimtek terkait mutu pelayanan	40 Unit Labkesmas tingkat 1

	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
1	<b>Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat</b>  - Kegiatan Penerbitan izin rumah sakit kelas B fasilitas pelayanan Kesehatan tigtat daerah provinsi	Rp. 560,119,000
<b>JUMLAH</b>		<b>Rp. 560,119,000</b>

Palu.30 Januari 2025

**PIHAK KEDUA  
KEPALA UPT. LABORATORIUM  
KESEHATAN  
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

  
**Dr. Ryzqa**  
 NIP. 19871122 201402 1 003

**PIHAK PERTAMA  
KEPALA SEKSI PENGUJIAN  
UPT. LABORATORIUM KESEHATAN  
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

  
**Yen Mulyati, S.ST.,MM**  
 NIP. 19720106 199803 2 004



**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH  
DINAS KESEHATAN**

Jl. R.A KARTINI NO. 11 Telp (0451) 421170 – 422343 – 421070 FAKSIMILI (0451) 454646  
**PALU 94111**

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA  
TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH  
DINAS KESEHATAN PROVINSI SULAWESI TENGAH  
TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Daeng Dani, SKM.,M.Kes  
Jabatan : Kepala UPT Pusat Pelayanan Keselamatan Terpadu

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : dr. I Komang Adi Sujendra, Sp.PD  
Jabatan : Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah

Selaku atasan langsung PIHAK PERTAMA selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA pada tahun 2025 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, 30 Januari 2025

**PIHAK KEDUA**

**KEPALA DINAS KESEHATAN  
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**dr. I Komang Adi Sujendra, Sp.PD  
Nip. 19650325 199003 1 014**

**PIHAK PERTAMA**

**KEPALA UPT. PUSAT PELAYANAN  
KESELAMATAN TERPADU**

**Daeng Dani, SKM.,M.Kes  
NIP. 19681024 199303 2 008**

**PERJANJIAN KINERJA  
DINAS KESEHATAN PROVINSI SULAWESI TENGAH  
TAHUN 2025**

NO	SASARAN INDIKATOR/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Persentase Kab/Kota yang melakukan pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana/berpotensi bencana	100%
		Persentase Kab/Kota yang menyusun dokumen Renkon sesuai Ketentuan	31%
		Persentase Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) bagi Masyarakat Umum yang dilayani	100%%
2.	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola di UPT P2KT	(Persentase terlayannya kebutuhan penunjang UPT P2KT)	100%
		(Persentase terpeliharanya barang milik daerah)	100%

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	
		APBD	APBN
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Rp.232,395,450	
2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Rp.517,604,250	
	<b>Jumlah</b>	<b>Rp.749,999,700</b>	

Palu, 30 Januari 2025

**PIHAK KEDUA**

**KEPALA DINAS KESEHATAN  
PROVINSI SULTENG**



**dr. I Komang Adi Sujendra, Sp.PD**  
Nip. 19650325 199003 1 014

**PIHAK PERTAMA**

**KEPALA UPT. PUSAT PELAYANAN  
KESELAMATAN TERPADU**



**Daeng Dani, SKM.,M.Kes**  
Nip. 19681024 199303 2 008



# PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

## DINAS KESEHATAN

JL. R.A KARTINI NO. 11 Telp (0451) 421170 - 422343 - 421070 FAKSIMILI (0451) 454646

PALU 94111

### PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DINAS KESEHATAN PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Nasir, SKM  
Jabatan : Kepala Seksi Penanganan Krisis Kesehatan

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Daeng Dani, SKM.,M.Kes  
Jabatan : Kepala UPT Pusat Pelayanan Keselamatan Terpadu

Selaku atasan langsung PIHAK PERTAMA selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA pada tahun 2025 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, 30 Januari 2025

**PIHAK KEDUA**  
Kepala UPT. Pusat Pelayanan  
Keselamatan Terpadu  
Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah

Daeng Dani, SKM.,M.Kes  
Nip. 19681024 199303 2 008

**PIHAK PERTAMA**  
Kepala Seksi Penanganan  
Krisis Kesehatan  
Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah

Muhammad Nasir, SKM  
NIP. 19830109 200502 1 003

# PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

## UNIT KINERJA

No	Sasaran Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1.	Presentase permintaan pelayanan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) Masyarakat yang dilayani	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersedia, Terkelola dan Terintegrasi dengan Rumah Sakit dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	100%
2.	Jumlah Kab/Kota yang Membangun Komitmen Bersama Antar Kab/Kota dan Provinsi Tentang Peningkatan Peran PSC 119 Kab/Kota	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersedia, Terkelola dan Terintegrasi dengan Rumah Sakit dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	13 kab/kota
3.	Presentase permintaan Pelayanan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) bagi Kegiatan Pemerintah Provinsi dan Kegiatan Daerah Lainnya	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersedia, Terkelola dan Terintegrasi dengan Rumah Sakit dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	100%
4.	Presentase permintaan pelayanan Pendampingan Kesehatan Bagi Pimpinan Daerah dan Tamu Daerah Setingkat Menteri	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersedia, Terkelola dan Terintegrasi dengan Rumah Sakit dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	100%

### APBD

NO	PROGRAM	ANGGARAN
	<b>Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat</b>	
	<i>Kegiatan: Penyediaan layanan kesehatan untuk UKP rujukan, UKM dan UKM rujukan tingkat daerah provinsi</i> a) Penyediaan dan Pengelolaan sistem penanganan gawat darurat terpadu (SPGDT)	Rp. 250,000,000

Palu, 30 Januari 2025

PIHAK KEDUA

Kepala UPT. Pusat Pelayanan  
Keselamatan Terpadu  
Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah



Daeng Dani, SKM.,M.Kes  
Nip. 19681024 199303 2 008

PIHAK PERTAMA

Kepala Seksi Penanganan  
Krisis Kesehatan  
Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah



Muhammad Nasir, SKM  
NIP. 19830109 200502 1 003



**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH**  
**DINAS KESEHATAN**

JL. R.A KARTINI NO. 11 Telp ( 0451 ) 421170 – 422343 – 421070 FAKSIMILI (0451) 454646  
PALU 94111

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA**  
**TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**  
**DINAS KESEHATAN PROVINSI SULAWESI TENGAH**  
**TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Jellyta H.E Bofe.SKM.M.Si.  
Jabatan : Kepala Sub Bagian Tata Usaha Upt P2KT

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Daeng Dani .SKM..M.Kes  
Jabatan : Kepala UPT Pusat Pelayanan Keselamatan Terpadu

Selaku atasan langsung PIHAK PERTAMA selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA pada tahun 2025 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, 30 Januari 2025

PIHAK KEDUA:  
KEPALA UPT P2KT DINAS KESEHATAN  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

**Daeng Dani .SKM.M.Kes**  
NIP. 19681024199303 2008

PIHAK PERTAMA:  
KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA  
UPT P2KT

**Jellyta H.E.Bofe .SKM.M.Si**  
NIP. 19670729199203 2003

PERJANJIAN KINERJA DINAS KESEHATAN  
PROVINSI SULAWESI TENGAH  
TAHUN 2025

NO	SASARAN INDIKATOR/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terpenuhinya kebutuhan listrik, alat Listrik dan Telepon Kantor UPT P2KT	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan
2.	Terpeliharanya kendaraan dinas Jabatan dan operasional	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 unit
3.	Terpeliharanya Peralatan Kantor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	23 Unit
4.	Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Paket
5.	Terpenuhinya kebutuhan listrik, alat Listrik dan Telepon Kantor UPT P2KT	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan

No	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	
		APBD	APBN
	<b>Program : Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi</b>		
	1. Kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah	Rp. 45,240,000	
	2. Kegiatan administrasi umum perangkat daerah		
	3. Kegiatan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Rp. 92,176,700	
	4. Kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Rp. 3,998,750	
	5. Kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Rp. 90,980,000	
	<b>JUMLAH</b>	<b>Rp. 232,395,450</b>	

Palu, 30 Januari 2025

PIHAK KEDUA:  
KEPALA UPT P2KT DINAS KESEHATAN  
PROVINSI SULAWESI TENGAH



**Daeng Dani .SKM.M.Kes**  
NIP. 19681024199303 2008

PIHAK PERTAMA:  
KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA  
UPT P2KT



**Jellyta H.E. Bofe .SKM.M.Si**  
NIP. 19670729199203 2003



**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH**  
**DINAS KESEHATAN**

JL. R.A KARTINI NO. 11 Telp ( 0451 ) 421170 – 422343 – 421070 FAKSIMILI (0451) 454646  
PALU 94111

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA**  
**TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**  
**DINAS KESEHATAN PROVINSI SULAWESI TENGAH**  
**TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Fitriani, SKM  
Jabatan : Kepala Seksi Kewaspadaan

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Daeng Dani .SKM..M.Kes  
Jabatan : Kepala UPT Pusat Pelayanan Keselamatan Terpadu

Selaku atasan langsung PIHAK PERTAMA selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA pada tahun 2025 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, 30 Januari 2025

PIHAK KEDUA:  
KEPALA UPT P2KT DINAS KESEHATAN  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

**Daeng Dani .SKM..M.Kes**  
NIP. 19681024199303 2008

PIHAK PERTAMA:  
KEPALA SEKSI KEWASPADAAN  
UPT P2KT

**Fitriani, SKM**  
NIP. 19800806 200012 2 001

PERJANJIAN KINERJA DINAS KESEHATAN  
PROVINSI SULAWESI TENGAH  
TAHUN 2025

NO	SASARAN INDIKATOR/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terpenuhinya Workshop Tim EMT Kab/Kota	Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan yang Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/Atau Berpotensi Bencana Provinsi Sesuai Standar	20 Orang
2.	Ternilainya Kesiapan Kab/Kota dalam Pembentukan EMT	Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan yang Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/Atau Berpotensi Bencana Provinsi Sesuai Standar	1 Kabupaten
3.	Terbentuknya TIM EMT di Kab/Kota melalui Penetapan SK Kepala Dinas Kab/Kota	Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan yang Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/Atau Berpotensi Bencana Provinsi Sesuai Standar	5 Tim Kabupaten
4.	Terdaptarnya Tim EMT pada Tenaga Cadangan Kesehatan dalam Penanganan Krisis Kesehatan di Kab/Kota	Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan yang Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/Atau Berpotensi Bencana Provinsi Sesuai Standar	8 Kab/Kota
5.	Terdampinginya Kab/Kota dalam penyusunan Peta Respon Penanganan Krisis Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan	2 kab/kota

No	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	
		APBD	APBN
	<b>Program : Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat</b>		
	<i>Kegiatan: Penyediaan layanan kesehatan untuk UKP rujukan, UKM dan UKM rujukan tingkat daerah provinsi</i>	Rp. 99,247,450	
	1. Pengelolaan pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan berpotensi bencana		
	2. Upaya pengurangan resiko krisis kesehatan	Rp. 168,356,800	
	<b>Total</b>	<b>Rp. 267,604,250</b>	

Palu, 30 Januari 2025

PIHAK KEDUA:  
KEPALA UPT P2KT DINAS KESEHATAN  
PROVINSI SULAWESI TENGAH



**Daeng Dani .SKM.M.Kes**  
NIP. 19681024199303 2008

PIHAK PERTAMA:  
KEPALA SEKSI KEWASPADAAN  
UPT P2KT



**Fitriani, SKM**  
NIP. 19800806 200012 2 001



# PEMERINTAH PROPINSI SULAWESI TENGAH DINAS KESEHATAN

Jalan R.A Kartini No. Telp (0451) 421070 Faksimili (0451) 454646 Palu 94111

## PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DINAS KESEHATAN PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Fadlun, SKM.,M.AP  
Jabatan : Kepala UPT Balai Pendidikan Pelatihan Kesehatan  
UPT Balai Pendidikan Pelatihan Kesehatan

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : dr. I Komang Adi Sujendra, Sp.PD  
Jabatan : Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah

Selaku atasan langsung PI PERTAMA selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA pada tahun 2025 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah diterapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi Kepala Sub Bagian Tata Usaha rangka pemberian penghargaan dan sanksi

Palu, 30 Januari 2025

**PIHAK KEDUA**  
**KEPALA DINAS KESEHATAN**  
**PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**dr. I Komang Adi Sujendra, Sp.PD**  
NIP. 19650325 199003 1 014

**PIHAK PERTAMA**  
**Kepala UPT Balai Pendidikan**  
**Pelatihan Kesehatan Dinas Kesehatan**  
**Provinsi Sulawesi Tengah**

**Fadlun, SKM., M.AP.**  
NIP. 19730723 199303 2 007

**PERJANJIAN KINERJA  
SUB BAGIAN TATA USAHA  
UPT BALAI PENDIDIKAN PELATIHAN KESEHATAN  
DINAS KESEHATAN PROVINSI SULAWESI TENGAH  
TAHUN 2025**

NO	SASARAN INDIKATOR/SUB KEGIATAN	INDKATOR KINERJA	Target
1.	Meningkatnya Kompetensi Sumber Daya Manusia Kesehatan Se- Provinsi Sulawesi Tengah	Persentase SDM Kesehatan Yang mengikuti peningkatan kompetensi dengan dibuktikan Memiliki Sertifikat Pelatihan	56%
		Persentase Penyusunan Pemetaan Kompetensi	1%
		Persentase SDM Kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya melalui pelatihan Tahun 2025	5%
		Persentase Pelatihan yang dilaksanakan sesuai Kalender Pelatihan/Rencana Pelatihan Tahun 2025	100%
		Persentase Hasil Audit Mutu internal yang ditindak lanjuti	100%

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp. 913.674.024
2.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Rp. 211.345.957
	<b>Jumlah</b>	<b>Rp 1.125.019.981</b>

Palu, 30 Januari 2025

**PIHAK KEDUA  
KEPALA DINAS KESEHATAN  
PROVINSI SULAWESI TENGAH**



**dr. I Komang Adi Sujendra, Sp.PD**  
NIP. 19650325 199003 1 014

**PIHAK PERTAMA  
Kepala UPT Balai Pendidikan  
Pelatihan Kesehatan Dinas Kesehatan  
Provinsi Sulawesi Tengah**



**Fadlun, SKM., M.AP.**  
NIP. 19730723 199303 2 007



**PEMERINTAH PROPINSI SULAWESI TENGAH**  
**DINAS KESEHATAN**

Jalan R.A Kartini No. Telp (0451) 421070 Faksimili (0451) 454646 Palu 94111

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA**  
**TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**  
**DINAS KESEHATAN PROVINSI SULAWESI TENGAH**  
**TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Anna Fitriana, S.IP., M.Si  
Jabatan : Kepala Seksi Penyelenggara Kediklatan  
UPT Balai Pendidikan Pelatihan Kesehatan

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Fadlun, SKM.,M.AP  
Jabatan : Kepala UPT Balai Pendidikan Pelatihan Kesehatan

Selaku atasan langsung PIHAK PERTAMA selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA pada tahun 2025 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah diterapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

Palu, 30 Januari 2025

**PIHAK KEDUA**  
Kepala UPT Balai Pendidikan Pelatihan  
Kesehatan Dinas Kesehatan  
Provinsi Sulawesi Tengah

**Fadlun, SKM., M.A.P.**  
NIP. 19730723 199303 2 007

**PIHAK PERTAMA**  
Kepala Seksi Penyelenggara Kediklatan  
UPT Balai Pendidikan Pelatihan  
Kesehatan

**Anna Fitriana, S.IP., M.Si**  
NIP. 19860608 200701 2 001

**PERJANJIAN KINERJA**  
**SEKSI PENYELENGGARAAN KEDIKLATAN**  
**UPT BALAI PENDIDIKAN PELATIHAN KESEHATAN**  
**DINAS KESEHATAN PROVINSI SULAWESI TENGAH**  
**TAHUN 2025**

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET
1	Terlatihnya Tenaga Pengembang Kompetensi Bapelkes dalam Peningkatan Pengembangan Kompetensi (TOT, MOT, QC dan SI)	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat	50 Orang
2	Tersusunnya Dokumen Pemetaan Kompetensi/TNA	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat	6 Dokumen pemetaan pelatihan
3	Terlatihnya SDM Kesehatan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat	1.500 Orang
4	Terlaksananya Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat	30 Orang

KEGIATAN	ANGGARAN
<b>Kegiatan Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi</b>	
1. Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber daya Manusia Kesehatan	Rp. 115,383,957

Palu, 30 Januari 2025

**PIHAK KEDUA**

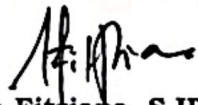
**Kepala UPT Balai Pendidikan Pelatihan  
Kesehatan Dinas Kesehatan  
Provinsi Sulawesi Tengah**



**Fadlun, SKM., M.A.P.**  
NIP. 19730723 199303 2 007

**PIHAK PERTAMA**

**Kepala Seksi Penyelenggara Kediklatan  
UPT Balai Pendidikan Pelatihan  
Kesehatan**



**Anna Fitriana, S.IP., M.Si**  
NIP. 19860608 200701 2 001



**PEMERINTAH PROPINSI SULAWESI TENGAH**  
**DINAS KESEHATAN**

Jalan R.A Kartini No. Telp (0451) 421070 Faksimili (0451) 454646 Palu 94111

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA**  
**TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**  
**DINAS KESEHATAN PROVINSI SULAWESI TENGAH**  
**TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Siti Rafiah, SP  
Jabatan : Kepala Sub Bagian Tata Usaha

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : fadlun, SKM.,M.AP  
Jabatan : Kepala UPT Balai Pendidikan Pelatihan Kesehatan

Selaku atasan langsung PIHAK PERTAMA selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA pada tahun 2025 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah diterapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

Palu, 30 Januari 2025

**PIHAK KEDUA**  
Kepala UPT Balai Pendidikan Pelatihan  
Kesehatan Dinas Kesehatan  
Provinsi Sulawesi Tengah

**Fadlun, SKM., M.AP.**  
NIP. 19730723 199303 2 007

**PIHAK PERTAMA**  
Kepala Sub Bagian Tata Usaha  
UPT Balai Pendidikan Pelatihan Kesehatan

**Siti Rafiah, SP.**  
NIP. 19770727 200012 2 003

**PERJANJIAN KINERJA UPT BALAI PENDIDIKAN PELATIHAN KESEHATAN  
DINAS KESEHATAN PROVINSI SULAWESI TENGAH  
TAHUN 2025**

NO	SASARAN INDIKATOR/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terpenuhinya kebutuhan listrik, Internet di Lingkup UPT Bapelkes	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Bulan
2	Terpeliharanya Kendaraan dinas operasional	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit
3.	Terpeliharanya Peralatan Kantor UPT Bapelkes	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	100 Unit
4	Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Paket
5	Terpenuhinya Pembayaran Honorarium Pengelola Keuangan Tepat Waktu	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	18 Orang/Bulan
6	Terpenuhinya Kebutuhan Peralatan dan perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Unit

	KEGIATAN	ANGGARAN
1	Program penunjang urusan pemerintahan daerah	Rp. 913,674,024
	Kegiatan Adminstrasi Keuangan Perangkat Daerah a. Penyedia administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Rp. 26,649,000
2	Kegiatan administrasi Umum Perangkat Daerah a. Penyedia Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp. 66,572,150
3	Kegiatan Pengadaan barang Milikdaerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah a. Pengadaan sarana dan prasaran a pendukung gedung kantor atau Bangunan lainnya	Rp. 22,500,000
4	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjangurusan Pemerintah Daerah a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya, Air dan Listrik	Rp. 394,999,089
5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 402,962,785
	a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan	Rp. 33,770,000

	<b>KEGIATAN</b>	<b>ANGGARAN</b>
	Dinas Operasional atau Lapangan	Rp. 248,672,785
	b. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
	c. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp. 120,520,000
	<b>J u m l a h</b>	<b>Rp. 913,674,024</b>

Palu, 30 Januari 2025

**PIHAK KEDUA**

**Kepala UPT Balai Pendidikan  
Pelatihan Kesehatan Dinas Kesehatan  
Provinsi Sulawesi Tengah**



**Fadlun, SKM., M.AP.**  
NIP. 19730723 199303 2 007

**PIHAK PERTAMA**

**Kepala Sub Bagian Tata Usaha  
UPT Balai Pendidikan Pelatihan Kesehatan**



**Siti Rafiah, SP.**  
NIP. 19770727 200012 2 003



**PEMERINTAH PROPINSI SULAWESI TENGAH**  
**DINAS KESEHATAN**

Jalan R.A Kartini No. Telp (0451) 421070 Faksimili (0451) 454646 Palu 94111

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA**  
**TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**  
**DINAS KESEHATAN PROVINSI SULAWESI TENGAH**  
**TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Eriwahyuningtias, SKM.,M.AP  
Jabatan : Kepala Seksi Pengendalian Mutu  
UPT Balai Pendidikan Pelatihan Kesehatan

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Fadlun, SKM.,M.AP  
Jabatan : Kepala UPT Balai Pendidikan Pelatihan Kesehatan

Selaku atasan langsung PIHAK PERTAMA selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA pada tahun 2025 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah diterapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

Palu, 30 Januari 2025

**PIHAK KEDUA**  
Kepala UPT Balai Pendidikan Pelatihan  
Kesehatan Dinas Kesehatan  
Provinsi Sulawesi Tengah

**Fadlun, SKM., M.A.P.**  
NIP. 19730723 199303 2 007

**PIHAK PERTAMA**  
Kepala Seksi Pengendalian Mutu  
UPT Balai Pendidikan Pelatihan Kesehatan

**Eriwahyuningtias, SKM., M.A.P.**  
NIP. 19710116 199101 2 001

**PERJANJIAN KINERJA**  
**SEKSI PENGENDALIAN MUTU**  
**UPT BALAI PENDIDIKAN PELATIHAN KESEHATAN**  
**DINAS KESEHATAN PROVINSI SULAWESI TENGAH**  
**TAHUN 2025**

NO	SASARAN INDIKATOR/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terevaluasinya penerapan sistem pengendalian mutu	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat	2 Laporan
2.	Terakreditasinya pelatihan bidang kesehatan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat	100 Pelatihan
3	Terjalinnnya Kerjasama Pelatihan sesuai ketentuan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat	13 Mitra
4	Terevaluasinya penyelenggaraan dan Pelatihan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat	1 Dokumen

**KEGIATAN**

**ANGGARAN**

**Kegiatan Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi**

1. Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber daya Manusia Kesehatan Rp. 95,962,000

Palu, 30 Januari 2025

**PIHAK KEDUA**

**Kepala UPT Balai Pendidikan Pelatihan Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah**

**Fadlun, SKM., M.AP.**  
**NIP. 19730723 199303 2 007**

**PIHAK PERTAMA**

**Kepala Seksi Pengendalian Mutu UPT Balai Pendidikan Pelatihan Kesehatan**

**Eriwahyuningtias, SKM., M.AP.**  
**NIP. 19710116 199101 2 001**